MODUL

ILMU EKONOMI
DAN
EKONOMI PEMBANGUNAN

Oleh :

Novita Nurul Islami, S.Pd., M.Pd.

s

PROGRAM STUDI TADRIS IPS

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Modul Mata Kuliah Ilmu Ekonomi dan Pendidikan IPS ini disusun oleh:

Nama	: Novita Nurul Islami., S.Pd., M.Pd
NIP	: 198711212020122002
NIDN	: 0021118709

dan digunakan untuk kalangan sendiri sebagai bahan ajar pada:

Mata Kuliah	: Ilmu Ekonomi dan Pendidikan IPS
Semester	: Genap
Tahun Akademik	: 2021/2022
Fakultas	: Tarbiyah dan Ilmu Kependidikan
Universitas	: UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Disahkan pada tanggal : 10 Januari 2022

Mengesahkan:

Wakil Dekan I Bidang Akademik

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dr. H. Hashudi, M.Pd.

NIP. 197209182005011100

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT atas lindungan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Modul Ajar Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan ini dengan lancar tanpa halangan yang berarti. Penyusunan modul ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran dan sebagai bahan kuliah Ilmu Ekonomi dan Pendidikan IPS bagi mahasiswa serta bagi khalayak umum.

Modul ajar ini menyajikan beberapa materi pokok tentang konsep ilmu ekonomi, prinsip, masalah dasar ekonomi pembangunan, karakteristik umum dan struktur kegiatan ekonomi negara sedang berkembang, teori pembangunan ekonomi dan model pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan dan pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, peranan perdagangan dalam pembangunan serta masalah hubungan internasional bagi negara sedang berkembang serta formulasi penyelesaian masalah dalam lingkungan masyarakat.

Terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang telah memberi masukan demi kesempurnaan modul ajar ini. Modul ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan khalayak umum, khususnya yang ingin mengetahui tentang ilmu ekonomi dan pembangunan ekonomi. Semoga modul ini bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi para pembaca.

Jember, Januari 2022

Penulis

DESKRIPSI MODUL

Modul ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan ini terdiri atas 6 bab, cakupan materi yang dibahas meliputi:

1. konsep dasar ekonomi pembangunan;
2. karakteristik umum dan struktur kegiatan ekonomi negara sedang berkembang,
3. teori pembangunan ekonomi dan model pertumbuhan;
4. kemiskinan, ketimpangan dan pembangunan ekonomi;
5. pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi;
6. peranan perdagangan dalam pembangunan.

Modul ini sangat menarik untuk dibaca oleh mahasiswa. Selain menggunakan tata bahasa yang mudah dipahami, dari segi substansi ruang lingkupmateri yang disajikan sudah meng-cover standart bidang ilmu ekonomi dan ekonomi pembangunan serta beberapa isu tambahan.

TINJAUAN MATA KULIAH

Mata kuliah ilmu ekonomi dan Pendidikan IPS merupakan mata kuliah yang secara spesifik mempelajari persoalan-persoalan ekonomi sosial di antaranya tentang pembangunan yang sudah, sedang, dan akan terjadi di negaraberkembang. Pembangunan tersebut mencakup industri, perbankan, keuangan, dan bisnis. Selainitu di program studi ini kamu akan menganalisis berbagai isu isu perekonomian untuk kemudian mencari dan menemukan solusi dari berbagai persoalan ekonomi secara kritis, kreatif, dan inovatif. Topik kajian secara khusus dalam mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar, teori ekonomi pembangunan dan membandingkan persoalan-persoalan pembangunan ekonomi yang ada di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia serta menganalisis alternatifsolusi penyelesaian dari permasalahan pembangunan pada Negara berkembang dengan teliti, kritis, kreatif dan disertai kepercayaan diri yang tinggi terhadap hasil analisisnya. Berikut gambaran peta konsep capaian pembelajaran dan kemampuan akhir yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ilmu ekonomi dan Pendidikan IPS:

PETA KONSEP CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

Nama/Kode MK : Ilmu Ekonomi dan Pendidikan IPS / IPSS11909
SKS : 4
Semester : 2
Program Studi : Tadris IPS

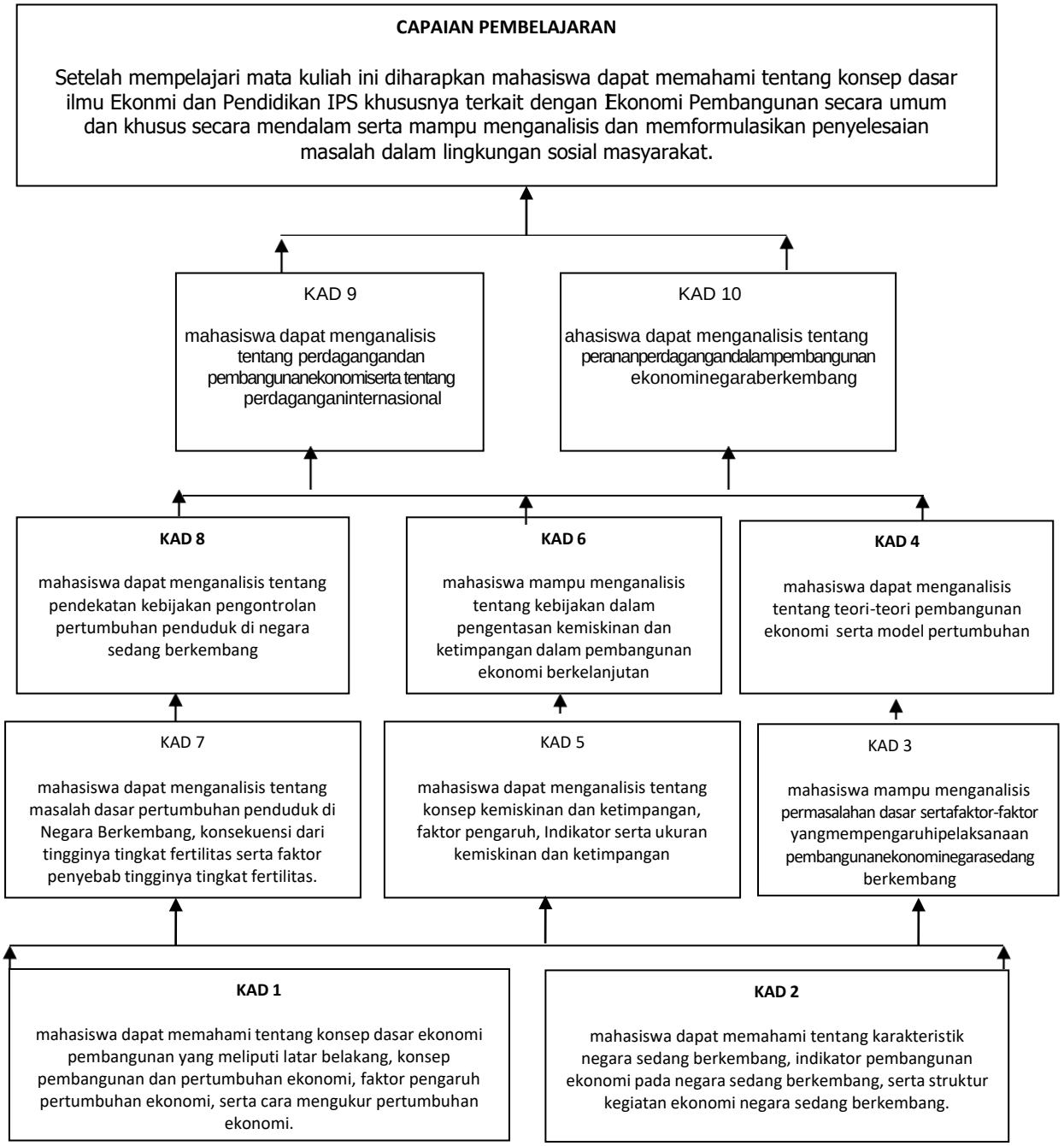

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Prakata	ii
Deskripsi Buku	iii
Tinjauan Mata Kuliah	iv
Peta Konsep CP dan KAD Mata Kuliah	v
Daftar Isi	vi
Bab I. Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan	**1**
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Konsep Pembangunan Ekonomi	3
1.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi	14
1.4 Faktor Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi	22
1.5 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi	26
1.6 Bahan Diskusi	28
1.7 Latihan Soal	29
Bab 2. Karakteristik Umum dan Struktur Kegiatan Ekonomi Negara Sedang Berkembang	**30**
2.1 Pendahuluan	30
2.2 Karakteristik Negara Sedang Berkembang	31
2.3 Indikator Pembangunan Ekonomi pada Negara Berkembang	33
2.4 Struktur Kegiatan Ekonomi Negara Sedang Berkembang	39
2.5 Permasalahan Dasar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Negara Sedang Berkembang	41
2.6 Latihan Soal	54
Bab 3. Teori Pembangunan Ekonomi dan Model Pertumbuhan	**55**
3.1 Pendahuluan	55
3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Linear	56
3.3 Teori Transformasi Struktural dan Model Perubahan Structural	63
3.4 Teori Ketergantungan Internasional	66
3.5 Model Pertumbuhan Neo Klasik	70
3.6 Latihan Soal	71
Bab 4. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pembangunan Ekonomi	**73**
4.1 Pendahuluan	73
4.2 Konsep Kemiskinan	74
4.3 Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan	77
4.4 Bentuk dan Jenis Kemiskinan	79
4.5 Indikator-Indikator Kemiskinan	82
4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin	86
4.7 Konsep Ketimpangan	88
4.8 Mengukur Ketimpangan	91
4.9 Penyebab Kemiskinan	95
4.10 Ukuran Kemiskinan	96

4.11 Indikator Kemiskinan.....97
4.12 Bahan Diskusi 101
4.13 Latihan Soal 102
Bab 5. Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.....104
5.1 Pendahuluan.....104
5.2 Masalah Dasar Pertumbuhan Penduduk di Negara Berkembang 105
5.3 Konsekuensi dari Tingginya Tingkat Fertilitas.....117
5.4 Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Fertilitas.....118
5.5 Latihan Soal 131
Bab 6. Peranan Perdagangan dalam Pembangunan 132
6.1 Pendahuluan.....132
6.2 Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi.....134
6.3 Perdagangan Internasional.....135
6.4 Peranan Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang.....144
6.5 Latihan Soal 146
Daftar Pustaka 148

BAB 1

Konsep Dasar Ekonomi Pembangunan

Lingkup pembahasan dalam bab 1 ini secara menyeluruh di antaranya membahas tentang:

1. **Pendahuluan**
2. **Konsep Pembangunan Ekonomi**
3. **Konsep Pertumbuhan Ekonomi**
4. **Faktor Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi**
5. **Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi**
6. **Bahan Diskusi**
7. **Latihan Soal-Soal**

KAD 1 : mahasiswa dapat memahami tentang konsep dasar ekonomi pembangunan yang meliputi latar belakang, konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, faktor pengaruh pertumbuhan ekonomi, serta cara mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.1 Pendahuluan

Setelah Perang Dunia ke II para ilmuwan, pejabat maupun lembaga-lembaga pemerintah baik di negara maju maupun negara sedang berkembang mulai memberi perhatian besar terhadap masalah pembangunan ekonomi. Gagasan tentang pembangunan ekonomi mulai muncul, pembangunan ekonomi dinilai menjadi suatu kebutuhan yang mendesak bagi negara sedang berkembang. Hal ini didorong semangat untuk mengejar ketertinggalan negara sedang berkembang dibanding dengan negaramaju. Hal Inilah yangmenjadi pendorong lahirnya ekonomi pembangunan.

Sedangkan definisi Ekonomi Pembangunan menurut Sukirno (2014), yaitu sebagai suatu cabang dari Ilmu Ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan caracara untuk mengatasi masalah- masalah itu, supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebihcepat.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari analisis ekonomi pembangunan adalah untuk:

1. menelaah masalah-masalah yang terjadi khususnya di negara sedang berkembang;
2. menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan khususnya di negara-negara sedang berkembang;
3. mengemukakan cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi khususnya di negara-negara tersebut.

Ekonomi pembangunan agak berbeda dengan Ilmu Ekonomi yang lain seperti Ilmu ekonomi mikro maupun Ilmu ekonomi makro. Perbedaannya, bahwa ekonomi pembangunan belum memiliki pola analisis yang mapan yang dapat diterima oleh kebanyakan ahli-ahli ekonomi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu

1. sangat kompleksnya masalah pembangunan;
2. banyaknya faktor yang mempengaruhi pembangunan dan banyaknya faktor yang terpengaruh oleh pembangunan. Hal ini menyebabkan topik yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas. Beberapa contoh bidang yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan adalah: masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, distribusi pendapatan dan pembangunan, pengangguran, pembentukan modal, perdagangan luar negeri, pengerahan tabungan, bantuan luar negeri, migrasi, permasalahan dalam bidang pertanian, industri, dan lain sebagainya;
3. ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Di samping beberapa faktor di atas, para ekonom sampai saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai faktor-faktor apa yang memegang peranan paling penting dalam pembangunan ekonomi, dan bagaimana mekanisme proses pembangunan ekonomi

tersebut terjadi. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa pola analisis ekonomi pembangunan tidak dapat ditentukan sifat-sifatnya. Apabila dicermati, pada hakikatnya pembahasan-pembahasan mengenai pembangunan ekonomi dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu:

1. pembahasan mengenai pembangunan ekonomi, baik yang bersifat deskriptif maupun analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara sedang berkembang serta implikasi sifat- sifat tersebut kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi;
2. pembahasan mengenai pembangunan ekonomi yang bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang.

Dalam pembahasan masalah ekonomi, istilah ekonomi pembangunan sering dianggap sama dengan pembangunan ekonomi. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda. Di samping kedua istilah tersebut masih ada istilah lain yang sering dipertukarkan yaitu antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi atau perkembangan ekonomi. Agar dapat memahami perbedaan antara beberapa istilah tersebut, diuraikan lebih mendalam pada pembahasan pada point berikut.

1.2 Konsep Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti yaitu:

1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok;
2) peningkatan standar hidup; dan
3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial.

Sedangkan menurut Meier dan Rauch (2000) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi.

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Bruto atau GDP). Apabila pertambahan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertambahan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertambahan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

Menurut Arsyad (2004) menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai :

1) Peningkatan pendapatan per kapita masyarakat yaitu tingkat pertambahan GDP/GNP pada suatu tahun tertentu adalah melebihi tingkat pertambahan penduduk.
2) Perkembangan GDP/GNP yang terjadi disuatu negara diikuti oleh perubahan dan modernisasi struktur ekonominya.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda antara satu orang dengan orang lainnya, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara yang satu dengan negara yang lainnya. Namun, secara umum istilah pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan warga masyarakat. Kemajuan di sini lebih diartikan sebagai kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, kata pembangunan sering dipahami sebagai kemajuan yangdicapai sebuahmasyarakat di bidangekonomi, sehingga diberi istilah pembangunanekonomi.

Hal ini sesuai dengan pendapat Bratakusumah, Deddy dan Riyadi (2005) yang menjelaskan bahwa secara umum terdapat suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Sedangkan pembangunan menurut Nugroho dan Rochman Dahuri (2004) dapat diartikan sebagai suatu upaya yang terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Sedangkan menurut Tikson (2005), pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Transformasi dalam struktur ekonomi misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dll. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialisme/ sekulerisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Analisa pembangunan ekonomi atau lebih dikenal dengan ekonomi pembangunan *(development economic)*, merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus membahas mengenai masalah-masalah pembangunan di negara yang sedang berkembang. Tujuan dari analisanya adalah untuk menelaah faktor-faktor yang menimbulkan keterlambatan pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang dan selanjutnya mengemukakan cara-cara pendekatan yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi sehingga dapat mempercepat jalannya pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Beberapa pengertian dan definisi pembangunan ekonomi menurut para ahli :

1. Adam Smith dalam Suryana (2000: 55) : Pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi
2. Simon Kuznets dalam Jhingan (2000: 57) : Pembangunan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukan. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen yaitu, pertama pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang, kedua teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk dan ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien

memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

3. Meier dalam Adisasmita (2005: 205) : Pembangunan ekonomi bertindak sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.
4. Schumpeter dalam Suryana (2000: 5) Pembangunan ekonomi bukan merupakanproses yang harmonis atau gradual, tetapi merupakan perubahan yang spontan dan tidak terputus-putus. Pembangunan ekonomi disebabkan oleh perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan. Pembangunan ekonomi berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah sedangkan pendapatan nasional merupakan nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian di dalam masa satu tahun. Pertambahan pendapatan nasional danpendapatan perkapita dari masa ke masa dapat digunakan untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan juga perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakatsuatu daerah. Dalam pengertian pembangunan ekonomi yang dijadikan pedoman adalah suatu sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang.

Dengan bahasa lain, Boediono (2008) menyebutkan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pengertian tersebut mencakup tiga aspek, yaitu proses, output perkapita, dan jangka panjang. Jadi tanpa bermaksud menggurui, Boediono menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan gambaran ekonomi atau hasil pada saat itu. Boediono juga menyebutkan secara lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan ouput perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan eknomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabilaselama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi adalah cara yang digunakan oleh suatu negara untuk meningkatkan pendapatan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalamjangka yang panjang, disertai dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut pembangunan ekonomi memiliki 3 sifat penting di antaranya adalah (Bannock, 2004) :

1. Pembangunan sebagai suatu proses

   Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses, artinya pembangunan ekonomi merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Hal ini berlangsung secara terus menerus dan bukan merupakan kegiatan yang sifatnya tidak disengaja.

2. Pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

   Sebagai suatu usaha, pemabangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

3. Kenaikan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang.

   Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Namun, haltersebut bukan berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalamikenaikan secaraterus-menerus, tetapi pada suatu waktu tertentu dapat turun, namun turunnya tidak terlalu besar. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara dan yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Dapat kita pahami bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang, disertai dengan perubahan ciri penting suatu masyarakat, yaitu

perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonominya. Terjadinya pembangunan ekonomi yang maksimal jika kenaikan pendapatan perkapita dapat diikuti dengan perubahan teknologi serta modernisasi. Menurut Rostow, pembangunan ekonomi berarti suatu proses yang menyebabkan antara lain:

1. Perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, maupun sosial yang pada awalnya mengarah ke dalam suatu daerahmenjadi berorientasi keluar.
2. Perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyakanak menjadimembatasijumlah keluarga.
3. Perubahan dalam kegiatan penanaman modal masyarakat, dari yang awalnya melakukan penanaman modal yang tidak produktif misalnya penanaman modal berupa emas, tanah maupun rumahberalihmenjadi investasi produktifmisalkanuntuk berwiraswasta.
4. Perubahan cara masyarakat dalam menentukan kedudukan seseorang dalam masyarakat, dari semula ditentukan olehkedudukankeluarga atau suku bangsa menjadi ditentukan oleh kesanggupan melaksanakan pekerjaan.
5. Perubahan dalam pandangan masyarakat yang mulanya berkeyakinan bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh keadaan alam sekitarnya, dan selanjutnya berpandangan bahwa manusia harus memanipulasi alam sekitarnya untuk menciptakan kemajuan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, namun pada hakikatnya faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Bannock, 2004).

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi diantaranya adalah sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam yang meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim/ cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut, sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu Negara, terutama dalam penyediaan bahan baku produksi. Sementara itu, keahlian dankewirausahaan dibutuhkan untuk mengolah bahan mentah dari alam, menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih tinggi atau disebut juga sebagai proses produksi.

Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar merupakan pasar yang berpotensi untuk memasarkan hasil-hasil produksi, sementara kualitas penduduk menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditujukan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

b. Faktor non ekonomi

Faktor non ekonomi mencakup kondisi sosial kultur yang ada di masyarakat, keadaan politik, kelembagaan, serta sistem yang berkembang dan berlaku.

Pembangunan ekonomi juga memiliki dampak diantaranya terdapat dampak positif dan dampak negatif (Bannock, 2004):

a. Dampak positif
   1) Melalui pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar dan mampu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.
   2) Adanya pembangunan ekonomi dimungkinkan terciptanya lapangan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan demikian akan mengurangi jumlah pengangguran.
   3) Terciptanya lapangan pekerjaan akibat adanya pembangunan ekonomi secara langsung dapat memperbaiki tingkat pendapatan nasional.
   4) Melalui pembangunan ekonomi dimungkinkan adanya perubahan struktur perekonomian dari struktur akonomi agraris menjadi ekonomi industri, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara akan semakin beragam dan dinamis.
   5) Pembangunan ekonomi menuntut peningkatan kualitas SDM sehingga dalam hal ini, dimungkinkan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang denganpesat, dengan demikian, akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak negatif

1) Jika dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak terencana dengan baik dapat mengakibatkan adanya kerusakan lingkungan hidup
2) Perubahan struktur ekonomi agraris menjadi industri (industrialisasi) mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian.
3) Perubahan struktur ekonomi agraris menjadi industri juga dapat mengakibatkan hilangnya habitat alam baik hayati atau hewani.

Tujuan Pembangunan Ekonomi Semua negara yang ada di dunia ini, baik negara maju maupun negara sedang berkembang selalu melaksanakan pembangunan ekonomi. Tujuan negara-negara tersebut mengadakan pembangunan ekonomi pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. menaikkan produktivitas,

b. menaikkan pendapatan per kapita.

Namun, bagi negara sedang berkembang, tujuan dari pembangunan ekonomi pada prinsipnya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya sehingga setaraf dengan tingkat hidup negara maju.

Sedangkan manfaat Pembangunan Ekonomi Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat maupun perekonomian saat terjadinya pembangunan ekonomi pada suatu masyarakat atau negara, antara lain:

a. output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah;

b. kebahagiaan penduduk akan bertambah, karena pembangunan ekonomi dapat menambah kesempatan untuk mengadakan pilihan yang lebih luas;

c. memberikan kesempatan kepada manusia yang lebih besar untuk memanfaatkan alam sekitarnya;

d. memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih kesenangan yang lebih luas;

e. dengan terjadinya pembangunan ekonomi, akan tersedia lebih banyak jasa yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia;

f. pembangunan ekonomi akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang sudah maju.

Pembangunan ekonomi dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup segala aspek dan kebijaksanaan yang komprehensif baik ekonomi maupun non ekonomi. Oleh sebab itu, sasaran pembangunan yang minimal ada dan pasti ada menurut Todaro dalam Suryana (2000:6) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti perumahan, kesehatan, dan lingkungan.
2. Mengangkat taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi pendapatan dan penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya manusiawi, yang semata-mata bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materi, akan tetapi untuk meningkatkan kesadaran akan harga diri baik individu maupun nasional.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi semua individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap perbudakan dan ketergantungan, tidak hanya hubungan dengan orang lain dan Negara lain, tetapi dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan yang terpusat dan tidak merata yang dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi dengan kehidupan sosial, politik yang demokratis, yang telahmenyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang nyaris berlanjut dengan krisis moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional (tahun 90-an) yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, reformasi di segala bidang harus dilakukan untuk bangkit kembali dan memperteguh kepercayaan diri dan kemampuan untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan, dan pengembangan pembangunan ekonomi dengan paradigma baru yang berwawasan kerakyatan.

Aktualisasi dari pembaharuan tersebut dengan dikeluarkannya kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999). Dalam Garis-Garis BesarHaluan Negara 1999-2004 ditetapkan arah kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi, diantaranya :

1. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar.
2. Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.

3. Mengoptimalkan peranan pemerintah untuk melakukan regulasi, layanan publik, subsidi, dan insentif yang dilakukan secara transparan.
4. Mengembangkan kehidupan yang layak, terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar.
5. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan secara maksimal sektor-sektor unggulan setiap daerah.
6. Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan sinergis.
7. Mengembangkan kebijakan fiscal.
8. Mengembangkan pasar modal yang sehat, transparansi dan efisien.
9. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan ekonomiproduktif.
10. Mengembangkan kebijakan industri, perdagangan dan investasi.
11. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar lebih efisien dan produktif.
12. Menata Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara efisien, transparan, dan professional.
13. Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi dan Badan Usaha Milik Negara.
14. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan, kelembagaan, dan budaya lokal.
15. Meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah.
16. Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan dan penggunaan tanah secara transparan dan produktif.
17. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana public, termasuk transportasi, telekomunikasi, energi, listrik, dan air bersih.
18. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu.
19. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan, dan pembelaan tenaga kerja.
20. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi bangsa sendiri.

21. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
22. Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna meningkatkan sektor riil terutama bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.
23. Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan mengurangi defisit negara melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan subsidi, dan pinjaman luar negeri secara bertahap.
24. Mempercepat rekapitalisasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta.
25. Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan.
26. Melakukan negosiasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama-sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, lembaga keuangan lainnya, dan negara donor.
27. Melakukan secara proaktif negosiasi dan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka meningkatkan volume dan nilai ekspor.
28. Menyehatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum.

Beberapa arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi tersebut di atas menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tersebut merupakan rangkaian upaya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Suryana (2000) menyatakan bahwa ada 4 (empat) model pembangunan yaitu model pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan, penciptaan lapangan pekerjaan, penghapusan kemiskinan dan model pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar.

Berdasarkan atas model pembangunan tersebut, keseluruhan model tersebut bertujuan pada perbaikan pola kualitas hidup, peningkatan barang-barang dan jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang layak, dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua rumah tangga yang kemudian sampai dengan batas maksimal. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi

(economic growth) dimana pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

1.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Bannock dkk. (2004) dalam bukunya yang berjudul "A Dictionary of Economics", ia mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Menurut Simon Kuznets dalam Jhingan (2003), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Dari definisi tersebut, terdapat tiga komponen pokok dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

1. Kenaikan output secara berkesinambungan merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi, sedangkan kemampuan menyediakan berbagai jenis barang itu sendiri merupakan tanda kematangan ekonomi di suatu negara.
2. Perkembangan teknologi merupakan dasar atau prakondisi bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
3. Untuk mewujudkan potensi pertumbuhan yang terkandung di dalam teknologi baru, perlu diadakan serangkaian penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Inovasi dalam bidang teknologi harus dibarengi dengan inovasi dalam bidang sosial.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Dengan bahasan lain bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan atau nilai akhir pasar (total market value) dari barang-barang akhir dan jasa-jasa (final goods and services) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi modern merupakan pertanda penting di dalam kehidupan perekonomian. Prof.Simon Kuznets menunjukkan enam ciri pertumbuhan ekonomi modern yang muncul dalam analisa yang didasarkan pada produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja dan sebangsanya. Dari keenam ciri itu, dua diantaranya adalah kuantitatif yang berhubungan dengan pertumbuhan produk nasional dan pertumbuhan penduduk, yang dua berhubungan dengan peralihan struktural dan dua lagi dengan penyebaran internasional. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi tersebut adalah :

1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita

   Pertumbuhan ekonomi modern, sebagaimana terungkap dari pengalaman negara maju sejak akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19 yang ditandai dengan laju kenaikan produk per kapita yang tinggi dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Laju kenaikan yang luar biasa itu paling sedikit sebesar lima kali untuk penduduk dan paling sedikit sepuluh kali untuk produksi.

2. Peningkatan Produktivitas

   Pertumbuhan ekonomi modern dapat dilihat dari semakin meningkatnya laju produk per kapita terutama sebagai akibat adanya perbaikan kualitas input yang

meningkatkan efisiensi atau produktivitas per unit input. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya masukan sumber tenaga kerja dan modal dan semakin meningkatnya efisiensi atau kedua-duanya. Kenaikan efisiensi berarti penggunaan output yang lebih besar untuk setiap unit input. Menurut Kuznets, laju kenaikan produktivitas ternyata dapat menjelaskan hampir keseluruhan pertumbuhan produk per kapita di negara maju. Bahkan kendati dengan beberapa penyesuaian untuk menampung biaya dan input yang tersembunyi, pertumbuhan produktivitas tetap dapat menjelaskan lebih dari separuh pertumbuhan dalam produk per kapita.

3. Laju perubahan struktural yang tinggi

Perubahan struktural dalam pertumbuhan ekonomi modern mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahan terhadap hokum serta perubahan status kerja buruh.

4. Urbanisasi

Pertumbuhan ekonomi modern ditandai pula dengan semakin banyaknya penduduk negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan. Inilah yang disebut urbanisasi. Urbanisasi pada umumnya merupakan produk industrialisasi. Skala ekonomi yang timbul dalam usaha nonagraris sebagai hasil perubahan teknologi menyebabkan perpindahan tenaga kerja dan penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan. Karena sarana teknis transportasi, komunikasi dan organisasi berkembang menjadi lebih efektif, maka terjadilah penyebaran unit-unit skal optimum. Semua proses ini mempengaruhi pengelompokan penduduk berdasarkan status sosial dan ekonomi serta mengubah pola dasar peri kehidupan.

Urbanisasi pada pertumbuhan ekonomi modern negara maju menyebabkan menurunnya angka kelahiran dan bergeser ke arah keluarga kecil. Urbanisasi mempersatukan orang-orang dari berbagai daerah pedesaan. Mereka berusaha dan saling belajar dari mereka yang telah menetap di kota. Hal ini mempermudah perkembangan hubungan impersonal kehidupan modern dan juga mengajarkan kerja sama. Di atas segalanya, perkembangan itu menciptakan iklim yang cocok bagi kegiatan intelektual yang berkaitan dengan peradaban modern, dan dengan demikian menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi peningkatan ilmu pengetahuan.

5. Ekspansi Negara maju

Pertumbuhan Negara maju kebanyakan tidak sama. Pada beberapa bangsa, pertumbuhan ekonomi modern terjadi lebih awal daripada bangsa lain. Hal ini sebagian besar disebabkan perbedaan latar belakang sejarah dan masa lalu. Ketika ilmu dan pengetahuan modern mulai berkembang.

6. Arus barang, modal, dan orang antar bangsa.

Arus barang, modal, dan orang antar bangsa semakin meningkat sejak kuartal kedua abad ke-19 sampai perang dunia I tetapi mulai mundur pada perang dunia I dan berlanjut sampai akhir perang dunia II. Namun demikian sejak awal tahun 50-an, terjadilah peningkatan dalam arus barang, modal, dan antar bangsa.

Keenam ciri pertumbuhan ekonomi modern tersebut diatas saling kait mengait. Keenamnya terjalin dalam urutan sebab akibat. Dengan rasio yang stabil antara tenaga kerja terhadap penduduk total, laju kenaikan produk per kapita menjadi tinggi. Ini berarti produktivitas buruh menjadi meningkat. Hal ini, sebaliknya menyebabkan kenaikan yang tinggi dalam produk produk per kapita dan konsumsi per kapita. Yang belakangan ini sebaliknya merupakan hasil dari kemajuan teknologi dan perubahan dalam skala produksi perusahaan.

Sedangkan menurut Simon Kuznet dalam Jhingan (2003:57), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Atas sudut pandang tersebut, penelitiam ini menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi yang akan dilihat dari sudut pandang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRBt) dengan PDRB sebelumnya (PDRBt-1).

$$Laju\ PertumbuhanEkonomi\ \Delta Y = \frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$$

Pertumbuhan ekonomi umumnya didefinisikan sebagai kenaikan PDB riil per kapita. Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar keluaran total sebuah negara, yang merupakan nilai pasar semua barang jadi dan jasa akhir yang diproduksi selama periode waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam sebuahnegara. Kenaikan PDB dapat muncul melalui:

1. Kenaikan penawaran tenaga kerja

   Penawaran tenaga kerja yang meningkat dapat mengahsilkan keluaran yang lebih banyak. Jika stok modal tetap sementara tenaga kerja naik, tenaga kerja baru cenderung akan kurang produktif dibandingkan tenaga kerja lama.

2. Kenaikan modal fisik atau sumber daya manusia

   Kenaikan stok modal dapat juga menaikkan keluaran, bahkan jika tidak disertai oleh kenaikan angkatan kerja. Modal fisik meningkatkan produktivitas tenaga kerja maupun menyediakan secara langsung jasa yang bernilai. Investasi dalam modal sumber daya manusia merupakan sumber lain pertumbuhan ekonomi.

3. Kenaikan Produktivitas

   Kenaikan produktivitas menunjukkan setiap unit input tertentu memproduksi lebih banyak pengeluaran. Input produktivitas dapat dipengatuhi oleh faktor-faktor termasuk perubahan teknologi, kemajuan pengetahuan lain, dan ekonomisnya skala produksi (Case dan Fair, 2012).

Suatu perekonomian dapat berkembang dengan cepat, akan tetapi dapat pula tidak mengalami perkembangan. Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi, adakalanya pertumbuhan ekonomi bergerak dengan cepat, namun terkadang bergerak dengan lambat. Hal ini dikarenakan oleh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya adalah :

1. Barang Modal

   Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memprediksi output (barang dan jasa). Misalnya : mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya.

2. Teknologi

Selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

3. Tenaga kerja

Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

4. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam (SDA) adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Sumber daya alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara.

5. Manajemen

Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah serta jumlah penduduk yang besar, apabila potensi yang ada dikelola dengan baik maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

6. Kewirausahaan

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah seseorang yang mampu dan berani untuk mengambil resiko dalam melakukan suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Peranan wirausahawan dalam memajukan perekonomian telah terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak.

7. Informasi

Salah satu agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat

menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang cepat dan akurat.

Disisi lain, ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2014) yaitu :

1. Tanah dan kekayaan alam lain

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Di dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli, dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha pengusaha dari negara-negara/daerah-daerah yag lebih maju untuk mengusahan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

2. Jumlah dan mutu penduduk serta tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Selain itu pula, perkembangan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar yang diakibatkannya. Besarnya luas pasar dari barang-barang yang dihasilkan dalam suatu perekonomian tergantung dari pendapatan penduduk dan jumlah penduduk.

Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain

yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi atau pun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi efisiensi pertumbuhan ekonomi, barang-barang modal yang sangat bertambah jumlahnya dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan maka kemajuan yang akan dicapai akan jauh lebih rendah.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sikap masyarakat dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan yang besar pada pertumbuhan ekonomi. Sikap itu diantaranya adalah sikap menghemat untuk mengumpulkan lebih besar uang untuk investasi, sikap kerja keras dan kegiatan-kegiatan mengembangkan usaha, dan sikap yang selalu menambah pendapatan dan keuntungan. Disisi lain sikap masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara-cara produksi yang modern yang produktivitasnya tinggi. Oleh karena pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat.

5. Luas pasar sebagai sumber pertumbuhan

Adam Smith telah menunjukkan bahwa spesialisasi dibatasi oleh luasnya pasar, dan spesialiasi yang terbatas membatasi pertumbuhan ekonomi. Pandangan Smith ini menunjukkan bahwa sejak lama orang telah lama menyadari tentang pentingnya luas pasar dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila luas pasar terbatas, tidak ada dorongan kepada para pengusaha untuk menggunakan teknologi modern yang tingkat produktivitasnya tinggi. Karena produktivitasnya rendah maka pendapatan para pekerja tetap rendah, dan ini selanjutnya membatasi pasar.

Manfaat pertumbuhan ekonomi antara lain sebagai berikut (Dornbucsh, R dan Fischer, S, 2001) :

1. Laju pertumbuhannya untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Pendapatan per kapitanya dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkat pendapatan per kapitanya dengan kerja konstan semakin tinggi tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.
2. Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan Negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional. Sebagai dasar penentuan prioritas pemberian bantuan luar negeri oleh Bank Dunia atau lembaga Internasional lainnya.
3. Sebagai dasar pembuatan prakiraan bisnis, khusunya persamaan penjualan bagi perusahaan untuk dasar penyusunan perencanaan produk dan perkembangan sumber daya (tenaga kerja dan modal).

1.4 Faktor Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2014), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1) Tanah dan kekayaan alam lainnya

Kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

2) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah akan mendorong jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Di samping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal tersebut menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjutnya menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Dorongan lain yang timbul dari perkembangan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi bersumber dari akibat pertambahan itu kepada luas pasar. Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi terutama dihadapi oleh masyarakat yang kemajuan ekonominya belum tinggi tetapi telah menghadapi masalah kelebihan penduduk. Apabila dalam perekonomian sudah berlaku keadaan dimana pertambahan tenaga kerja tidak dapat menaikkan produksi nasional yang tingkatnya adalah lebih cepat dari tingkat pertambahan penduduk, pendapatan per kapita akan menurun.Dengan demikian penduduk yang berlebihan akan menyebabkan kemakmuran masyarakat merosot.

3) Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat banyak jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah dari pada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah.

4) Sistem sosial dan sikap masyarakat

Di dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial dan sikap masyarakat yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi meningkat atau menurun

merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di dalam faktor produksi tersebut. Menurut Adisasmita (2013: 103), beberapa faktor produksi tersebut terdiri dari:

1) Sumber daya alam

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber daya alam (utamanya tanah). Sumber daya tanah memiliki beberapa aspek, misalnya kesuburan tanah, letaknya, iklim, sumber air, kekayaan hutan, mineral dan lainnya. Tersedianya kekayaan sumber daya alam yang potensial akan menjamin berlangsungnya pertumbuhan secara lancar, sumber daya alam yang tersedia harus dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan selebihnya dipasarkan keluar wilayah. Semakin banyak dan semakin luas pasar yang dilayani untuk berbagai komoditas yang dihasilkan adalah semakin baik dan menguntungkan.

Untuk menunjang kegiatan pemasaran tersebut diperlukan tersedianya fasilitas dan transportasi yang berkapasitas cukup dan berkualitas pelayanan yang memadai. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah saja belum cukup, masih harus dilengkapi fasilitas pengolahan, pemasaran dan transportasi yang cukup memadai, diharapkan akan mampu mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang maju.

2) Akumulasi modal

Akumulasi modal atau pembentukan modal adalah peningkatan stok modal dalam jangka waktu tertentu. Pembentukan modal memiliki makna yang penting, yaitu masyarakat tidak melakukan kegiatannya pada saat ini hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak, tetapi juga untuk membuat barang modal, alat-alat perlengkapan, mesin, pabrik, sarana angkutan dan lainnya. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan output riil. Pertumbuhan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak merupakan permintaan yang efektif dan di lain pihak menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Investasi di bidang modal akan mengarahkan kepada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan mendorong kepada spesialisasi dan penghematan biaya dalam produksi skala besar.

Menurut Kuznets, rasio modal marginal (ICOR = incremental capital output ratio) memainkan pula peran penting dalam pertumbuhan ekonomi modern. ICOR menggambarkan produktivitas modal. Di negara-negara berkembang ICOR adalah rendah karena kurangnya modal dan rendahnya kapasitas produksi. Walaupun demikian, laju pertumbuhan modal dapat dipercepat dengan mendorong tabungan, untuk selanjutnya disalurkan kepada investasi.

3) Organisasi

Organisasi merupakan bagian penting dalam proses pertumbuhan. Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi. Organisasi bersifat melengkapi (komplemen) modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, para wirausahawan tampil sebagai organisator dan mengambil resiko dalam menghadapi ketidakpastian. Menurut Schumpeter, seorang wirausahawan tidak perlu seorang kapitalis, fungsi utamanya adalah melakukan pembaharuan (inovasi).

Di negara-negara berkembang jumlah wirausahawan sejati sangat langka, faktor seperti sempitnya pasar, kurang modal, kurang buruh terlatih dan terdidik, kurangnya infrastruktur dan sebagainya akan mempertinggi resiko ketidakpastian.

4) Kemajuan teknologi

Perubahan teknologi dianggap faktor paling penting dalam proses pertumbuhan ekonomi. Perubahan pada teknologi telah meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lain. Terdapat lima pola penting pertumbuhan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi modern, yaitu penemuan ilmiah atau penyempurnaan pengetahuan teknik, invensi, inovasi, penyempurnaan dan penyebarluasan penemuan yang biasanya diikuti dengan penyempurnaan (Kuznets). Schumpeter menganggap inovasi sebagai faktor teknologi yang paling penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuznets, inovasi terdiri dari dua macam, yaitu (1) penurunan biaya yang tidak menghasilkan perubahan apapun pada kualitas produk, dan (2) pembaharuan yang menciptakan permintaan baru akan produk tersebut. Negara berkembang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya ilmu pengetahan dalam bidang teknologi dari negara maju.

5) Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja menciptakan peningkatan produktivitas. Keduanya membawa ke arah ekonomi produksi skala besar, yang selanjutnya membantu perkembangan industri. Adam Smith menekankan pentingnya arti pembagian kerja (division of labor) bagi perkembangan ekonomi, pembagian kerja menciptakan perbaikan kemampuan produksi ekonomi, pembagian kerja menciptakan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap buruh menjadi lebihterampil dari pada sebelumnya, akan menghemat waktu, akan mampu menemukan mesin baru dan berbagai proses baru dalam berproduksi. Akhirnya, produksi meningkatkan produktivitas, pembagian kerja tegantung pada luas pasar. Sebaliknya luas pasar tergantung pada kemajuan ekonomi, yaitu berapa besar perkembangan permintaan, tingkat produksi pada umumnya, sarana transportasi dan lainnya. Jika skala produksi luas, spesialisasi dan pembagian kerja akan membagi luas pula, produksi meningkat, maka laju pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

1.5 Cara Mengukur Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu kegunaan penting dari pendapatan nasional adalah untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara dari tahun ke tahun, dengan mengamati pertumbuhan yang tercapai dari tahun ke tahun dapatlah dinilai prestasi dan kesuksesan negara tersebut dengan mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. Data pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pengeluaran akan dapat memberi gambaran tentang:

1) Sampai dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi atau sampai dimana baiknya tingkat pertumbuhan yang dicapai dan tingkat kemakmuran yang sedang dinikmati.
2) Memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam analisis makroekonomi.

Data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat dilakukan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan barang dan jasa yang diproduksi suatu negara.

Dengan demikian untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlulah dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Nasional Bruto riil atau Produk Domestik Bruto riil. Dalam perhitungan pendapatan nasional di beberapa negara telah dilakukan perhitungan pendapatan nasional dan komponen-komponennya menurut harga konstan, yaitu pada harga-harga barang yang berlaku di tahun dasar yang dipilih. Pertumbuhan PDB Harga Konstan Indonesia tahun 2013 naik dari tahu sebelumnya.

Menurut Mankiw (2012: 4), PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah belanja untuk membeli barang dan jasa dari hasil perekonomian. Alasan PDB dapat mengukur pendapatan total dan pengeluaran secara bersama adalah kedua hal ini pada dasarnya sama saja. Untuk suatu perekonomian secara keseluruhan, pendapatan total harus sama dengan pengeluaran total.

Untuk memahami bagaimana memanfaatkan sumber daya langka, para ekonomi sering tertarik untuk mempelajari komposisi PDB dari berbagai jenis pembelanjaan. Untuk melakukannya, PDB (yang dilambangkan dengan Y) dibagi menjadi empat komponen, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G) dan ekspor neto (NX): Y = C + I + G + NX. Menurut Tulus Tambunan (2014: 40), dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB, yang berarti peningkatan PN (pendapatan nasional). Ada dua arti dari PN, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, PN adalah PN. Sedangkan dalam arti luas, PN dapat merujuk ke PDB, atau merujuk ke produk nasional bruto (PNB), atau ke produk nasional netto (PNN). Sesuai metode yang standar, perhitungan PN diawali dengan perhitungan PDB. Hubungan antara PDB dan PN dapat dijelaskan melalui beberapa persamaan sederhana sebagai berikut:

PNB = PDB + F

PNN = PNB – D

PN = PNN – Ttl

Di mana:

F = pendapatan netto atau faktor luar negeri

D = penyusutan; dan

Ttl = pajak tak langsung netto

Jika persamaan diatas digabungkan, akan mendapatkan persamaan berikut:

PDB = PN + Ttl + D – F

Atau;

PN = PDB + F – D – Td

PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaranadalah penghitungan PDB dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output (NO) dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor. Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak berorientasi profit/nirlaba (C), pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok (I), pengeluaran konsumsi pemerintah
(G), ekspor (X) dan impor (M): PDB = C + I + G + X – M

1.6 Bahan Diskusi

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan dana yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Coba diskusikan mengapa dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi negara perlu utang terhadap negara lain, dengan bantuan organisasi ekonomi serta apa dampak positip dan negatif akibat utang luar negeri tersebut!

Jawaban Diskusi:

.....

.....

.....

1.7 Latihan Soal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, jelaskan dengan melengkapi teori menurut beberapa ahli ekonomi?

   Jawab:

   .....

   .....

2. Jelaskan hal yang menjadi tujuan utama ekonomi pembangunan ?

   Jawab:

   .....

   .....

3. Jelaskan manfaat pembangunan ekonomi bagi suatu negara adalah ?

   Jawab:

   .....

   .....

4. Sebutkan dan jelaskan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Negara sedang berkembang?

   Jawab:

   .....

   .....

5. Penduduk dapat menjadi factor pendorong dan penghambat terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, jelaskan mengapa demikian!

   Jawab:

   .....

   .....

BAB 2

Karakteristik Umum dan Struktur Kegiatan Ekonomi Negara Sedang Berkembang

Lingkup pembahasan dalam bab 2 ini secara menyeluruh di antaranya membahas tentang:

1. **Pendahuluan**
2. **Karakteristik Negara Sedang Berkembang**
3. **Indikator Pembangunan Ekonomipada Negara Berkembang**
4. **Struktur Kegiatan Ekonomi Negara Sedang Berkembang**
5. **Permasalahan Dasar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Negara Sedang Berkembang**
6. **Latihan Soal**

KAD 2 : mahasiswa dapat memahami tentang karakteristik negara sedang berkembang, indikator pembangunan ekonomi pada negara sedang berkembang, serta struktur kegiatan ekonomi negara sedang berkembang.

KAD 3 : mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dasar serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ekonomi negara sedang berkembang

---

2.1 Pendahuluan

Negara berkembang secara umum adalah negara-negara yang masih melakukan perombakan dan pembenahan pembangunan sebagai wujud menciptakan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyakat. Negara berkembang jauh lebih besar jumlahnya daripada negara maju, hal lantaran beberapa negara tidak mampu menghadapi tantangan

globalisasi yang mengakibatkan banyak negara hanya sebagai penikmat bukan sebagai pembuat teknologi, produk industri dan lain sebaginya. Oleh karena itulah dalam artikel ini akan menjabarkan tentang karakteristik negara berkembang yang menjadi tolak penilaian dalam mengkategorikan setiap negara-negara di dunia.

Pengertian negara berkembang adalah status negara yang masih dalam tahap pembangunan, baik pada sistem sosial ataupun pada keratifitas serta inovasi di dalam masyarakat. Negara berkembang banyak di miliki oleh benua di dunia, bahkan untuk jumlah negara berkembang sendiri pada saat ini di dominasi oleh Benua Afrika dan Benua Asia, salah satu contohnya adalah Indonesia.

Indonesia adalah salah satu contoh yang dapat di kategorikan sebagai negara berkembang, alasan ini diungkapkan karena sampai pada saat ini tantangan globalisasi di Indonesia menunjukan berbagai kegiatan masih bergantung pada sektor pertanian, selain itu kegiatan lain seperti militer atau perdangan masih tergantung dengan negara maju. Adapun mengenai Indonesia disebut sebagai negara berkembang, salah satu alasannya karena sebagian besar negara berkembang memiliki karakteristik tertentu.

2.2 Karakteristik Negara Sedang Berkembang

Setidaknya ada 5 kriteria yang dapat membendakan antara negara maju dan negara berkembang, antara lain;

1. **PNB per Kapita yang Rendah.**

   Negara-negara berkembang biasanya memiliki PNB per kapita yang rendah. Kalaupun negara berkembang memiliki banyak sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, mereka kekurangan peralatan, modal, dan pengetahuan untuk mengolahnya, kondisi seperti ini tentusaja mengakibatkan nilai output mereka tetap rendah jika dihubungkan dengan peduduk. Contohnya saja kondisi mengenai PNP rendah ini di alami oleh Indonesia, Indonesia banyak memiliki SDA dan SDM yang mumpuni, misalnya saja Sumber Daya Alam dari penghasilan Indonesia tergolong menjadi Negara Penghasil Emas terbesar di dunia, sedangkan SDM di Indonesia banyak yang berkerja di luar negri karena kamampuan intelektualnya yang tinggi. Akan tetapi karena ketidak adanya dukungan pralatan, modal, dan juga pengetehuan pengelolaannya yang efesien hal ini mengkibatkan rendahnya

penghasilan masyarakat di Indonesia dibadingkan dengan negara maju, seperti Singgapura, Amerika Serikat, dan negara lainnya.

2. Pertanian Agraris

Salah satu alasan mengenai PNP rendah yang dimiliki oleh negara berkembangkarena sebagian besar aktivitas ekonomi mereka berpusat pada pertanian. Masyarakat di Negara Berkembang mungkin tidak mengetahui metode-metode pertanian modern, seperti pupuk, peralatan, bibit, teknologi, dan lain-lain, sehingga mereka hanya mampu memproduksi hasit yang cukup untuk konsumsi sendiri. Artinya, pertanian angraris yang menggeunakan metode tradisional ini tidak ada hasilpanen yang tersedia untuk ekspor atau untuk menghidupi tenaga kerja industri sebegimana yang terjadi di Negara Maju. Contoh mengenai kondisi ini misalnya saja dalam Pertanian di Indonesia yang menjadi salah satu Negara Penghasil Jagung terbesar di dunia, dengan tidak adanya metode modern yang mendukung jumlah ladang atau lahan pertanian yang diggarap tidak seimbang dengan hasil yang di peroleh. Sehingga singkatnya Indonesia menjadi penghasil jagung bukan karenateknologinya akan tetapi karena lahan yang dimilikinya sangat luas.

3. Kondisi Kesehatan yang Memprihatinkan

Keadaan yang menjadi penilaian krteria antara negara berkembang dan negara maju. Adalah kurangnya persediaan makanan dan kelaparan menyebabkan terjadinya kekurangan gizi atau penyakit di negara berkembang. Masyarakat di Negara Berkembang juga kekurangan tenaga dokter dan rumah sakit yang modern.

Dokter yang tersedia juga sulit menjangkau seluruh pelosok daerah dan mungkin kekurangan obat serta peralatan. Hasilnya, angka kematian bayi meningkat dan usia kelangsungan hidup menjadi rendah, kondisi seperti ini juga terjadi di Indonesia yang menjadi contoh negara bekembang.

4. Tingkat Buta Huruf yang Masih Tinggi

Persentase penduduk yang bisa membaca dan menu[is masih rendah. ini dikarenakan pemerintah negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya untuk membangun sekolah. Sementara itu, anak-anak tidak dapat bersekolah karena harus

membantu orang tua mereka bekerja. Selain itu, kekurangan tenaga kerja terdidik mendatangkan kesulitan untuk melatih penduduk dalam menjalankan pekerjaan-pekerjaan berteknologi tinggi untuk keperluan pembangunan industri.

5. Tingginya Angka Pertumbuhan Penduduk.

Kondisi seperti ini merupakan sumber berbagai permasalahan di negara-negara berkembang, antara lain menimbulkan kekurangan pangan dan sarana yang menkibatkan tingginya tingkat kemsikinan di dalam masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dan tidak diimbangi dengan peluang pekerjaan mengakibatkan banyaknya masalah sosial yang akan terjadi.

Oleh karena itulah beberapa negara bekembang melakukan upaya penyelesaian masalah sosial ini dengan menekan laju pertumbuhan penduduk. Pengertian masalah sosial adalah kondisi yang tidak seimbang dari keinginan dan harapan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Contoh Negara Berkembang

Contoh selain Indonesia sebagai negara bekembang, ada hampir di berbagai wilayah belahan dunia, diantarnya adalah sebagai berikut;

1. Negara Mesir di Benua Afrika
2. Negara Brazil di Benua Amerika
3. Negara Fiji di Benua Australia
4. Negara Kroasia di Benua Eropa
5. Negara Mogolia di Benua Asia, khususnya berada di Asia Timur

2.3 Indikator Pembangunan Ekonomipada Negara Berkembang

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang dimaksud dengan pertumbuhan

ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan produk nasional bruto (PNB, GNP) riil di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya lebih bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik. Selanjutnya pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang. Di sini terdapat tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi.

- Pembangunan sebagai suatu proses

  Pembangunan sebagai suatu proses, artinya bahwa pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani olehsetiap masyarakat atau bangsa. Sebagai contoh, manusia mulai lahir, tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahapan-tahapan pertumbuhan. Demikian pula, setiap bangsa harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.
- Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita

  Sebagai suatu usaha, pembangunan merupakan tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan perkapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
- Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang

  Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikanterus menerus.

Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupunkekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

Negara yang maju adalah negara yang memperhatikan pembangunan ekonominya. Menyinggung pembangunan ekonomi, negara yang dalam kondisi baik pasti memiliki perkembangan pembangunan ekonomi yang baik pula. Pembangunan ekonomi bukan hanya merupakan hal yang berkaitan dengan maju atau berkembangnya suatu negara, namun dengan pembangunan ekonomi kita akan mengetahui bagaimana keadaan negara dengan sistem yang digunakan oleh pemerintah.

Pembangunan ekonomi sendiri berkaitan dengan rata tidaknya kesejahteraan masyarakat yang berada pada negara tersebut. Bukan itu saja dengan adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat menaikkan taraf kehidupan dalam suatu negara, diantaranya mulai dari pendapatan, pendidikan , teknologi, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita dapat mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dengan berkembangnya taraf hidup masyarakatnyadan berbagai hal yang disebutkan sebelumnya.

Dalam menentukan berhasil tidaknya suatu negara dalam pembangunan ekonomi maka kita memerlukan indicator. Indikator diperlukan sebagai acuan kita dalam menilai. Menilai dalam hal ini adalah menilai seberapa jauh suatu negara mencapai indikator yang telah ditetapkan. Indikator berfungsi sebagai penjelasan tentang pola, gejala, dan pengaruh yang sedang terjadi, berfungsi untuk menentukan hingga taraf mana negara dianggap berhasil, dimulai dari mengukur, menganalisis hingga mengevaluasi sebuah perencanaan sampai pelaksanaan agar terbentuk suatu kebijakan. Karena keberhasilan suatu negara dapat dilihat apabila suatu negara mencapai indicator atau tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Untuk menentukan indikator keberhasilan sebuah pembangunan, maka diperlukan ruang lingkup yang jelas. Indikator pembangunan ekonomi dapat dijabarkan dalam 11 poin sebagai berikut:

1. **Urbanisasi**

   Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Alasan urbanisasi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah sesuatu yang sederhana dapat disimpulkan. Apabila di perkotaan banyak penduduk desa yang banyak melakukan urbanisasi menandakan bahwa di perkotaan, segala sesuatunya menjamin kesejahteraan dan kemakmuran, biasanya konsep ekonomi yang diterpakan adalah konsep ekonomi makro. Seperti banyaknya kesempatankerja yang didukung dengan peralatan mesin-mesin canggih, dan kebutuhan akan pemesanan yang sangat banyak , menyebabkan perusahaan yang membutuhkanpekerja yang baru. Dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pekerja makasemakin dapat menurunkan angaka pengangguran sehingga menurunkan pula tingkat kemiskinan.

2. **Pendapatan Per kapita**

   Pendapatan per kapita berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka akan berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi. Alasan pendapatan per kapita sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pendapatan per kapita yang semakin naik disebabkanoleh stabilitas perekonomian yang bagus pula. Berarti itu menandakan kesejahteraanmasyarakat terjamin. Apabila dikaitkan dengan urbanisasi pada poin 1, maka dari perusahaan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, akan menarik banyak tenaga kerja yang bekerja di perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Sehingga, pemasukan perusahaan naik, dan dapat meningkatkan pendapatan dari perusahaan, yang selanjutnya berimbas kepada pekerjanya. Apabila pekerjamenaikkan kualitas kerjanya, akan menaikkan pula permintaan sehingga naik pula pendapatan per kapita.

3. **Struktur Ekonomi**

   Pembangunan ekonomi berkaitan dengan struktur ekonomi. Alasan strukturekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan berkembangnya pembangunan ekonomi maka akan berkembang pula struktur ekonomi. Struktur disini diartikan sebagai suatu pola perubahan yang menuju ke peningkatan. Contohnya dahulu kita berada pada sector pertanian, kemudian seiring dengan bertumbuhnya ekonomi sektor pertanian digantikan

dengan sector industry. Maka struktur ekonomi akan berubah seiring dengan bertumbuhnya ekonomi.

4. **Angka Tabungan**

   Angka tabungan ini berhubungan dengan strktur ekonomi. Alasan angka tabungan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah bermual adari perubahan struktur ekonomi. Perubahan yang dimaksud adalah ketika sector pertanian beralih ke sector perindustrian maka tingkat produktifitas akan meningkat dan output yang dihasilkan juga akan naik, maka tabungan adalah modal dalam sebuah perekonomian, semakin banyak angka tabungan yang dimilki dalam perubahan struktur ekonomi maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian semakin berkembang.

5. **Indeks Kualitas Hidup**

   Secara umum kita mengetahui bahwa indeks kualitas hidup dibagi menjadi tiga bagian, yaitu angka rata-rata harapan hidup. Angka kematian bayi dan angka melek huruf. Alasan indeks kualitas hidup sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah semakin baik indeks kualitas hidup maka semakin bagus pembanguanan ekonomi yang dilkasanakan. Pertama dari angka rata-rata harapan hidup, apabila negara dalam keadaaan pembanguan ekonomi yang baik maka angka rata-rata harapan hidup semakin meningkat dilihat dari pemenuhan kebutuhan makanan kepada masyarakat merata, karena mereka dapat memnuhi kebutuhan hidup mereka sendiri sehingga tidak ada kata tentang kekurangan makanan., selain itu apabila sakit mereka terjangkau dalam pemenuhan kebutuhan obat-obatan ataupun akses kesehatan. Kedua adalah angka kematian bayi, pembnagunna ekonomi yang baik adalah ketika angka kematian bayi menurun. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya gizi, nutrisi, serta pelayanan kesehatan yang memadai mulai ibu hamil hingga bayi yang dilahirkan. Dan yang ketiga adalah semakin baik suatu pembangunan ekonomi adalah ketika angka melek huruf semakin meningkat karena itu menandakan fasilitas untuk memefasilitasi wargayang melek huruf semakin banyak dan memudahkan merak untuk melakukan komunikasi yang baik dengan adanya melek huruf terseut, sehingga masyarakat dapat memahami perkembangan dari suatu negara.

6. **Indeks Pembangunan Nasional**

   Alasan Indeks Pembangunan Nasional sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah indeks inilah yang nantinya akan membandingkan indeks kualiitas hidup dari suatu negara. Dari adanya indeks pembangunan nasional ini kita nanti akan mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi kita berada dimana. Nantinya dari indeks pembangunan nasional ini dapat menjadi tolak ukur sudah sampai mana negara kita sekarang.

7. **Pendidikan**

   Pendidikan merupakan salah satu indicator pembangunan ekonomi karena kita bisa melihat suatu negara memilki pembangunanan ekonomi yang maju apabila tingkat pendidikan tinggi, yang dimaksud adalah dilihat dari angka melek huruf masyarakat disuatu negara, semakin banyak orang yang melek huruf dalam suatu negara menandakan bahwa pembangunan ekonominya bagus. Bukan hanya dilihat dariangka melek hurufnya saja namun juga dari tingkat partisipasi masyarakat akan pentingnya pendidikan.

8. **Kesehatan**

   Kesehatan juga turut berpengaruh, semakin lengkap fasilitas kesehatan yang ada, semakin mudah akses kesahtan yang ada akan mengakibatkan angka harapan hidup yang tinggi termasuk pelayanan KB (keluarga berencana), sehingga kesehatan menjadi alasan dijadikan indicator keberhasilan.

9. **Tempat tinggal**

   Indikator selanjutnya adalah temapat tinggal, temapat tingal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang mendapat fasilitas air , sarana sanitasi dan listrik yang memadai, dan memiliki kualitas tempat tinggal yang layak huni, yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

10. **Kriminalitas**

    Apabila suatu negara memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi, maka berkuranglah tingkat kriminalitas, karena masyarakat sudah meampu memenuhikebutuhan mereka sendiri.

11. **Akses Media**

    Yang terakhir adalah akses media yang sampai menuju tempat yang tak terjangkau menandakan bahwa tingkat pembangunan ekonomi yang baik.

Itulah beberapa indikator yang menjadi ukuran atau standart suatu pembangunan ekonomi sedang berlangsung. Semua indikator terpadu dalam sebuah siklus dimana semua saling mempengaruhi.

2.4 Struktur Kegiatan Ekonomi Negara Sedang Berkembang

Pengelompokkan Negara Berdasarkan Tingkat Kemajuannya dapat dilihat dari sudut perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat negara-negara di dunia dibedakan dalam dua golongan : Pertama, negara-negara yang sudah maju yaitu negara-negara yang terdapat di Eropa Barat dan Amerika Utara, negara-negara Australia dan New Zealand. Negara-negara ini sering disebut negara dunia kesatu (first world) yaitu negara-negara kapitalis atau negara-negara pertama yang ditopang pengalaman jangka panjang dalam pertumbuhan ekonomi. Kedua, negara dunia kedua yaitu negara-negara maju yang ada di Eropa Timur seperti Rusia , Polandia, Dan Chekoslovakia. Negara- negara ini sering dijuluki negara kedua yaitu negara sosialis yang sudah maju ekonominya. Ada juga, negara maju Baru, seperti Korea Selatan dan Jepang. Ketiga, negara-negara yang sedang berkembang atau disebut juga negara ketiga , yaitu negara- negara yang mempunyai tingkat pembangunan yang rendah dan tingkat pendapatan per kapita tidak lebih dari US $200.

Karakteristik Umum Negara-Negara sedang Berkembang Berbagai variasi dalam tingkat serta komposisi hasil perkapita diantara berbagai negara merupakan manifestasi dari kemiskinan dan kekayaannya. G.M Meiyer dan R.E Baldwin, dalam bukunya *"Economic Development Theory, History and Policy"* mengemukakan sifat ekonomis yang terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara yang sedang berkembang, yaitu :

1. *it is primary-producing*
2. *it faces population pressures*
3. *it has underdeveloped natural resources*
4. *it has economically backward population* (Baldwin, 1957:173)

Negara-negara berkembang pada umumnya mempunyai susunan atau struktur produksi yang terdiri dari bahan dasar dan bahan makanan .Sebagian penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Tingkat penduduk di negara-negara sedang berkembang

relatif tinggi, tetapi secara ekonomi penduduk di negara berkembang relatif masih terbelakang. Artinya kualitas penduduknya sebagai faktor tenaga kerja adalah rendah. Karena kualitas penduduknya rendah maka sumber-sumber alam ini belum dapat dijadikan sumber-sumber yang riil, karena kekurangan capital tenaga ahli.

Kekurangan tenaga ahli karena negara-negara berkembang terjerat dalam lingkungan yang tak berujung pangkal. Kekurangan capital tenaga ahli sehingga mempengaruhi investasi rendah. Tingkat kehidupan yang rendah di negara-negara yang sedang berkembang dimanfestasikan secara kuantitatif dalam bentuk pendapatan yang rendah (kemiskinan, kemelaratan), fasilitas perumahan yang tidak memadai, pendidikan terbatas, tingkat kematian yang tinggi, umur pendek, harapan kosong pada umumnya perasaan kacau dan putus asa. Akibat keterbatasan di atas, negara-negara berkembang mempunyai sumber alam yang belum diperkembangan dan sumber daya manusia yang masih potensial.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas maka tabungan dalam negeri dan bantuan luar negeri perlu dimobilisasi untuk mempercepat investasi baru dalam barang modal fisik dan pengembangan sumber daya manusia, misalnya keterampilan manajerial melalui investasi di bidang pendidikan dan pelatihan. Tingkat pendudukyang tinggi dan angka beban tanggungan yang tinggi. Hal ini mempengaruhi luas tenagakerja yang diserap dari lapangan kerja yang ada. Tenaga kerja semakin lama semakin banyak sedangkan lapangan kerja semakin lama semakin terbatas pada bidang tertentu, akibatnya penggunaan tenaga kerja kurang efektif dan efisien dan melahirkan dua bentuk pengangguran , yaitu :

1. Pengangguran Semu,

   yaitu orang-orang pedesaan dan perkotaan bekerja kurang dari semestinya (harian, mingguan, atau musiman), bekerja full time tetapi produktivitas rendah.

2. Pengangguran Terbuka

   Yaitu orang-orang yang sebenarnya ingin dan suka bekerja tetapi tidak tersedia pekerjaan.

2.5 Permasalahan Dasar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan Ekonomi Negara Sedang Berkembang

Semua negara yang ada di dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang tentu ingin melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan pendapatan riil per kapita atau paling tidak mempertahankan tingkat pendapatan yang telah dicapai. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju.

Namun kenyataannya, negara-negara sedang berkembang taraf hidupnya masih ketinggalan jauh, apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Ada tiga permasalahan dasar/pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Tiga permasalahan dasar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah: 1. berkembangnya ketidakmerataan pendapatan; 2. kemiskinan; 3. gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Titik perhatian utama permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Beberapa faktor yangmenyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman Cynthia Taft Morris (1993) adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar-daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal *(capital intensive)* sehingga persentase pendapatan dari modal lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah tangga.

Negara sedang berkembang, distribusi pendapatannya kurang merata dibandingkan di negara-negara maju. Semakin maju suatu negara maka distribusi pendapatannya akan semakin merata. Salah satu ukuran dari distribusi pendapatan dapat dilihat dari kurva Lorenz. Di samping kurva Lorenz, koefisien Gini sering dipakai untuk mengukur merata tidaknya distribusi pendapatan di suatu daerah/negara.

Permasalahan dasar yang kedua adalah kemiskinan. Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali dibicarakan. Perhatian tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990), di media massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Andre Bayo Ala, 1981, kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut, termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, kemiskinan ini dapat ditimbulkan oleh dua hal, yaitu:

1. Kemiskinan yang bersifat alamiah atau kultural, dan

2. Kemiskinan yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan, 1980). Sedangkan kemiskinan alamiah atau kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan karena suatu negara tersebut memang miskin. Jadi suatu negara itu secara alamiah memang sudah miskin. Penyebab kemiskinan yang bersifat alamiah ini biasanya disebut dengan lingkaran setan yang tidak berwujud pangkal atau lingkaran perangkap kemiskinan *(the vicious circles)*.

Yang dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan *(the vicious circles)* adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Dalam mengemukakan teorinya tentang perangkap kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, yang dapat menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal tersebut, Nurkse mengatakan bahwa "suatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin *(A Country is poor because it is poor)*. Menurut Nurkse, lingkaran perangkap kemiskinan merupakan penyebab timbulnya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan dilain pihak oleh perangsang untuk menanamkan modal. Untuk negara sedang berkembang, keadaan kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara sedang berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu

1. dari segi penawaran modal,
2. dari segi permintaan modal.

Dilihat dari segi penawaran modal, lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut: “tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan menabung yang rendah akan menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, sehingga akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan modal dan dengan demikian produktivitasnya akan rendah”. Sedangkan dilihat dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda.

Dari segi permintaan modal, lingkaran perangkap kemiskinan dinyatakan sebagai berikut: “di negara miskin perangsang untuk melaksanakan penawaran modal adalah rendah, hal ini disebabkan karena luasnya pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Terbatasnya luas pasar disebabkan karena pendapatan masyarakat rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan karena produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena modal yang terbatas pada masa lalu, pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal”.

Di bagian lain Nurkse mengatakan, bahwa peningkatan pembentukan modal bukan hanya ditentukan oleh lingkaran perangkap kemiskinan, tetapi juga disebabkan oleh *International Demonstration Effect.* I*nternational demonstration effect* merupakan kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang sudah maju. Negara maju adalah suatu negara dimana masyarakatnya biasa hidup di lingkungan industri, sehingga pola konsumsinya terdiri dari barang-barang industri. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi, memungkinkan penduduk negara sedang berkembang untuk mengimpor dan mengonsumsi barang-barang industri,yang mutu dan harganya jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara sedang berkembang.

Dengan demikian, akan menyebabkan pengeluaran penduduk negara sedang berkembang meningkat. Bertambahnya pengeluaran konsumsi tersebut, akanmengurangi jumlah tabungan yang dikerahkan negara sedang berkembang untuk membiayai pembentukan modal yang akan mempertinggi kemampuan mereka menghasilkan produksi nasional. Apabila ini berlaku maka *international demonstration*

effect akan memperburuk lagi keadaan lingkaran perangkap kemiskinan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang.

Di samping kedua lingkaran perangkap kemiskinan di atas, Meier dan Baldwin, mengemukakan pula suatu perangkap kemiskinan yang lain. Perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi di antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi.

Di negara-negara sedang berkembang kekayaan alam belumlah sepenuhnya dikembangkan dan diusahakan, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, kurangnya tenaga-tenaga ahli yang diperlukan dan karena terbatasnya mobilitas dari sumber-sumber daya. Kenyataan ini di berbagai negara menunjukkan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial ekonomi suatu negara, makin lebih terbatas jumlah sumber-sumber daya, kekayaan alam yang dimiliki belum sepenuhnya dikembangkan, dan tingkat pembangunan masyarakat tersebut adalah rendah.

Apabila dirangkum, analisis mengenai penghambat pembangunan ekonomi yang diuraikan di atas, maka pada hakikatnya teori perangkap kemiskinan berpendapat bahwa keterlambatan pembangunan ekonomi disebabkan karena:

1. Ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup.
2. Kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal.
3. Taraf pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat relatif rendah.

Permasalahan dasar yang ketiga adalah adanya jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang, di mana sering dikatakan bahwa negara kaya akan semakin kaya dan negara miskin akan semakin miskin karena semakin banyak jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup agar dapat setara dengan tingkat hidup negara-negara maju. Sebab jika tidak melaksanakan pembangunan antara negara kaya dengan negara miskin semakin jauh. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian dikatakan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin

miskin, karena di negara sedang berkembang angka beban tanggungannya semakin besar.

Hal tersebut terjadi karena di negara sedang berkembang memiliki beberapa karakteristik yang kurang mendukung untuk maju, antara lain: pendapatan riil perkapita rendah, makan, pakaian, perumahan kurang memenuhi syarat kesehatan, struktur masyarakat yang statis, masih adanya sikap hidup yang primitif, penduduknya tidak kreatif, sektor pertanian kurang produktif, padahal sektor pertanian ini merupakan mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar penduduk. Beberapa karakteristik inilah yang menyebabkan negara sedang berkembang tidak mudah melaksanakan pembangunan ekonomi. Sampai saat ini negara sedang berkembang tetap miskin, sehingga jurang antara negara sedang berkembang dengan negara maju semakin lebar.

Di samping beberapa karakteristik yang dimiliki negara sedang berkembang tersebut, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang antara lain adalah:

1. Dualisme Ekonomi

Berlakunya dualisme ekonomi di negara sedang berkembang merupakan salah satu faktor terlambatnya pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Dualisme ekonomi merupakan dua sistem ekonomi yang berbeda yaitu satu sistem ekonomi yang sudah modem dan sistem ekonomi yang masih tradisional, yang hidup bersama berdampingan dalam satu wilayah atau negara tertentu. Hampir semua negara sedang berkembang menghadapi dualisme ekonomi, yaitu di daerah perkotaan perekonomiannya sudah maju, serba modem dan uang sebagai alat pertukarannya, sedangkan di sisi lain daerah pedesaan perekonomiannya masih tradisional (*subsistence*), dan biasanya pertukaran masih dilakukan dengan sistem barter. Masih adanya beberapa daerah terpencil yang hingga sekarang belum pernah mengadakan kontak dengan dunia luar, artinya belum mengadakan pertukaran dengan daerah luar. Sedangkan di daerah yang potensial tambang/perkebunan, terkadang sudah terdapat "daerah kantong bagi industri asing" *(foreign enclave industry)* yang menciptakan triplisme di daerah pedesaan, sebab perekonomian daerah kantong asing justru sudah pada tingkat ekonomi kapitalis tinggi. Aspek penting dalam dualisme ekonomi itu:

a. Perekonomian Pasar *(The Market Economy)*

Sistem perekonomian pasar pada umumnya berada di daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini biasanya merupakan sentral pemerintahan, sehingga banyak gedung-gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Sedangkan yang tinggal di kota-kota pun biasanya mereka yang tergolong pada *"White Collar Workers"* yaitu para pekerja kantor yang terdiri dari pegawai negeri, guru, dokter, selain itu juga para pedagang. Sehingga meskipun pekerjaan mereka masih sederhana, tetapi sudah cenderung melakukan spesialisasi kerja. Tingkat upah di daerah ini cenderung lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, karena biasanya terdiri dari para pekerja yang sudah terdidik. Dalam sistem tersebut sudah menggunakan uang sebagai alat tukar menukar.

b. Perekonomian Subsisten

Aspek kedua dari dualisme adalah perekonomian *Subsistence*. Dalam sistem perekonomian ini masih ada beberapa daerah yang terpencil yang belum sempat berkomunikasi dengan pihak luar. Sistem tukar menukar/ transaksi dilakukan dengan sistem "barter" yaitu barang ditukar dengan barang. Dalam kondisi normal, perekonomian subsisten bertindak memenuhi kebutuhannya sendiri *(selfsufficient)*, dalam arti mereka melakukan kegiatan produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk mengatasi masyarakat terasing dan statis ini, fasilitas perhubungan yang menuju ke arah tempat tersebut perlu ditingkatkan.

c. Daerah Kantong Asing *(be Foreign Enclaves)*

Aspek ketiga dari dualisme ekonomi adalah adanya daerah kantong asing, yaitu daerah-daerah yang masih terbelakang, tetapi sudah terdapat industri-industri dengan teknologi tinggi *capital intensive* yang tinggi. Misalnya di Venezuela, Libia dan Indonesia (Pekan Baru, Dumai) dan lain-lainnya. Sistem ekonomi di daerah kantong asing ini mirip dengan ekonomi kolonial, artinya apa yang mereka hasilkan cenderung untuk diekspor, sedangkan hubungan dengan dalam negeri hanya sebatas dalam bentuk membayar upah-upah buruh. Daerah kantong asing (*Foreign enclaves)* ini mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yaitu dapat mendidik orang-orang setempat untuk lebih maju.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara-negara sedang berkembang banyak mempunyai ekonomi rangkap tiga atau *"Triple Economics"*, yaitu: perekonomian subsisten di pedesaan, perekonomian pasar di perkotaan dan daerah kantong asing di sekitar kota terpisah.

2. Iklim Tropis

Pada umumnya daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis, bahkan banyak teori mengatakan bahwa rendahnya produktivitas, karena adanya iklim tropis. Mengapa bisa demikian? Karena:

a. Kurangnya usaha manusia.

Kurangnya usaha manusia ini disebabkan karena dalam iklim tropis pada umumnya panas dan lembab, kondisi ini menyebabkan manusia cepat lelah.Selain itu karena di daerah tropis berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik sekalipun pemeliharaannya kurang begitu baik. Bahkan dapat diibaratkan bagaikan "tongkat kayu dan batu jadi tanaman". Akibatnya manusia tidak pernah tertantang oleh keadaan maka menjadikan mereka cenderung pasif, bahkan lebih pasrah dan nerimo (dalam bahasa Jawa). Pada umumnya seseorang akan berusahakeras dan kreatif kalau sudah terjerumus pada berbagai kesulitan. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di daerah yang beriklim dingin, mereka selalu kreatif, berusaha menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk persediaan nantidi musim sukar (dingin).

b. Banyak penyakit

Di daerah tropis berbagai tanaman bisa hidup dengan baik, namun berbagai jenis penyakit pun juga dapat hidup dan berkembang dengan baik pula.

c. Keadaan pertanian tidak menguntungkan

Di satu sisi iklim tropis menyuburkan tanah, tetapi di sisi lain hujan yang berlebihan dapat melarutkan unsur hara tanah, karena erosi, sehingga tanah menjadi miskin (tandus). Selain itu juga dapat menyebabkan gagalnya panen (untuk daerah tertentu), karena terlanda banjir sampai beberapa hari/minggu dan banyaknya jenis hama/penyakit tanaman, misalnya: hama wereng yang sangat menakutkan bagi para petani Indonesia.

3. Kebudayaan Tidak Ekonomis

Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikan tingkat hidupnya karena sering bertentangan dengan eksistensi kebudayaan/tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat, tradisi itu antara lain:

a. kesulitan-kesulitan filosofis dan agama, misalnya adanya takhayul, kepercayaan secara ekonomis cenderung boros. Karena setiap kegiatan diperlukan selamatan yang terkadang secara besar-besaran; seperti upacara tradisi, pesta perkawinan dan lain-lainnya;
b. status sosial penduduk, misalnya orang yang bertitel lebih terhormat dalam masyarakat daripada yang tidak bertitel, meski prestasinya rendah. Sebaliknya orang-orang yang berprestasi di kancah industri/perdagangan belum tentumendapat status yang terhormat maka ada semacam kecenderungan lebih baik menjadi "priyayi" saja, agar terhormat;
c. Tidak adanya mobilitas dalam kesempatan kerja. Hal ini karena adanya sistem kasta, agama, suku bangsa, jenis kelamin.
d. peranan keluarga. Bila seorang laki-laki telah berkeluarga, maka biasanya istri akan dibawa dan hidup bersama dengan orang tua suami. Akibatnya penghasilan suami akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga tersebut sehinggamereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk berkembang karena beban tanggungannya yang cukup banyak;
e. cengkeraman kebiasaan. Hampir semua kegiatan berdasarkan turun temurun, seolah-olah mereka terkungkung oleh tradisi yang sudah mengental dalam masyarakat dan sulit diadakan perubahan, karena dianggap sebagai penyebab malapetaka (misalnya bila ada wabah penyakit);
f. penggunaan uang *terbatas.* Dengan penggunaan uang yang terbatas ini menyebabkan orang tidak antusias untuk bekerja keras, karena jumlah dan macam konsumsi yang diperlukan terbatas. Berbeda dengan di negara-negara maju setup kegiatan bersifat profit *motive* atau *commercial oriented*. Karena dengan banyak uang mereka akan lebih terhormat dan akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan secara variatif.

4. Produktivitas Rendah

Pada umumnya produktivitas yang rendah disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam negara yang bersangkutan, seperti kandungan mineral, air hujan, hutan dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya yang lebih urgen adalah kualitas tenaga kerjanya. Sebab kondisi alam yang kurang mendukung dapat diatasi dengan teknologi, jika kualitas angkatan kerjanya terdidik, kreatif, inovatif dan terampil, sehingga mampu membuat formulasi atau modifikasi teknik berproduksi, dari tanah kurang subur menjadi tanah yang cukup subur, dari kurang produktif menjadi lebih produktif.

5. Jumlah Kapital Sedikit

Di negara sedang berkembang kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerjanya rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena rendahnya dana kapital yang tersedia dan belum diolahnya sumber-sumber alam serta keterbelakangan penduduknya. Ketiga hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi baik dalam bidang *human investment* maupun *capital investment.* Kemudian rendahnya investasi disebabkan oleh lemahnya 2 kekuatan, yaitu rendahnya permintaan akan barang-barang maupun rendahnya tingkat tabungan. Sedangkan dua faktor yang terakhir ini lemah disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Keadaan ini sering disebut dengan "lingkaran setan" *(vicious circle)*.

6.* Ketidaksempurnaan Pasar *(market imprefektion)

Ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyangkut immobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luwes, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah dan kurang adanya spesialisasi. Hal ini akan merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor

produksi yang optimal, sehingga banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik.

7. Tingginya Tingkat Pengangguran

Masalah pengangguran bukan hanya masalah negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Demikian pula masalah *underemployment dan disguised unemployment* kini tidak lagi monopoli di daerah pedesaan, melainkan sekarang sudah meluas ke perkotaan dalam bentuk *open employment* atau pengangguran terbuka. Adapun sebab-sebab pengangguran di kota antara lain: banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tidak mampu menampung tenaga, karena kekurangan faktor produksi terutama kapital. Perpindahan tenaga kerja tersebut berhubungan dengan *push factors dan full factors* (kekuatan yangmendorong dan menarik) perpindahan dari desa ke kota. *Push factors* itu meliputi:

a. terbatasnya kesempatan kerja di desa.

b. keinginan untuk pindah didukung sarana transportasi dan pendidikan yang lebih baik. Sedangkan *full factors* meliputi: perkembangan industri di kota-kota yang menawarkan upah jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

8. Tekanan Penduduk

Masalah kelebihan penduduk *(over population)* juga menjadi perintang perkembangan ekonomi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, karena kecepatan produksi belum dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Padahal pertumbuhan penduduk yang cepat akan menuntut pertumbuhan produksi bahan makanan, sehingga usaha produksi lainnya tertunda. Karena memang ekonomi negara-negara sedang berkembang itu terdapat lingkaran setan *(vicious circle)*, yang bermula dari pertumbuhan penduduk yang cepat, maka produksi bahan makanan harus ditingkatkan dan ini akan menghisap kelebihan daya beli yang sebenarya untukmembeli barang-barang pabrik. Sehingga daya beli *output* pabrik menurun karena untuk membeli bahan makanan. Di sisi lain, kelebihan penduduk perlu ekspansi industri agar tercipta kesempatan kerja. Akibatnya akan menyedot dana tabungan yang semestinya bisa untuk investasi produksi di sektor lain, maka perkembangan ekonomi tertunda, oleh karena itu, *over* penduduk dapat diatasi dengan imigrasi,

transmigrasi dan mengubah pola hidup serta dilaksanakannya program *family planning*.

9. Tanah dan Penggunaannya Kurang Efisien

Tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi bagi negara-negara terbelakang (berkembang). Sebagian besar (60-70%) penduduk negara sedang berkembang mata pencahariannya dari sektor pertanian,namun dilihat dari produktivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor yang berkaitan dengan kondisi negara terbelakang,misalnya terbatasnya kapital, alat-alat masih sederhana, teknik produksi yang tidak efisien, permilikan tanah yang sempit. Oleh karena keadaan tersebut, maka para tuan tanah akan mempunyai basil lebih rendah dibandingkan di negara-negara maju meskipun kondisi alamnya kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan di negara maju faktor produksi yang dimiliki sudah maju, maka hasilnya lebih tinggi di negara-negara maju. Selain faktor tersebut di atas, rendahnya produktivitas di negara sedang berkembang juga disebabkan karena sistem "sewa tanah secara tradisional" yaitu penyewa tanah tidak punya dorongan untuk menjaga kesuburan tanah, meskipun mereka tahu, karena hanya akan menguntungkan tuan tanah. Demikian juga sistem *"Shifting Cultivation"* (perladangan berpindah-pindah) yang banyak mengakibatkan erosi tanah. Demikian juga karena satu orang memiliki tanah yang terlalu luas menyebabkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, perlu kiranya *"land reform"* benar- benar dilaksanakan sampai ke bawah.

10. Rendahnya Tingkat Tabungan

Terbatasnya tabungan dalam negeri merupakan perintang utama bagi perkembangan perekonomian dengan cepat. Perbaikan taraf hidup secara terus-menerus dalam jangka panjang hanya dapat dijamin dengan ekspansi kapasitas produksi yang sebagian besar tergantung pada luasnya pembentukan modal ditopang bantuan luar negeri.

Namun demikian betapa pentingnya bantuan luar negeri, perkembanganekonomi yang sehat dan stabil tidak dapat didasarkan semata-mata pada kapital dari luarnegeri. Pendek kata pembangunan ekonomi sebaiknya didasarkan pada sumber-sumber

ekonomi yang terdapat dalam perekonomian sendiri, sedangkan modal asing hendaknya hanya sebagai suplemen saja. Untuk itu tabungan di negara sedang berkembang sebaiknya ditingkatkan. Usaha yang pokok yang bisa dilakukan ialah mengembangkan tabungan dalam negeri baik tabungan swasta maupun tabungan pemerintah. Pendapatan dari pajak untuk investasi sebagai tabungan paksaan, dapat pula digunakan atau penghasilan pajak dapat dipinjamkan pada sektor swasta untuk investasi.

Pada umumnya tabungan di negara sedang berkembang relatif rendah, karena rendahnya tingkat pendapatan den ini karena rendahnya produktivitas penduduk. Selain itu secara psikologis penduduk tidak mau menabung karena sering terjadi inflasi den devaluasi serta kekurangan lembaga-lembaga yang dapat menampung simpanan/tabungan.

Menurut Lewis, tabungan sukarela akan tumbuh, apabila ketidakmerataan pembagian pendapatan disebabkan terutama oleh tingkat keuntungan wiraswasta yang tinggi. Sebaliknya, disebabkan oleh adanya pendapatan tuan tanah yang tinggi maka tabungan tak akan terdorong, karena biasanya tuan tanah tidak kreatif seperti wiraswasta dalam hal investasi.

Oleh karena itu, berhubung tabungan dalam negeri kurang, maka negara sedang berkembang harus dapat memberi daya tarik bagi investasi asing agar mau menginvestasikan modalnya di dalam negeri untuk perkembangan perekonomian. Kemudian untuk penyalurannya ke investasi produktif dapat melalui perbankan, yang kemudian pihak bank menyalurkannya kepada para petani den pedagang kecil, tetapi tetap harus diawasi agar ekspansi kredit inflator *(inflationary credit expantion)* tidak terjadi. Untuk itu sistem perbankan harus diperbaiki.

Selain itu, kapital dapat dibentuk melalui pajak, karena dengan menaikkan tarif pajak akan dapat menarik dana dari konsumsi dipindahkan ke sektor investasi yang produktif. Inflasi juga merupakan cara yang baik sebagai alat pembelanjaan pembangunan, yaitu dengan cara mengurangi konsumsi dengan menaikkan harga-harga. Dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan inflasi dengan menambah jumlah uang yang beredar. Cara ini cukup baik pada tahap awal karena akan mendorong pengusaha bekerja lebih giat menaikkan pendapatannya. Akan tetapi jika jangka panjang akan membawa penderitaan terutama bagi yang pendapatannya tetap. Lebih-lebih jika sampai terjadi *hyperinflation.* Oleh karena itu, bagaimanapun pembentukan kapital melalui

inflasi tetap merupakan pembentukan kapital yang salah arah *(misdirectionof capital formation).*

2.6 Latihan Soal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan tentang elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi!
   Jawab:

   .....

   .....

2. Jelaskan karakteristik Negara Sedang Berkembang!

   Jawab:

   .....

   .....

3. Jelaskan indikator Pembangunan Ekonomi pada Negara Berkembang

   Jawab:

   .....

   .....

4. Jelaskan struktur kegiatan ekonomi Negara Sedang Berkembang

   Jawab:

   .....

   .....

5. Jelaskan permasalahan dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ekonomi Negara Sedang Berkembang

   Jawab:

   .....

   .....

BAB 3

Teori Pembangunan Ekonomi dan Model Pertumbuhan

Lingkup pembahasan dalam bab 3 ini secara menyeluruh di antaranya membahas tentang:

1. **Pendahuluan**
2. **Teori pertumbuhan ekonomi linear**
3. **Teori transformasi struktural dan model perubahan structural**
4. **Teori ketergantungan internasional**
5. **Model Pertumbuhan Neo Klasik**
6. **Latihan Soal**

KAD 4 : mahasiswa dapat menganalisis tentang teori-teori pembangunan ekonomi serta model pertumbuhan

---

3.1 Pendahuluan

Untuk mengelompokkan teori-teori pertumbuhan dan pembangunan ekonomi secara tepat dan sederhana bukanlahpekerjaan yang mudah. Banyakhalyangharus dipertimbangkan misalnya "periode waktu" lahirnya teori tersebut atau "ide" dari teori tersebut. Namun demikian, setelah memperhatikan beberapa kepustakaan yang membahas tentang teori pembangunan, akhirnya dibuat klasifikasi seperti yang dibahas dalarn bab ini. Tentunya tidak semua teori yang ada akan dibahas di sini. Berikut pembahasanteoripertumbuhan dengan beberapa kategori.

3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Linear

Dalam pertumbuhan linear melihat bahwa pembangunan ekonomi berdasarkan suatu pola pendekatan yang berpangkal pada perspektif sejarah. Dalam perspektif kelompok ini, fenomena ekonomi adalah produk perkembangan menyeluruh dan dalam tahap tertentu dalam perjalanan sejarah.. Berikut tokoh-tokoh yangpemikirannya masuk dalamkategoripertumbuhanekonomi linear.

A. FRIEDRICHLIST

List dipandang sebagai pelopor yang meletakkan landasan bagi pertumbuhan pemikiran ekonomi mazhab Historismus ini. Menurut List, sistem liberalisme yang laissez-faire dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah, organisasi swasta danlingkungankebudayaan. Perkembangan ekonomihanya akan terjadi, jika dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik dan kebebasan perorangan. Perkembangan ekonomi, menurut List, melalui 5 tahap yaitu tahap primitif, beternak, pertanian, pertanian dan industri pengolahan (manufacturing), dan akhirnya pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Pendekatan List dalam menentukan tahap-tahap perkembangan ekonomi tersebut berdasarkanpada"caraproduksi" nya.

Selain itu, List juga berpendapat bahwa daerah-daerah beriklim sedang paling cocok untuk pengembangan industri, karena adanya kepadatan penduduk yang sedang yang merupakan pasar yang cukup memadai. Sedangkan daerah tropis kurang cocok untuk industri karena pada umumnya daerah tersebut berpenduduk sangat padatdan pertanian masihkurangefisien.

B. BRUNO HILDEBRAND

Pemikiran Hildebrand selalu menekankan evolusi dalam perekonomian masyarakat. Sebagai kritiknya terhadap List, Hildebrandmengatakan bahwaperkembangan ekonomi bukandidasarkan pada "cara produksi" ataupun "cara konsumsi", tetapi pada "cara distribusi" yang digunakan. Oleh karena itu ia mengemukakan 3 sistem distribusi yaitu:

1. Perekonomian Barter (natura)
2. Perekonomian Uang
3. Perekonomian Kredit

Sayangnya, Hildebrand tidak menjelaskan proses perkembangan dari tahap tertentu ke tahap berikutnya. Selain itu, Hildebrand juga ternyata tidak memberi sumbangan yang berarti terhadap peralatan analitis di bidang ilmu ekonomi.

C. KARL BUCHER

Pendapat Bucher merupakan sintesa dari pendapat List dan Hildebrand. Menurut Bucher, perkembanganekonomimelalui 3 tahap yaitu:

1. Produksi untuk kebutuhan sendiri (subsistem)
2. Perekonomian kota di mana pertukaran sudah meluas .
3. Perekonomian nasional di mana peranpedagangmenjadisemakin penting.

D. W.W.ROSTOW

Teori pembangunan ekonomi dari Rostow ini sangat populer dan paling banyak mendapatkan komentar dari para ahli. Teori ini pada mulanya merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam Economics Journal (Maret 1956) dan kemudian dikembangkannya lebih lanjut dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth (1960). Menurut pengklasifikasian Todaro, teori Rostow ini dikelompokkan ke dalammodel jenjang linear (linear stagesmode).

Menurut Rostow, prosespembancunanekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap :

1) Masyarakat tradisional (the traditional society),
2) Prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off),
3) Tinggal landas (the take-off),
4) Menujukekedewasaan(the drive to maturity), dan
5) Masakonsumsitinggi(the age of highmass-consumption)

Dasar pembedaantahap pembangunanekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalah:

1) Karakteristik perubahankeadaanekonomi,
2) sosial, dan
3) politik, yang terjadi.

Menurut Rostow, pembangunan ekonomi atau proses transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat moderen merupakan suatu proses yang multidimensional. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja. Menurut Rostow, disamping perubahan seperti itu, pembangunan ekonomi berarti pula sebagai suatu prosesyangmenyebabkanantara lain:

(1) perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan sosial yang pada mulanya berorientasi kepada suatudaerahmenjadiberorientasi ke luar.
(2) perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anakmenjadi keluarga kecil.
(3) perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpukemas, membelirumah, dansebagainya) menjadi investasi yangproduktif.
(4) perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang terjadi kurang merangsang pembangunan ekonomi (misalnya penghargaan terhadap waktu, penghargaan terhadap pertasi perorangan dansebagainya).

1) Masyakarat Tradisional

Masyarakat yang fungsi produksinya terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif (yang didasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton) dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional, tetapi kebiasaan tersebut telah turun temurun. Tingkat produktivitas per pekerja masih rendah, oleh karena itu sebagian besar sumberdaya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, struktur sosialnya bersifat hirarkhis yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya adalah bahwa kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak akan berbeda dengannenekmoyangnya.

Sementara itu kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini digambarkan Rostow dengan adanya kenyataan bahwa walaupun kadang-kadang terdapat sentralisasi dalam pemerintahan, tetapi pusat kekuasaan politik di daerah-daerah berada di tangan para tuan tanah yang ada di daerah tersebut. Kebijaksanaan pemerintah pusat selalu dipengaruhi olehpandangan para tuan tanah di daerah tersebut.

2) Tahap Prasyarat Tinggal Landas

Tahap prasyarat tinggal landas ini didefinisikan Rostow sebagai suatu masa transisi di mana masyarakat mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatan sendiri (selfsustained growth). Menurut Rostow, pada tahap ini dan sesudahnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis.

Tahap prasyarat tinggal landas inimempunyai 2 corak.

1) Pertama adalah tahap prasyarat lepas landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada.
2) Kedua adalah tahap prasyarat tinggal landas yang dicapai oleh negara-negara yang born free (menurut Rostow) seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, di mana negara¬negara tersebut mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara-negara tersebut yang terdiri dari imigran yang telah Perubahan-perubahan itulah yang akan memungkinkan terjadinya kenaikan tabungan can penggunaantabungan itu sebaikbaiknya.

Perubahan-perubahan yang dimaksudkan Rostow misalnya kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan moderen dan membuat penemuan-penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi. Disamping itu harus ada pula orang-orang yang menggunakan penemuan baru tersebut untuk memodernisir cara produksi dan harus didukung pula dengan adanya kelompok masyarakat yang menciptakan tabungan dan meminjamkannya kepada wiraswasta (entrepreneurs) yang inovatif untuk meningkatkan produksi dan menaikkan produktivitas. Singkatnya, kenaikan investasi yang akan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih cepat dari sebelumnya bukan semata-mata tergantung kepada kenaikan tingkat tabungan, tetapi juga kepada perubahan radikal dalam sikap masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, perubahan teknik produksi, pengambilan resiko, dan sebagainya.

Selain hal-hal di atas, Rostow menekankan pula bahwa kenaikan tingkat investasi hanya mungkin tercipta jika terjadi perubahan dalam struktur ekonomi. Kemajuan di sektor pertanian, pertambangan, dan prasarana harus terjadi bersama-sama dengan proses peningkatan investasi. Pembangunan ekonomi hanya dimungkinkan oleh adanya kenaikan produktivitas di sektor pertanian dan perkembangan di sektor pertambangan.

Menurut Rostow, kemajuan sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum mencapai tahap tinggal landas. Sementara itu pembangunan prasarana, menurut Rostow, bisa menghabiskan sebagian besar dari dana investasi. Investasi di bidang prasarana ini mempunyai 3 ciri yaitu tenggang waktu antara pembangunannya dan pemetikan hasilnya (gestation period) sangat lama, pembangun¬annya harus dilakukan secara besar-besaran sehingga memerlukan biaya yang banyak, dan manfaat pembangunannya dirasakan oleh masyarakat

banyak. Berdasarkan sifatnya ini, maka pembangunan prasarana terutama sekali harus dilakukan pemerintah.

Selain hal-hal yang diungkapkan di atas, Rostow juga menunjukkan bentuk perubahan dalam kepemimpinan pemerintahan dari masyarakat yang mengalami transisi. Untuk menjamin terciptanya pembangunan yang teratur, suatu kepemimpinan baru haruslah mempunyai sifat nasionalisme yang reaktif (reactive nationalism) yaitu bereaksi secara positif atas tekanan¬tekanan dari negara maju. Rostow yakin bahwa tanpa adanya tekanan atau hinaan dari negara¬negara maju, modernisasi yang terjad Tahap Tinggal Landas mempunyai sifat-sifat yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat untuk tahap prasyarat tinggal landas. Seperti telah diungkapkan di muka, Rostow sangat menekankan perlunya perubahanperubahan yang multidimensional, karena ia tak yakin akan kebenaran pandangan yang menyatakan bahwa pembangunan akan dapat dengan mudah diciptakan hanya jika jumlah tabungan ditingkatkan. Menurut pendapat tersebut tingkat tabungan yang tinggi akan mengakibatkan tiangkat investasi tinggi pula sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan oleh kenaikan pendapatan nasional. Namun menurut Rostow pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh perubahan-perubahan lain dalam masyarakat.

NEGARA	MASA TINGGAL LANDAS	SEKTOR KEPEMIMPINAN
Inggris	1783 – 1802	Industri tekstil
Perancis	1830 -1860	Jaringan jalan kereta api
Belgia	1833-1860	
Amerika Serikat	1843-1860	Jaringan jalan kereta api
Jerman	1850-1873	Jaringan jalan kereta api
Swedia	1868- 1890	Industri kayu
Jepang	1878-1900	Industri sutera
Rusia	1890-1914	Jaringan jalan kereta api
Kanada	1896-1914	Jaringan jalan kereta api
Argentina	1935	Industri substitusi impor
Turki	1937	
India	1952	
Cina Komunis	1952	

Dari Tabel di atas bisa disimpulkan bahwa:

1) sebagian besar negara Barat mencapai masa tinggal landas pada abad yang lalu, kecuali Inggris, yang sudahmencapainya seabad sebelumnya.
2) masa tinggal landas itu berkisar antara 20 - 30 tahun.

Rostow mengemukakan 3 ciri utama dan negara-negara yang sudah mencapai masa tinggal landas yaitu:

1. Terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5 persen atau kurang menjadi 10 persen dari Produk Nasional Bersih (Net National Product= NNP).
2. Terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (leading sectors).
3. Terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

Di sini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumbersumber modal dalam negeri, karena kenaikan tabungan dalam negeri peranannya besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas. Inggris dan Jepang, misalnya mencapai masa tinggal landas tanpa mengimpor modal(bantuan luar negeri) samasekali.

Menurut Rostow perkembangan sektor pemimpin (leading sector) berbeda-beda untuk setiap negara. Di Inggris, tekstil katun merupakan sektor pemimpin pada masa tinggal landasnya, sedangkan perkembangan jaringan jalan kereta api memegang peranan yang sama di Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Kanada, dan Rusia. Di Swedia, sektor pemimpin adalah industri kayu, di Jepang sutera, dan Argentina adalah industri substitusi impor barang-barangkonsumsi.

Berdasarkan pada kenyataan tersebut, Rostow mengambil kesimpulan bahwa untuk mencapai tahap tinggal landas tidak satu sektor ekonomipun yang baku untuk semua negara yang bisa menciptakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, suatu negara tertentu tidak bisa hanya sekadar mencontoh pola perkembangan sektor pemimpin negara-negara lain. Namun demikian, ada 4 faktor pentingyangharus diperhatikan dalammenciptakansektorpemimpin yaitu:

1. Harus ada kemungkinan untuk perluasan pasar bagi barang-barang yang diproduksi yang mempunyai kemungkinan untuk berkembangdengancepat.

2. Dalam sektor tersebut harus dikembangkan teknik produksi yang modern dan kapasitas produksi harus bisa diperluas.
3. Harus tercipta tabungan dalam masyarakat dan para pengusaha harus menanamkan kembali keuntungannya untukmembiayai pembangunan sektor pemimpin.
4. Pembangunan dan transformasi teknologi sektor pemimpin haruslah bisa menciptakan kebutuhan akanadanya perluasan kapasitas dan modernisasi sektorsektor lain.

4) Tahap Menuju Kekedewasaan

Tahap menuju kedewasaan ini diartikan Rostow sebagai masa di mana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi moderen pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin lama yang akan mengalami kemunduran. Sektor-sektor pemimpin baru ini coraknya ditentukan oleh perkem¬bangan teknologi, kekayaan alam, sifat-sifat dari tahap lepas landas yang terjadi, dan juga oleh kebijaksanaan pemerintah. Dalam menganalisis karakteristik tahap menuju ke kedewasaan, Rostow menekankan analisisnya kepada corak perubahan sektor-sektor pemimpin di beberapa negara yang sekarang sudah maju. la juga menunjukkan bahwa di tiap-tiap negara tersebutjenis¬jenis sektor pemimpin pada tahap sesudah tinggal landas adalahberbedadenganyangadapada tahap tinggal landas.

Di Inggris, misalnya, industri tekstil yang telah mempelopori pembangunan pada tahap tinggal landas telah digantikan oleh industri besi, batu bara dan peralatan teknik berat. Sedangkan di Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman di mana pembangunanjaringanjalan kereta api memegang peranan penting pada tahap tinggal landas, telah digantikan oleh industri baja dan industri peralatan berat pada tahap menuju ke kedewasaan. Selanjutnya Rostow mengemukakan pula karakteristik non-ekonomis darimasyarakat yang teiah mencapai tahapmenuju ke kedewasaan sebagai berikut:

1. Struktur dan keahlian tenaga kerja mengalami perubahan. Peranan sektor industri semakin penting, sedangkan sektor pertanianmenurun.
2. Sifat kepemimpinan dalam perusahaan mengalami perubahan. Peranan manajer professional semakinpentingdan menggantikan kedudukan pengusaha-pemilik.
3. Kritik-kritik terhadap industrialisasi mulai muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap dampakindustrialisasi.

5) Tahap Konsumsi Tinggi

Tahap konsumsi tinggi ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan ekonomi Rostow. Pada tahap ini perhatian masyarakat telah lebih menekankan pada masalahmasalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukan lagi kepada masalah produksi. Pada tahap ini ada 3 macam tujuanmasyarakat (negara) yaitu:

1. Memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri dan kecenderungan ini bisa berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain.
2. Menciptakan negara kesejahteraan (welfare state) dengan cara mengusahakan terciptanya pembagian pendapatanyanglebihmerata melalui sistem pajakyang progresif.
3. Meningkatkan konsumsi masyarakat melebihi kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) menjadi meliputi pulabarang-barangkonsumsi tahan lama danbarang-barangmewah.

Beberapa Kritik terhadap Teori Rostow:

Beberapa kritik yang muncul terhadap teori Rostow ini antara lain berkaitan dengan adanya tumpang tindih tahapan, periode jangka waktu tahap tinggal landas yang meragukan, adanya masyarakat yangtidakmelalui tahap tradisional.

3.3 Teori Transformasi Struktural dan Model Perubahan Structural

3.3.1. Definisi Transformasi Struktural

Transformasi struktural merupakan suatu proses yang terjadi pada masa transisi dari sistem ekonomi tradisional ke sistem ekonomi modern. Dalam proses ini, meningkatnya pendapatan dapat mengakibatkan meningkatnya akumulasi modal fisik dan kualitas manusia, dan pergeseran komposisi permintaan, perdagangan, produksi serta pemanfaatantenagakerja (Chenery, 1960; dan Syrquin, 1988). Transformasi struktural tidak hanya ditentukan oleh peningkatan pendapatan tetapi juga ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan. Peningkatan pendapatan dari golongan berpendapatan rendah akan meningkatkanpermintaanterhadap barang-barangdanjasaproduksi sektor padatkarya di dalamnegeri sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sasaran tranformasi struktural adalah meningkatnya peranan ekonomi rakyat yang dicerminkan oleh meningkatnya peranan sektor ekonomi produktif yang menjamindistribusi pendapatan.

3.3.2 Perkembangan Teori Transformasi Struktural

Perkembangan teori transformasi struktural dapat ditinjau dari berbagai segi, di antaranya pemikiran transformasi struktural tentang pergeseran tenaga kerja dan investasi dari sektor primer ke sektor sekunder serta ke sektor tersier yang dikemukakan oleh Fisher (1935). Selanjutnya, Rostow (1960) dan Lewis (1954) meninjau transformasi struktural dari segi peningkatan laju akumulasi modal. Terakhir, Kuznets (1960), Syrquin dan Chenery (1988) yang meninjau dari segi peningkatan pendapatan.

Teori transformasi struktural Fisher (1935) memiliki persamaan dengan teori tahapan pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh List. List mengemukakan bahwa terdapat lima tahapan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pergeseran distribusi tenaga kerja yaitu (1) masyarakat primitif; (2) masyarakat penggembala ternak; (3) masyarakat pertanian; (4) masyarakat pertanian-manufaktur; dan (5) masyarakat manufaktur-perdagangan (Hoselitz, 1960). Tetapi Fisher menekankan transformasi struktural dari segi adanya pergeseran tenaga kerja dan investasi yang bersifat permanen dari sektor pertanian ke sektor industridan akhirnya ke sektor jasa. Perkembangan selanjutnya, Clark (1951) berpendapatbahwa pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan transformasi dapat dicapai dengancara: (1) meningkatkan produktvitas pada setiap sektor danmengalihkantenaga kerja dari sektor denganproduktivitas rendah ke sektor denganproduktivitastinggi.

Rostow lebih menekankan kepada laju akumulasi modal untuk terjadinya perubahan struktur ekonomi. Dalam hubungan ini, Rostow mengemukakan lima tahapan pertumbuhan yaitu: (1) masyarakat tradisional; (2) pra kondisi untuk tinggal landas; (3) tinggal landas; (4) gerakan menuju kematangan; dan (5) masa konsumsi tinggi. Sejalan dengan Rostow, Lewis dalam ekonomi dualistiknya menekankan tentang pergeseran sumber dari sektor tradisional ke sektor modern. Pembuktian secara empiris tentang transformasi struktural dilakukan oleh Kuznets (1960) dan pendekatan secara statistik dilakukan oleh Chenery (1960). Kuznets beranggapan bahwa peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat keharusan, tetapi belum memenuhi syarat kecukupan bagi pertumbuhan ekonomi.

Kuznets dan Chenery beranggapan bahwa selain peningkatan akumulasi modal (fisik dan kualitas manusia), juga diperlukan suatu perubahan struktur perekonomian yang saling berkaitan, agar terjadi perubahan dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern.

3.3.3. Proses Transformasi Struktural

Proses transformasi struktural secara skematis disajikankan pada Gambar 1. Peningkatan pendapatan dan peningkatan pemerataan pendapatan dapat merubah pola permintaan domestik, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan populasi, yang akan menggeser permintaan dari barang-barang pertanian (pangan) ke barang-barang non pertanian (industri dan jasa). Perubahan pola permintaan akan mendorong terjadinya transformasi struktur produksi. Transformasi struktur produksi ditandai dengan terjadinya penurunan pangsa relatif PDB sektor pertanian. Keadaan ini mencerminkan relatif lambatnya peningkatan laju pertumbuhan produksi dan nilai tambah bruto (NTB) sektor pertanian terhadap sektor nonpertanian (Anwar, 1983 dalam Budiharsono, 1996).

Peranan sektor pertanian di Indonesia selama proses pertumbuhan hanya merupakan pasar bagibarang-barang industri dan penghasil devisa dari ekspor. Peranannya sebagai penyedia bahan baku, modal dan tenaga kerja untuk sektor industri tidak begitu besar. Kecilnya keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri baik dari segi produksi maupun penyerapan tenaga kerja dapat mempengaruhi proses transformasi struktural. Penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian antara lain disebabkan oleh: (i) produk marjinal sektor pertanian semakin turun; dan (ii) harga relatif barang-barang pertanian terhadap barang-barang nonpertanian semakin menurun. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan pro uktivitas tenaga kerja, diperlukan kebijakan untuk dapat menggeser tenaga kerja dari sektor yang produktivitasnya rendah (pertanian) ke sektor denganproduktivitastinggi (industri).

Model Todaro mengemukakan bahwa pergeseran tenaga kerja terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama, tenaga kerja dari sektor pertanian bergeser kepada sektor yang mempunyai produktivitas marjinal yang sama dengan sektor pertanian yaitu sektor jasa informal. Tahap selanjutnya, tenaga kerja yangberada di sektor jasa informal akan berpindah ke sektor industri (Paauw, 1992 dalam Budiharsono, 1996). Transformasi ketenagakerjaan juga ditandai dengan proses migrasi dari desa ke kota (urbanisasi) dan pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Salah satu penyebab terjadinya pergeseran itu adalah tingginya upah riil di perkotaan dan meningkatnya kesempatan berusaha.

3.4 Teori Ketergantungan Internasional

Teori Ketergantungan juga dikenal dengan teori dependensi (Dependency Theory). Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasaalahan pembangunan dari sudut Negara Dunia Ketiga. Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan dimana kehidupan ekonomi negara–negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara–negara lain, di mana negara–negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja.

Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili "suara negara-negara pinggiran" untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya danintelektual dari negaramaju.

3.4.1 Teori Ketergantungan Menurut Para Ahli

1. Menurut Paul Baran

Menurut Paul baran adalah seorang pemikir Marxisme yang menolak pandangan Marx tentang pembangunan dinegara-negara dunia ketiga. Bila Marx mengatakan bahwa sentuhan negara-negara kapitalis maju kepada negara-negara pra-kapitalis yang terbelakang akan membangunkan negara-negara yang terakhir ini untuk berkembang, seperti negara-negara kapitalis di Eropa. Baran berpendapat lain, baginya, sentuhan ini akan mengakibatkan negara-negara kapitalis tersebut terhambat kemajuannya danakanterushidup dalamketerbelakangan.

Dengan pendapatnya yang berbeda dengan Marx, Baran menyatakan bahwa perkembangan kapitalisme di negara-negara pinggiran, berbeda dengan perkembangan kapitalisme di negara-negara pusat. Di negara pinggiran sistem kapitalisme seperti terkena penyakit kretinisme. Orang yang dihinggapi penyakit ini tetap kerdil dan tidak bisa besar. Menurut baran kapitalisme di negara-negara pusat bisa berkembang karena adanya tiga prasyarat: Meningkatnya produksi diikuti dengan tercabutnya masarakat petani di pedesaan. Meningkatnya produksi komoditi da terjadinya pembagian kerja mengakibatkan sebagian orang menjadi buruh yang menjual tenaga kerjanya sehingga sulit menjadi kaya, dan sebagian lagi menjadi majikan yang bisa mengumpulkan harta. Mengumpulnya harta di tangan parapedagangdantuantanah.

2. Menurut Neo - Marxisme

Teori depedensi juga memiliki warisan pemikiran dari Neo-Marxisme keberhasilan dari revolusi Cina dan Kuba ketika itu telah mebantu tersebarnya perpaduan baru pemikiran-pemikiran Marxisme di universitas-universitas di Amerika latin yang menyebabkan generasi baru dan dengan lantangmenyebut dirinya sebagai Neo-Marxisme.

Beberapa pendapat Neo-Marxisme:

Neo-Marxisme melihat imprealisme dari sudut pandangan negara pinggiran. Dengan lebih memberikanperhatian pada akibat imperialisme padanegara-negara dunia ketiga.

Neo-Marxisme percaya, bahwa negara duniaketiga telah matanguntukmelakukan revolusi sosialis.

Neo-Marxisme lebih tertarik pada arah revolusi Cina dan Kuba, ia berharap banyak pada kekuatan revolusioner potensial dari para petani pedesaandanperang gerilya tentara rakyat.

Bentuk- Bentuk Teori Ketergantungan

Dos Santosmenguraikan ada 3 bentuk ketergantungan:

1). Ketergantungan Kolonial

Terjadi penjajahan dari negara pusat ke negara pinggiran. Kegiatan ekonominya adalah ekspor barang-barang yang dibutuhkan negara pusat. Hubungan penjajah – penduduk sekitar bersifat eksploitatif negara pusat. Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal.

2). Ketergantungan Finansial-Industrial

Negara pinggiranmerdeka tetapi kekuatanfinansialnya masih dikuasai olehnegara-negara pusat.

Ekspor masih berupa barang – barangyangdibutuhkannegarapusat.

Negara pusat menanamkan modalnya baik langsung maupun melalui kerjasama dengan pengusaha lokal.

3). Ketergantungan Teknologis-Industrial

Bentukketergantungan baru.

Kegiatanekonomi di negara pinggiran tidak lagi berupaekspor bahanmentahuntuknegara pusat.

Perusahaan multinasional mulai menanamkan modalnya di negara pinggiran dengan tujuan untuk kepentingannegarapinggiran.

Teoriketergantungan secara garisbesarbisa dibagi menjadi dua macam

a). Teori Depensi Klasik

Teori ini digagas oleh Andre Gunder Frunk, yang menyatakan bahwa kapitalisme global akan membuat ketergantungan masa lalu dan sekarang oleh karena itu negara yang tidak maju dan berkembang harusmemutuskanhubungandengannegara maju supayanegara berkembang bisa maju.

b). Teori Depensi Modern

Teori ini digagas oleh Fernando Henrigue Cardoso, teori ini menyatakan bahwa antara negara yang satudenganlainnya perlu kerjasama denganmelihat karakteristik histori dari daerah tersebut.

Selain pandangan ke dua tokoh tersebut juga ada beberapa ahli yang menyatakan tentang teori ketergantungan. Theontonio Dos Santos membagi tiga bentuk ketergantungan negara ketiga, yaitu ketergantungan kolonial, ketergantungan finansial-industrial, ketergantungan tekhnologi-industrial.

Kelemahandan Kekuatan Teori Ketergantungan

Menurut Robert A. Packenham, teori ketergantungan itu memiliki kelemahan dan kekuatan. Packenham menyebutkanada 6 kelemahan dari teori ketergantungan, antara lain:

Menyalahkan hanya kapitalisme sebagai penyebabdariketergantungan.

Konsep-konsepinti, termasuk konsepketergantungan itu sendiri àkurangdidefinisikan secara jelas.

Hanya didefinisikan sebagai konsep dikotomi.

Sedikit sekali dibicarakan tentang proses yang memungkinkan sebuah negara dapat lepas dari teori tersebut.

Selalu dianggap sebagai sesuatu yang negatif.

Kurang membahas dengan teori lain (otonomi).

Packenham juga mengatakan disamping kelemahan terdapat juga kelebihan dari teori ketergantungan, kelebihannya antara lain:

Menekankan aspek internasional

Mempersoalkanakibat dari politik luar negeri.

Membahas proses internal dari perubahan di negara-negara pinggiran.

Menekankan pada kegiatan sektor swasta dalam hubungannya dengan kegiatan perusahaan-perusahaan multinasional.

Membahas hubunganantarklas yang ada di dalam negeri.

Mempersoalkan bagaimana kekayaan nasional ini dibagikan antar klas-klas sosial, antar daerah, dan antar negara.

3.4.2 Kritik Terhadap Teori Ketergantungan

1. Kritik Packenham

Salah satu kritik menarik dari kelompok teori liberal datang dari Robert A. Packenham. Menurutnya disamping kekuatan, Teori Ketergantungan juga mempunyai kelemahan yaitu hanya menyalahkan kapitalisme sebagai penyebab ketergantungan. Tidak mendefinisikan secara jelas tentang konsep ketergantungan. Pembicaraan tentang proses sebuah Negara bisa keluar dari ketergantungan sedikit sekali, bahkan Frank hanya menawarkan Revolusi Sosialis sebagi jalan keluarnya. Ketergantungan selalu dianggap sebagai sesuatu yang negative, Teori Ketergantungan sangat menekankan konsep kepentingan kelompok, kelas dan Negara. Kepentingan antara Negara pusat dan Negara pinggiran tidak selalu bersifat zero-sum game (bila satu menang maka lainnya kalah) karena bisa saja keduanya mendapat keuntungan.

2. Penelitian Chase Dunn

Christopher Chase Dunn menganggap investasi modal asing dan utang tidak selalu berakibat negatif pada pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pada pemerataan pendapatan, investasi tersebut dapat juga positif bagi ekonomi negara pinggiran, dalam arti Modal asing langsung memproduksi barang dan menimbulkan permintaan barang-barang lain yang dibutuhkan bagi produksi; Utang luar negeri membiayai pembangunan sarana yang dibutuhkan untuk pembangunan; dan Transfer teknologi, perbaikan kebiasaan kerja, modernisasi organisasi

3. Komentar Cardoso

Usaha untuk mengerti terjadinya keterbelakangan itu dituangkan dalam analisis yang bersifat kualitatif, karena banyak persoalan yang tidak bisa dikuantifikasikan. Cardoso membalas kritik Packenham yang dianggap mau memformalkan Teori ketergantungan menjadi seperangkap konsep yang bisa diukur dan bersifat a-historis, seakan-akan konsep ini bisa berlaku dalam segala situasi dan kapan saja. Cardoso mengkritik Chase Dunn dalam usahanya mengkuantifikasikan konsep-konsep masalah ketergantungan dan

menyalahkan Frank, yang mereduksikan masalah ketergantungan menjadi dikotomi antara kekuatan imperialis negara-negara maju dengan negara-negara yang terkebelakang.

3.5 Model Pertumbuhan Neo Klasik

Teori neoklasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi (Sukirno,2005).

Menurut teori neoklasik membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu :

a) Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi

b) Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi

c) Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi

Teori neoklasik memiliki pandangan dari sudut yang berbeda dari teori klasik yaitu dari segi penawaran. Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi, persamaan ini dinyatakan dengan :

$$\mathbf{Y = TK_{t}^{a}\ TK_{1t}^{1-a}}$$

dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja dan T adalah teknologi. Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen maka model neo klasik Solow juga disebut model pertumbuhan eksogen. Model Solow memiliki beberapa kekurangan dan untuk memperbaikinya dengan memecah total faktor produksi dengan memasukan variabel lain, dimana variabel ini dapat menjelaskan pertumbuhan yang terjadi. Model ini disebut model pertumbuhan endogen.

Model pertumbuhan endogen beranggapan bahwa perdagangan internasional penting sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Model perdagangan internasional diukur melalui aktifitas ekspor dan impor, yaitu:

$$\mathbf{Y=F\ (}Ai,Ki,Li\mathbf{)}$$

Dimana Y adalah output, A adalah indeks prokduktifitas, K adalah modal, L adalah angkatan kerja yang bekerja, i adalah tahun, sedangkan indeks produktifitas (A) adalah fungsi dari ekspor (X) dan impor (M), yaitu:

Ai= **F (**$Xi\ Mi$**)**

Ada beberapa ahli ekonom seperti Mankiw, Romer dan Weil melakukan studi untuk penyempurnaan model pertumbuhan ekonomi neoklasik untuk memperjelas dan menambahkan dasar teoritis bagi sumber pertumbuhan ekonomi (Esa Suryaningrum,2000). Model Solow hanya dapat menerangkan hubungan modal dan angkatan kerja yang bekerja saja, sehingga ditambahkan lagi variabel mutu modal manusia untuk membantu menjelaskan pola pertumbuhan ekonomi selain modal dan angkatan kerja yang bekerja, yaitu :

$$\mathbf{Y = TK_t^a\ L_t^Q\ H^{1-a-Q}}$$

Dimana Y adalah output, K adalah modal, L adalah tenaga keja, T adalah teknologi dan H adalah modal manusia.

3.6 Latihan Soal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan Jelaskan paradigma Teori pertumbuhan ekonomilinear menurut Friedrich List!

   Jawab:

   .....

   .....

2. Jelaskan kritik terhadap Teori Rostow!

   Jawab:

   .....

   .....

3. Jelaskan paradigmateori transformasi struktural!

   Jawab:

   .....

   .....

4. Jelaskan paradigmadari Teori Ketergantungan Internasional!

   Jawab:

   .....

   .....

5. Jelaskan kritik terhadap Teori Ketergantungan!

   Jawab:

   .....

   .....

BAB 4

Kemiskinan, Ketimpangan dan Pembangunan Ekonomi

Lingkup pembahasan dalam bab 4 ini secara menyeluruh di antaranya membahas tentang:

1. **Pendahuluan**
2. **Konsep Kemiskinan**
3. **Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan**
4. **Bentuk dan Jenis Kemiskinan**
5. **Indikator-Indikator Kemiskinan**
6. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin**
7. **Konsep Ketimpangan**
8. **Mengukur Ketimpangan**
9. **Penyebab Kemiskinan**
10. **Ukuran Kemiskinan**
11. **Indikator Kemiskinan**
12. **Bahan Diskusi**
13. **Latihan Soal**

KAD 5 : mahasiswa dapat menganalisis tentang konsep kemiskinan dan ketimpangan, faktor pengaruh, Indikator serta ukuran kemiskinan dan ketimpangan

KAD 6 : mahasiswa mampu menganalisis tentang kebijakan dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan

---

4.1 Pendahuluan

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang kompleks yang dialami oleh hampir semua negara sedang berkembang, hal ini dikarenakan berkaitan dengan berbagai macam aspek yang lain seperti kesenjangan sosial, pengangguran, kriminal,

dan lain-lain. Aspek paling parah sebagai akibat adanya kemiskinan yaitu degradasi moral. Sebenarnya kemiskinan memiliki sisi fungsional yang diperlukan. Namun, karena kompleksnya masalah ini, ada beberapa sudut pandang untuk menganalisis dan bermacam pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dalam rangka memecahkan masalah kemiskinan tersebut. Meskipun belum benar-benar ada cara yang tepat untuk menyelesikan permasalahan tentang kemiskinan secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, pada bab 4 ini kita akan bahas lebih mendalam tentang kemiskinan, ketimpangan dan pembangunan ekonomi pada negara berkembang.

4.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhanpokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya, standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Suryawati, 2004).

Pengertian kemiskinan yang saat ini populer dijadikan studi pembangunan adalah kemiskinan yang seringkali dijumpai di negara-negara berkembang dan negara-negara dunia ketiga. Persoalan kemiskinan masyarakat di negara-negara ini tidak hanya sekedar bentuk ketidakmampuan pendapatan, akan tetapi telah meluas pada bentuk ketidakberdayaan secara sosial maupun politik (Suryawati, 2004).

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah *(inter region income gap*. Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 2004). Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin.

Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiapnegara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan.

Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup (Suryawati, 2004). Kemampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan pokok berdasarkan standar harga tertentu adalah rendah sehingga kurang menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup pada umumnya. Berdasarkan pengertian ini, maka kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar kualitas hidup.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hakdasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang

disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Definisi kemiskinan kemudian dikaji kembali dan diperluas berdasarkan permasalahan-permasalahan kemiskinan dan faktor-faktor yang selanjutnya menyebabkan menjadi miskin. Definisi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers adalah definisi yang saat ini mendapatkan perhatian dalam setiap program pengentasan kemiskinan di berbagai negara-negara berkembang dan dunia ketiga. Pandangan yang dikemukakan dalam definisi kemiskinan dari Chambers menerangkan bahwa kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep *(integrated concept)* yang memiliki limadimensi, yaitu:

1) Kemiskinan *(Proper)*

Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhan kebutuhan pokok. Konsep atau pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.

2) Ketidakberdayaan *(Powerless)*

Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan menghadapi situasi darurat *(State of emergency)*

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam, kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi situasi ini.

4) Ketergantungan *(dependency)*

Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan

terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhanakan sumber pendapatan.

5) Keterasingan *(Isolation)*

Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya, masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini menjadi penyebab adanya kemiskinan.

4.3 Skema Terbentuknya Perangkap Kemiskinan

Skema terbentuknya kemiskinan yang didasarkan pada konsep yang dikemukakan oleh Chambers menerangkan bagaimana kondisi yang disebut miskin di sebagian besar negara-negara berkembang dan dunia ketiga adalah kondisi yang disebut memiskinkan. Kondisi yang sebagian besar ditemukan bahwa kemiskinan selalu diukur/diketahui berdasarkan rendahnya kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok berupa pangan, kesehatan, perumahan atau pemukiman, dan pendidikan. Rendahnya kemampuan pendapatan diartikan pula sebagai rendahnya daya beli atau kemampuan untuk mengkonsumsi.

Kemampuan pendapatan yang relatif terbatas atau rendah menyebabkan daya beli seseorang atau sekelompok orang terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi rendah (Nugroho, 2004). Konsumsi ini terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan akan gizi dan kesehatan standar. Akibatnya, kemampuan untuk mencapai standar kesejahteraan menjadi rendah seperti:

1) Ketersediaan pangan tidak sesuai atau tidak mencukupi standar gizi yang disyaratkan sehingga beresiko mengalami mal gizi atau kondisi gizi rendah yang selanjutnya sangat rentan terhadap resiko penyaki menular.

2) Kesehatan relatif kurang terjamin sehingga rentan terhadap serangan penyakit dan kemampuan untuk menutupi penyakit juga relatif terbatas sehingga sangat rentan terhadap resiko kematian.
3) Perumahan atau pemukiman yang kurang/tidak layak huni sebagai akibat keterbatasan pendapatan untuk memiliki/mendapatkan lahan untuk tempat tinggal atau mendapatkan tempat tinggal yang layak. Kondisi ini akan berdampakmengganggu kesehatan.
4) Taraf pendidikan yang rendah. Kondisi ini disebabkan karena keterbatasan pendapatan untuk mendapatkan pendidikan yang diinginkan atau sesuai dengan standar pendidikan.

Kondisi-kondisi akibat keterbatasan atau rendahnya pendapatan di atas menyebabkan terbentuknya status kesehatan masyarakat yang dikatakan rendah (morbiditas) atau berada dalam kondisi gizi rendah. Kondisi seperti ini sangat rentan terhadap serangan penyakit dan kekurangan gizi yang selanjutnya disertai tingginya tingkat kematian (mortalitas). Angka mortalitas yang tinggi dan keadaan kesehatan masyarakat yang rendah akan berdampak pada partisipasi sosial yang rendah, ketidakhadiran yang semakin tinggi, kecerdasan yang rendah, dan ketrampilan yang relatif rendah.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai masing-masing keadaan yang disebabkan oleh adanya mortalitas maupun morbiditas yang tinggi.

1) Tingkat Partisipasi Sosial Yang Rendah

Kondisi kesehatan maupun gizi yang rendah menyebabkan ketahanan fisik ataumodal fisik yang diperlukan untuk partisipasi sosial menjadi rendah. Hal ini dikarenakan kesehatan yang terganggu tidak dapat menunjang partisipasi secara penuh baik di lingkungan kemasyarakatan maupun di lingkungan kerja. Sebagian besar golongan masyarakat miskin relatif jarang terlibat secara aktif dalam aktivitas sosial.

2) Absensi Meningkat

Faktor kualitas kesehatan yang rendah tidak mendukung adanya aspek kehadiran dalam aktivitas kemasyarakatan baik di lingkungan sosial, pendidikan, maupun pekerjaan. Akibatnya, ketidakhadiran atau absensi dalam segala aktivitas menjadi

semakin meningkat sehingga tidak memiliki kesempatan untuk berperan secara aktif dalam lingkungan sosial tersebut.

3) Tingkat Kecerdasan Yang Rendah

Faktor gizi buruk ataupun kualitas kesehatan yang rendah akan berdampak pada menurunnya kualitas intelektual. Seperti diketahui bahwa kinerja otak manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah memerlukan gizi yang memadai atau ideal. Kekurangan gizi termasuk faktor yang paling utama terhadap adanya penurunan kualitas intelektual.

4) Ketrampilan Yang Rendah

Pada prinsipnya, ketrampilan merupakan salah satu bentuk dari adanya kreativitas. Aktivitas ini harus ditunjang dengan kondisi kesehatan yang mencukupi dan tentunya adalah kualitas intelektual yang memadai. Masyarakat yang mengalami kekurangan gizi ataupun rentan terhadap gangguan kesehatan relatif sulit untuk mengembangkan ketrampilannya. Hal ini dikarenakan dukungan kesehatan untuk menjunjang pengembangan kreativitas kerja relatif rendah sehingga tidak memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas ketrampilannya.

4.4 Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Dimensi kemiskinan yang dikemukakan oleh Chambers memberikan penjelasan mengenai bentuk persoalan dalam kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi yang disebut memiskinkan. Konsep kemiskinan tersebut memperluas pandangan ilmu sosial terhadap kemiskinan yang tidak hanya sekedar kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan kebutuhan pokok, akan tetapi juga kondisi ketidakberdayaan sebagai akibat rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan, rendahnya perlakuan hukum, kerentanan terhadap tindak kejahatan (kriminal), resiko mendapatkan perlakuan negatif secara politik, dan terutama ketidakberdayaan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya sendiri.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Suryawati, 2004):

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan ataumendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Bentuk kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang paling banyak mendapatkan perhatian di bidang ilmu sosial terutama di kalangan negara-negara pemberi bantuan/pinjaman seperti Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia. Bentuk kemiskinan struktural juga dianggap paling banyak menimbulkan adanya ketiga

bentuk kemiskinan yang telah disebutkan sebelumnya (Jarnasy, 2004). Setelah dikenal bentuk kemiskinan, dikenal pula dengan jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya. Adapun jenis kemiskinan berdasarkan sifatnya adalah:

1) Kemiskinan Alamiah

   Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya atau ketiadaan pra sarana umum (jalan raya, listrik, dan air bersih), dan keadaan tanah yang kurang subur. Daerah-daerah dengan karakteristik tersebut pada umumnya adalah daerah yang belum terjangkau oleh kebijakan pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

2) Kemiskinan Buatan

   Kemiskinan buatan adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh sistem moderenisasi atau pembangunan yang menyebabkan masyarakat tidak memiliki banyak kesempatan untuk menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi secara merata. Kemiskinan seperti ini adalah dampak negatif dari pelaksanaan konsep pembangunan (developmentalism) yang umumnya dijalankan di negara-negara sedang berkembang. Sasaran untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan tidak meratanya pembagian hasil-hasil pembangunan di mana sektor industri misalnya lebih menikmati tingkat keuntungan dibandingkan mereka yang bekerja di sektor pertanian.

Kedua jenis kemiskinan di atas seringkali masih dikaitkan dengan konsep pembangunan yang sejak lama telah dijalankan di negara-negara sedang berkembang pada dekade 1970an dan 1980an (Jarnasy, 2004). Persoalan kemiskinan dan pembahasan mengenai penyebab kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perdebatan baik di lingkungan akademik maupun pada tingkat penyusun kebijakan pembangunan (Suryawati, 2004). Salah satu perdebatan tersebut adalah menetapkan definisi terhadap seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. Pada umumnya, identifikasi kemiskinan hanya dilakukan pada indikator-indikator yang relatif terukur seperti pendapatan per kapita dan pengeluaran/konsumsi rata-rata. Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah:

1) Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai.

2) Tingkat pendidikan yang relatif rendah
3) Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja di lingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur
4) Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area)
5) Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasikan atau diukur.

4.5 Indikator-Indikator Kemiskinan

Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhanhasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan pada sub sub bab berikut ini.

1. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhanpokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Suryawati, 2004). Dari pengertian ini, dimensi ekonomi untuk kemiskinan memiliki dua aspek, yaitu aspek pendapatan dan aspek konsumsi atau pengeluaran. Aspek pendapatan yang dapat dijadikan sebagai indikator kemiskinan adalah pendapatan per kapita, sedangkan untuk aspek konsumsi yang dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan adalah garis kemiskinan.

1) Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita menyatakan besarnya rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah selama kurun waktu 1 tahun. Besarnya pendapatan per kapita (income per capita) dihitung dari besarnya output dibagi oleh jumlah penduduk di suatu daerah untuk kurun waktu 1 tahun (Todaro, 2006). Indikator pendapatan per kapita menerangkan terbentuknya pemerataan pendapatan yang merupakan salah satu indikasi terbentuknya kondisi yang disebut miskin. Pendapatan per kapita dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Todaro, 2006):

$$Y_{\text{Per Kapita}} = \frac{Y_t}{Pop_t}$$

di mana:

$Y_{\text{Per Kapita}}$ = Pendapatan per kapita

Y_t = Pendapatan pada tahun t

Pop_t = Jumlah penduduk pada tahun t.

Variabel pendapatan dapat dinyatakan sebagai Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional, atau Produk Domestik Regional Bruto, sedangkan jumlah penduduk menyatakan banyaknya penduduk pada periode t di suatu daerah yang diukur pendapatan per kapitanya.

2) Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kemiskinan yang menyatakan rata-rata pengeluaran makanan dan non-makanan per kapita pada kelompok referensi (reference population) yang telah ditetapkan (BPS, 2004). Kelompok referensi ini

didefinisikan sebagai penduduk kelas marjinal, yaitu mereka yang hidupnya dikategorikan berada sedikit di atas garis kemiskinan. Berdasarkan definisi dari BPS, garis kemiskinan dapat diartikan sebagai batas konsumsi minimum dari kelompok masyarakat marjinal yang berada pada referensi pendapatan sedikit lebih besar daripada pendapatan terendah. Pada prinsipnya, indikator garis kemiskinan mengukur kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok/dasar atau mengukur daya beli minimum masyarakat di suatu daerah. Konsumsi yang dimaksudkan dalam garis kemiskinan ini meliputi konsumsi untuk sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Suryawati, 2004).

2. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisator dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaanpenanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial. Program penanggulangan masalah kemiskinan inidibiayai melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) melalui pos pengeluaran untuk Program Pembangunan. Prinsip yang digunakan untuk programini bahwa penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui upaya untuk meningkatkanpembangunan di bidang sumber daya manusia dan pemenuhan sarana maupun pra sarana fisik. Kedua bentuk pelaksanaan dalam APBN ini disebut juga investasipemerintah untuk sumber daya manusia dan investasi pemerintah di bidang fisik, sebagai berikut.

1) Investasi Pemerintah di Bidang Sumber Daya Manusia

Investasi pemerintah di bidang sumber daya manusia ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang direalisasikan di bidang pendidikan, agama, kebudayaan, kesejahteraan, pembinaan wanita dan anak-anak, pengembangankualitas tenaga kerja, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pendidikan agama. Keseluruh aspek di bidang sumber daya manusia di atas merupakan salah satu syarat dasar dalam program penanggulangan masalah kemiskinan.

2) Investasi Pemerintah di Bidang Fisik

Investasi pemerintah di bidang fisik atau disebut juga investasi fisik pemerintah adalah pengeluaran pemerintah yang secara umum ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat yang direalisasikan ke dalam pembangunan fisik. Pada APBN, pos pengeluaran untuk investasi fisik pemerintah ini adalah keseluruhan pos pengeluaran pembangunan kecuali untuk bidang investasi sumber daya manusia, di antaranya di bidang industri, pertanian dan kehutanan, Sumber Daya Air dan Irigasi, Tenaga Kerja, Perdagangan, Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah, dan Koperasi, Transportasi, Meteorologi, dan Geofisika, Pertambangan dan Energi, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Pemukiman, Hukum, Aparatur Pemerintah dan Pengawasan, Politik, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa, Keamanan dan Ketertiban Umum,. Subsidi Pembangunan Kepada Daerah Bawahan.

3. Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Dari berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular. Kelompok masyarakat yang disebut miskin juga memiliki keterbatasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan/pengobatan yang memadai sehingga akan menyebabkan resiko kematian yang tinggi.

Indikator pelayanan air bersih atau air minum merupakan salah satu persyaratan terpenuhinya standar hidup yang ideal di suatu daerah. Ketersediaan air bersih akan mendukung masyarakat untuk mewujudkan standar hidup sehat yang layak. Dalam hal ini, ketersediaan air bersih akan mengurangi resiko terserang penyakit yang diakibatkan kondisi sanitasi air yang buruk. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka terdapat keterkaitan/hubungan antara ketersediaan pelayanan air bersih dan jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Pada sisi permasalahan lain, ketersediaan air bersih sangat

ditentukan oleh kemampuan pembangunan pra sarana air bersih dalam menjangkau lingkungan atau pemukiman masyarakat. Masyarakat yang kurang terjangkau oleh pelayanan air bersih/minum relatif lebih rendah kualitas kesehatannya dibandingkan masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan air bersih.

4.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Pada sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai terbentuknya kemiskinan dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang ataupun sekelompok orang (masyarakat) menjadi miskin. Pemikiran sosial saat ini lebih banyak memfokuskan penyebab kemiskinan pada faktor-faktor yang dianggap dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdapat di suatu daerah. Faktor-faktor tersebut merupakan dimensi dari kesejahteraan atau kemiskinan yang selanjutnya dijadikan sebagai faktor yang menciptakan besarnya penduduk miskin (Saleh, 2002). Dalam penelitian ini, faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di suatu daerah diterangkan sebagai berikut.

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Pada prinsipnya, PDRB per kapita merupakan konsep dari pendapatan per kapita yang diimplementasikan penjelasannya pada lingkup regional/daerah. Besarnya pendapatan per kapita di suatu daerah mencerminkan aspek pemerataan pendapatan dengan menggunakan besarnya nilai rata-rata keseluruhan pendapatan rumah tangga dalam perekonomian daerah. Pendapatan per kapita menggambarkan kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah. Konsep pendapatan per kapita seperti ini dianggap masih relevan untuk menerangkan terbentuknya jumlah penduduk miskin di daerah tersebut. Apabila pendapatan per kapita meningkat, maka kemampuan rata-rata pendapatan masyarakat di suatu daerah akan semakin meningkat. Ini berarti kemampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok di daerah tersebut juga akan semakin meningkat. Jika kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok meningkat, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan berkurang. Sebaliknya, apabila pendapatan per kapita di daerah berkurang/menurun, maka akan menurun pula kemampuan pendapatan rata-rata masyarakat di daerah tersebut. Jika kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok menurun, maka jumlah penduduk miskin di daerah tersebut akan meningkat. Berdasarkan

penjelasan tersebut, maka PDRB per kapita berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin.

2) Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan

Pengeluaran pemerintah untuk pembangunan merupakan faktor penentu jumlah penduduk miskin yang berasal dari sisi pendekatan anggaran pemerintah (Saleh, 2002). Pengeluaran tersebut meliputi keseluruhan pengeluaran untuk program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah untuk pembangunan, maka akan semakin tinggi pula taraf kesejahteraan yang dapat dicapai atau diperoleh penduduk di suatu daerah.

3) Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu indikator kesejahteraan di bidang pendidikan adalah indikator jumlah penduduk yang dinyatakan melek huruf. Indikator ini mencerminkan kemampuan penduduk di suatu daerah untuk mengakses fasilitas, layanan pemerintahan, dan sarana lainnya yang membutuhkan kemampuan untuk bisa membaca dan menulis, termasuk di antaranya adalah persyaratan dalam mencari kerja (Suryawati, 2004). Semakin tinggi jumlah penduduk yang melek huruf, maka akan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk mengakses fasilitas maupun sarana untuk dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya.

4) Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Air Bersih (RPA)

Air bersih atau air minum merupakan salah satu sarana publik yang cukup vital, sehubungan dengan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik individu maupun keluarga. Akses terhadap air bersih atau air minum akan menentukan kemampuan penduduk untuk mencukupi kebutuhan pokoknya yang terdiri atas kebutuhan atas makanan dan minuman, serta kebutuhan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses atas air bersih, maka akan semkin tinggi pula jumlah penduduk miskin di daerah tersebut.

5) Jumlah Penduduk Yang Tidak Mendapatkan Akses Fasiliats Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu fasilitas publik yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan (Saleh, 2002). Fasilitas kesehatan sekarang ini tidak hanya berfungsi untuk memberikan layanan kesehatan, akan tetapi berperan pula untuk

memberikan perbaikan gizi keluarga. Layanan kesehatan akan memberikan pencegahan dan pengobatan atas penyakit atau gangguan medis, sehingga akan mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk yang tidak mendapatkan akses fasilitas kesehatan, maka akan semakin tinggi resiko penularan penyakit ataupun gizi buruk yang selanjutnya akan menjadi penyebab tingginya angka kematian dan buruknya kesehatan ibu dan bayi.

4.7 Konsep Ketimpangan

Pembangunan ekonomi merupakan suatu tekad masyarakat untuk berupaya mencapai kehidupan yang lebih baik dalam peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok, peningkatan standar hidup secara ekonomis dan sosial (Todaro, 2006). Menurut Sukirno (2014), pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan daerah sebenarnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan nasional menentukan GNP *(Gross National Product)* yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Namun masalah dasarnya bukan hanya bagaimana mendistribusikan GNP, tetapi juga siapakah yang akan menumbuhkan GNP, sebagian besar masyarakat yang ada di dalam sebuah negara ataukah hanya segelintir orang yang ada di dalamnya. Jika yang menumbuhkan hanyalah orang - orang kaya yang berjumlah sedikit, maka manfaat pertumbuhan GNP itu pun hanya akan dinikmati oleh mereka saja, sehingga ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Namun apabila pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, maka mereka pulalah yang akan memperoleh manfaat terbesarnya dan hasil pertumbuhan ekonomi akan terbagi secara lebih adil dan merata (Todaro dan Smith, 2004).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regoinal Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi yang cepat maka akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan, hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut

lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Dampak dari terjadinya ketimpangan dapat berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Dampak positif dari ketimpangan yaitu dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya sehingga akan tercapai kesejahteraannya. Dampak negatif dari ketimpangan antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi akan sering dipandang tidak adil (Todaro, 2006).

Dampak negatif ketimpangan inilah yang akan menjadi masalah pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ketimpangan antar wilayah *(regional disparity)* muncul karena tidak meratanya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan antar wilayah yaitu adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang kurang maju. Adanya desentralisasi juga mendorong kesenjangan antar wilayah semakin melebar.

Pada umumnya di negara – negara sedang berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional maka pesoalan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan merupakan dimensi yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini terutama untuk melihat tingkat pendapatan dan pembagian pendapatan diantara warga masyarakatnya yaitu siapa yang mendapatkan dan siapa yang beruntung. Aspek ini semakin menarik, terutama dikaitkan dengan masih besarnya rakyat miskin di Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Berbicara perihal kemiskinan maka secara langsung (eksplisit) maupun tidak langsung (Implisit) telah membicarakan tentang ketimpangan distribusi pendapatan penduduk.

Menurut Jhingan (2003) dalam teori Myrdal, ketimpangan berkaitan erat dengan adanya sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba ini yang menjadikan berkembangnya pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah yang mempunyai harapan laba tinggi, sementara itu wilayah-wilayah yang lain akan tetap terlantar. Ketidakmerataan pembangunan yang mengakibatkan ketimpangan ini disebabkan karena adanya dampak balik (backwash effect) yang lebih tinggi daripada

dampak sebar (spread effect). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dampak balik pada suatu wilayah salah satunya adalah investasi.

Investasi adalah perpindahan modal dimana akan cenderung meningkatkan ketimpangan. Di wilayah yang maju, permintaan yang meningkat akan merangsang pertumbuhan investasi yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan dan menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Investasi hanya akan terjadi pada lingkup tertentu sehingga akan menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Myrdal dalam Jhingan, 2003). Kelangkaan modal ini yang akan menyebabkan ketimpangan antara wilayah yang maju dengan wilayah terbelakang.

Selain investasi, salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah yaitu pola pemusatan (aglomerasi) dimana terdapat berbagai jenis industri di suatu tempat tertentu. Untuk menganalisis pertumbuhan suatu wilayah maka harusdipahami mengenai kekuatan aglomerasi, manfaat yang ditimbulkan dari aglomerasi tersebut, salah satunya adalah penghematan skala (scale economies), yaitu terdapat penghematan dalam produksi secara internal bila skala produksinya ditingkatkan. Biaya tetap yang besar merupakan akibat dari investasi dalam bentuk pabrik dan peralatan yang memungkinkan akan dapat dilakukan pemanfaatan pabrik dan peralatan dalam skala besar sehingga dapat membagi beban biaya tetap pada berbagai unit yang terdapat dalam sistem produksi (Siahaan, 2010).

Industri akan cenderung terpusat pada daerah yang memiliki potensi besar dengan akses yang cepat untuk memperoleh bahan baku. Kota pada umumnya menawarkan kelebihan dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, menarik untukmelakukan investasi baru dan teknologi, melihat dari hal tersebut maka banyak industri yang tumbuh dalam perkotaan. Persebaran industri yang tidak merata maka dapat menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah, karena hanya terkonsentrasi pada daerah tertentu.

Selain investasi dan aglomerasi, ada lagi beberapa faktor yang mempengaruhi ketimpangan antar wilayah. Menurut Lessmann (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah diantaranya yaitu pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Dalam penelitian Lessmann (2006) yang berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah menjelaskan bahwa tingkat pengangguran berhubungan positif dengan ketimpangan wilayah.

Menurut Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan perkapita;
2) Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang;
3) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4) Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran;
5) Rendahnya mobilitas sosial;
6) Pelaksanaan kebijakan indusri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri untuk melindungi usaha golongan kapitalis;
7) Kondisi memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara yang sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju, sebagai akibat ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap ekspor negara yang sedang berkembang;
8) Hancurnya industi-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain sebagainya.

4.8 Mengukur Ketimpangan

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan, terutama di negara - negara sedang berkembang.

1. Distribusi Antar Kelompok

Distribusi pendapatan perseorangan *(personal distribution of income)* atau distribusi antar kelompok pendapatan *(size distribution of income)* merupakan indikator yang paling sering digunakan. Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterimah oleh setiap individu atau rumah tangga. Yang perlu diperhatikan disini adalah seberapa banyak jumlah pendapatan yang diterimah

seseorang, tidak peduli dari mana sumbernya, baik itu dari bunga simpanan maupun tabungan, laba usaha, utang, hadiah atapun warisan. Lokasi sumber penghasilan(desa atau kota) maupun sektor atau bidang kegiatan yang menjadi sumber penghasilan juga diabaikan (Todaro, 2006).

Oleh karena itu, para ekonom dan ahli statistik cenderung mengurutkan semua individu berdasarkan pendapatan yang diterimanya, kemudian membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran, biasanya populasi dibagi menjadi 5 kelompok atau kuantil (quantile) atau 10 kelompok yang disebut desil (decile) sesuai dengan tingkat pendapatan mereka. Langkah selanjutnya adalah menetapkan beberapa proporsi yang ditentukan oleh masing - masing kelompok dari pendapatan nasional total (Todaro dan Smith, 2004).

2. Kurva Lorenz

Metode lain yang biasanya dipakai untuk menganalisis statistik pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan Kurva Lorenz *(Lorenz Curve)*. Jumlah penerimaan pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolut melainkan dalam persentase komulatif. Garis diagonal dalam Kurva Lorenz malambangkan pemerataan sempurna *(perfect equality)* dalam distribusi antar kelompok pendapatan masing-masing persentase kelompok penerima pendapatan menerima persentase pendapatan total yang sama besarnya, contohnya 40% kelompok terbawah menerima 40% dari pendapatan total, sedangkan 5% kelompok teratas hanya menerima 5% dari pendapatan total (Todaro dan Smith, 2004).

Gambar 4.1. Kurva Lorenz

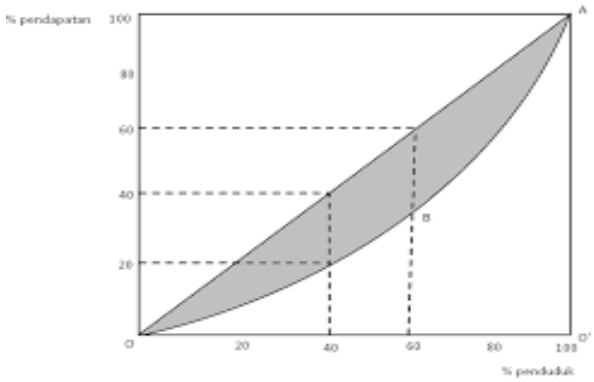

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang benar - benar

mereka terima, misalnya dalam satu tahun. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dengan garis diagonal (garis pemerataan sempurna) maka semakin timpang atau tidak meratanya distribusi pendapatan. Semakin tinggi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan disuatu negara maka bentuk kurva lorenznya pun akan semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah. Dua macam bentuk kurva Lorenz yang melambangkan kondisi distribusi pendapatan yang jauh berbeda dapat dilihat pada gambar 4.2. Gambar. 4.2a. menunjukan suatu distribusi pendapatan yang relatif merata (ketimpangan tidak parah), sedangkan gambar.

4.2.b. menunjukan suatu distribusi pendapatan yang relatif tidak merata (ketimpangan parah)

Gambar 4.2

Gambar 4.2a Gambar 4.2b

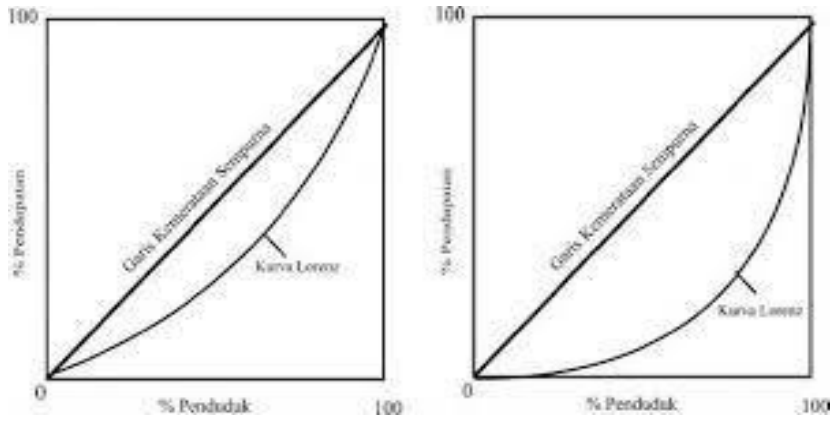

Sumber : Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith (2004)

3. Koefisien Gini

Alat ukur atau media yang sangat mudah digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan relatif disuatu negara adalah dengan menghitung rasio yang terletak diantara garis diagonal dari Kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh segi empat dimana kurva Lorenz itu berada. Dalam gambar. 4.3., rasio ini adalah rasio daerah A yang diarsir dibagi dengan luas segitiga BCD. Rasio ini dikenal dengan Koefisien Gini (Gini Coefficient) yang diambil dari nama ahli statistik Italia yang bernama C. Gini yang merumuskan pertama kali pada tahun 1912 (Todaro dan Smith, 2004:226)

Gambar. 4.3. Koefisien Gini

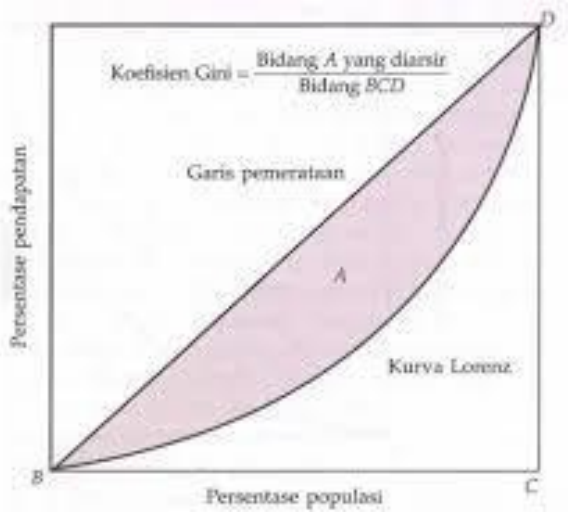

Nilai Koefisien (x)	Distribusi Pendapatan
x = 0	Merata sempurna
0 < x < 0,4	Tingkat ketimpangan rendah
0,4 < x < 0,5	Tingkat ketimpangan sedang
0,5 < x < 1	Tingkat ketimpangan tinggi
x = 1	Tidak merata sempurna (dikuasai oleh satu pihak)

Koefisien Gini merupakan ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna), hingga satu (ketimpangan sempurna). Pada prateknya Koefisien Gini untuk negara - negara yang derajat ketimpangannya tinggi berkisar antara 0,50 hingga 0,70, ketimpangan sedang berkisar antara 0,36 hingga 0,49 sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya relatif merata angkanya berkisar antara 0,20 hingga 0,35 (Todaro dan Smith, 2004).

4. Distribusi Fungsional (Functional Distribution)

Ukuran distribusi pendapatan fungsional berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterimah oleh masing - masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja dan modal). Teori distribusi fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan bukan sebagai unit - unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentu sewa, bunga dan laba.

Walaupun individu - individu tertentu mungkin saja menerimah seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu bukanlah fokus perhatian dari analisis pedekatan fungsional itu (Todaro dan Smith, 2004).

4.9 Penyebab Kemiskinan

Tidak sulit mencari faktor - faktor penyebab kemiskinan, tetapi dari faktor - faktor tersebut sangat sulit memastikan mana yang merupakan penyebab sebenarnya atau utama serta mana yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap perubahan kemiskinan (Tambunan, 2011). Sebagai suatu contoh, sering dikatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Seseorang hanya dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan, terutama disektor modern (formal) dengan pendapatan yang baik. Akan tetapi, pertanyaanya adalah apakah tingkat pendidikan yang rendah itu adalah penyebab utama/sebenarnaya. Apabila banyak orang di Indonesia hanya berpendidikan sekolah dasar (SD) karena orang tua mereka tidak sanggup membiayai pendidikan lanjutan, maka jelas penyebab sebenarnya adalah masalah biaya atau lebih tepatnya lagi disebabkan oleh kemiskinan (orang tua mereka) kalau diteruskan kebelakang, pertanyaan selanjutnya adalah: kenapa orang tua mereka miskin dan kenapa juga pendidikanya rendah. Jadi terdapat semacam lingkaran setan (vicious circle)dalam masalah timbulnya kemiskinan.

Kalau diuraikan satu per satu, jumlah faktor - faktor yang dapat mempengarui langsung maupun tidak langsung tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja), tingkat upah, distribusi pendapatan, kesempatan kerja (termasuk jenis pekerjaan yang tersedia), tingkat inflasi, pajak dan subsidi, investasi, alokasi serta kualitas sumberdaya alam, ketersediaan fasilitas umum (seperti pendidikan dasar, kesehatan, informasi, trasportasi, listrik, air dan lokasi pemukiman), penggunaan teknologi, tingkat dan jenis pendidikan, kondisi fisik dan alam disuatu wilayah, etos kerja dan motivasi kerja, kultur budaya/tradisi, politik, bencana alam dan peperangan.

Dilihat dari sektoral, pusat kemiskinan di Indonesia terdapat disektor pertanian. Kemungkinan ada tiga faktor penyebab utama mengapa sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia, yaitu (Tambunan, 2011): Pertama, tingkat

produktivitas yang rendah, disebabkan karena jumlah pekerja disektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, teknologi terbatas dan tingkat pendidikan petani yang rata - rata sangat rendah. Kedua, daya saing petani atau daya tukar domestik (trem of treade) antara komoditi pertanian terhadap hasil output industri semakin lemah. Perbedaan harga ini disebabkan antara lain oleh perbedaan nilai tambah antara hasil pertanian dan hasil industri serta tata niaga yang lebih mengutungkan produsen disektor industri. Ketiga, tingkat diverifikasi usaha di sektorpertanian ke jenis - jenis komoditi non food yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

4.10 Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan memang tidak mudah untuk mengukurnya. Ada dua macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.

1. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan harga dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut, konsep ini dimasudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenui kebutuhan fisik, makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2004).

2. Kemiskinan Relatif

Secara sederhana kemiskinan relatif dapat dilihat dengan memperbandingkan proporsi atau persentase penduduk yang berada pada dan dibawah garis kemiskinan absolut dengan jumlah penduduk keseluruhan. Untuk lebih memperoleh gambaran sesunggunya tentang tingkat kemiskinan relatif atau pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui distribusi pendapatan.

4.11 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan ada bermacam - macam, yaitu: konsumsi beras per kapita pertahun, tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraan.

1. Tingkat Konsumsi Beras

   Untuk kepentingan pengentasan kemiskinan dan penentuan masyarakat yang miskin di bentuk pula konsep pengukuran kemiskinan. Sajogyo dan Pudjiwati (2002) mengukur garis kemiskinan dengan mengunakan ukuran nyata, yakni setara nilai tukar beras, dan tidak menggunakan ukuran moneter. Alasanya karena beras merupakan pengeluaran konsumsi terbesar bagi penduduk Indonesia yang tergolong miskin untuk daerah pedesaan, penduduk dengan konsumsi beras kurang dari 320 Kgper kapita pertahun digolongkan miskin sedangkan untuk daerah perkotaan adalah 480 Kg per kapita pertahun. Kritik terhadap metode Sajogyo adalah bahwa beras bukanlah merupakan bahan makanan pokok bagi penduduk pedesaan yang miskin.

2. Tingkat Pendapatan

   Tingkat pendapatan per kapita rumah tangga adalah pendapatan total anggota rumah tangga yang bekerja dalam setahun dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga. Menurut BPS, pada tahun 2006 garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp.175.324,- per kapita perbulan dan penduduk miskin pedesaan sebesar Rp.131.256,- per kapita perbulan. Dengan uang senilai tersebut seseorang diasumsikan dapat memenui kebutuhan konsumsi, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti perumahan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian ukuran atau tingkat kemiskinan akan diukur dengan melihat besarnya pendapatan dan konsumsi pengeluaran rumah tangga per kapita. Tingkat pengeluaran per kapita perbulan diukur dengan besaran rupiah dan selanjutnya dengan menggunakan kriteria BPS ditetapkan tingkat/garis kemiskinan yang setiap tahun besarnya disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi dan harga barang - barang.

4.11 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Selain data pendapatan dan pengeluaran, ada beberapa komponen tingkat kesejahteraan rakyat yang sering di gunakan. Pada publikasi united nations yang

berjudul international definition and meansurement of levels af living: an interm guide, di sarankan ada 9 komponen kesejahteraan rakyat yaitu: kesehatan, konsumsi makan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan, jaminan sosial, sandang, rekreasi dan kebebasan.

1. Kriteria Bank Dunia (World Bank)

Selain Kurva Lorenz dan Koefisien Gini, cara pengukuran lainnya yang juga umum digunakan terutama oleh Bank Dunia (World Bank), adalah dengan cara jumlah penduduk dikelompokan menjadi 3 kelompok, yaitu penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% dan penduduk dengan berpendapatan menengah yang merupakan 40% dan jumlah penduduk berpendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk. Selanjutnya ketidak merataan pendapatan pada suatu perekonomian diukur berdasarkan pendapatan yang dinikmati oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah. Menurut Bank Dunia (Word Bank), tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi apabila 40% penduduk dari kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan, tingkat ketidakmerataan sedang apabila kelompok tersebut menerima 12% - 17% dari jumlah pendapatan dan tingkat ketidakmerataan rendah apabila kelompok tersebut menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Sejak tahun 1990 United Nations for Development Program (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Indeks =HDI). Indikator - indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah:

(1) tingkat harapan hidup;

(2) tingkat melek hurup masyarakat, dan

(3) tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing - masing negara (Arsyad, 2004).

Komponen - komponen Indeks Pembangunan Manusia dapat dilihat berdasarkan batas maksimum dan minimum pada tabel. dibawah ini.

Tabel 4.1 Nilai Maksimum dan Minimum dari setiap Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Komponen IPM	Maksimum	Minimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
2. Angka Melek Hurup	100	0	Standar UNDP
3. Rata-Rata Lama Sekolah	15	0	
4. Daya Beli	732.720[a)]	300.000 (1996)	UNDP
	$40.000[c)]	360.000[b)] (1999,2002)	menggunakan PDB Riil disesuaikan
		$100[c)]	

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007; BPS

Keterangan: a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyusuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

c) Standar UNDP

Berdasarkan tabel di atas dengan melihat komponen indeks angka harapan hidup, angka melek huruf, rata - rata lama sekolah dan daya beli (PDB riil disesuaikan), kita dapat menurunkan rumus perhitungan Human Development Indeks (HDI) dengan menghitung terlebih dahulu indeks (komponen - komponen HDI) sebagai berikut:

Indeks $X_{(i)} = [\ X_{(i)} - X_{(i)\ min}\ ]/[X_{(i)\ max} - X_{(i)\ min}\ ]$

Di mana:

$X_{(i)}$: Indikator ke-i (i=1,2,3);

$X_{(i)\ max}$: nilai maksimum $X_{(i)}$,

$X_{(i)\ min}$: nilai minimum $X_{(i)}$.

Berdasarkan prosedur di atas, maka HDI dapat dihitung dengan persamaan berikut ini :

$HDI = 1/3\ [\ X_{(1)} + X_{(2)} + X_{(3)}\ ]$

Di mana:

$X_{(1)}$ = Indeks harapan hidup kelahiran

$X_{(2)}$ = Indeks pendidikan = 2/3 (indeks melek huruf) + 1/3 (indeks rata - rata

lama sekolah)

$X_{(3)}$ = Indeks standar hidup layak.

Pengukuran HDI telah mengalami beberapa perubahan sejak pertama kali dicetuskan. Mungkin yang terpenting adalah bahwa indeks tersebut telah disederhanakan sehingga sekarang HDI dihitung secara lebih langsung. Khususnya dimasa lampau rumus yang relatif lebih rumit digunakan untuk mengkonversi Purchasing Power Parity (PPP) menjadi pendapatan yang disesuaikan (yang berarti bahwa pendapatan disesuaikan demi memenuhi asumsi utilitas marjinal yang semakin menurun). Sekarang, kita memperoleh pendapatan yang disesuaikan hanya dengan menghitung log natural dari pendapatan saat ini. Kemudian untuk menemukan indeks pendapatan kurangi log natural 100 dari log natural pendapatan saat ini karena diyakini bahwa pendapatan per kapita paling rendah yang mungkin terdapat disemua negara selama generasi yang lalu adalah PPP $100. Perbedaannya mencerminkan seberapa jauh negara yang bersangkutan telah melampaui pos tujuan terendah ini. Untuk mendapatkan perspektif dari kemajuan ini, pikirkan dalam hubungannya dengan jumlah maksimum pendapatan yang dapat dicapai sebuah negara untuk generasi berikut.

UNDP mematok angka $40.000. Jadi kemudian kita membagi perbedaanantara log $40.000 dengan log $100 untuk mengetahui kemajuan pendapatan relatif yang berhasil dicapai oleh sebuah negara (Todaro dan Smith, 2006; 73). Sehingga komponen-komponen perhitungan HDI dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pendapatan} = \frac{[\log(\text{GDP perkapita}) - \text{Log}\,(100)]}{[\ \text{Log}\,(4000) - \text{Log}\,(100)]}$$

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{[\ \text{Usia Harapan Hidup} - 25\ ]}{85 - 25}$$

$$\text{Indeks Pendidikan} = \frac{2}{3}(\text{indeks kemampuan baca tulis orang dewasa}) + \frac{1}{3}(\text{Indeks}$$

Dimana indeks kemampuan baca tulis orang dewasa dan indeks masa bersekolah bruto dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Indek kemampuan baca tulis orang dewasa} = \frac{[\%\ \text{kemampuan baca orang dewasa} - 0]}{[100 - 0]}$$

$$\text{Indek masa sekolah bruto} = \frac{[\%\ \text{penduduk usia sekolah yang bersekolah} - 0]}{[100 - 0]}$$

Dengan menggunakan ketiga ukuran pembangunan dan menerapkan rumus tersebut untuk menghitung data dari 177 negara, HDI memeringkat semua negara menjadi tiga kelompok: tingkat pembangunan manusia yang rendah (0,0 hingga 0,499), tingkat pembangunan manusia menengah (0,50 hingga 0,799), dan tingkat pembangunan manusia yang tinggi (0,80 hingga 1,0) (Todaro dan Smith, 2006; 73)

4.12 Bahan Diskusi

Pada Maret 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,389. Angka ini menurun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,391. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,393 turun sebesar 0,004 poin. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,401,turun dibanding Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,404 dan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0,407. Sementara itu, Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,324, naik sebesar 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 dan September 2017 yang sebesar 0,320. Pada Maret 2018, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 17,29 persen. Artinya pengeluaran penduduk berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 16,47 persen yang artinya berada pada kategori ketimpangan sedang. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,15 persen, yang berarti masuk dalam kategori ketimpangan rendah (sumber : maret 2018 (www.bps.go.id)).

Dalam menghitung gini ratio, BPS membagi penduduk Indonesia jadi tiga kelompok, yakni penduduk 40 persen terbawah, penduduk 40 persen menengah, dan

penduduk 20 persen teratas. Menurut BPS, faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam kurun waktu September 2017-Maret 2018 ialah karena kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah secara nasional, baik di perkotaan maupun pedesaan, yang lebihcepat. Kendati demikian, BPS menemukan bahwa kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah di pedesaan masih lebih lambat ketimbang kelompok teratasnya.

Pertanyaan Diskusi

Jika kita perhatikan terjadi trend penurunan ketimpangan terjadi secara signifikan di Indonesia pada rentang tahun 2017-2018. Namun, Berdasarkan data BPS yang dirilis pada (16/7/2018), sebanyak 8 provinsi masih memiliki gini ratio yang di atas gini ratio Indonesia. Adapun gini ratio tertinggi tercatat di Daerah Istimewa Yogyakarta (0,441). Berturut-turut setelahnya, ada Sulawesi Tenggara (0,409), Jawa Barat (0,407),Gorontalo (0,403), Sulawesi Selatan (0,397), Papua Barat (0,394), Sulawesi Utara (0,394), dan DKI Jakarta (0,394).

Ketimpangan memang merupakan persoalan yang multidimensional. Namun demikian, upaya-upaya untuk mengurangi angka ketimpangan di Indonesia perlu dilakukan. Coba diskusikan upaya apa saja yang ideal serta sesuai dilakukan untuk mengurangi tingkat ketimpangan di Indonesia?

Jawaban Diskusi :

.....

.....

.....

4.13Latihan Soal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan pengertian dari kemiskinan!

   Jawab:

   .....

   .....

2. Jelaskan tentangketimpangandistribusi pendapatandalamsuatu negara!

   Jawab:

   .....

   .....

3. Batasan yang dipakai sebagai ukuran yang diguanakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan di dalam suatu Negaradan kemiskinanrelatif antar Negaradisebut denganapa? Jawab:

   .....

   .....

4. Jelaskan yang dimaksud dengan kemiskinan absolute dan kesenjangan kemiskinan seberapa besar perbedaan ukuran dengan indeks kemiskinan manusia UNDP ? Jawab:

   .....

   .....

5. Mengapa kemiskinan dan ketimpangan pendapatan menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi?

   Jawab:

   .....

   .....

BAB 5

Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi

Lingkup pembahasan dalam bab 5 ini secara menyeluruh di antaranya membahas tentang:

1. **Pendahuluan**
2. **Masalah Dasar Pertumbuhan Penduduk di Negara Berkembang**
3. **Konsekuensi dari Tingginya Tingkat Fertilitas**
4. **Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Fertilitas**
5. **Latihan Soal**

KAD 7 : mahasiswa dapat menganalisis tentang masalah dasar pertumbuhan penduduk di Negara Berkembang, konsekuensi dari tingginya tingkat fertilitas serta faktor penyebab tingginya tingkat fertilitas.

KAD 8: mahasiswa dapat menganalisis tentang pendekatan kebijakan pengontrolan pertumbuhan penduduk di negara sedang berkembang

---

5.1 Pendahuluan

Semua negara yang ada di dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang tentu ingin melaksanakan pembangunan ekonomi. Salah satu tujuan melaksanakan pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan pendapatan riil per kapita atau paling tidak mempertahankan tingkat pendapatan yang telah dicapai. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya agar setaraf dengan tingkat hidup di negara maju. Namun kenyataannya, negara-negara sedang berkembang taraf hidupnya masih ketinggalan

jauh, apabila dibandingkan dengan negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena adanya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang.

5.2 Masalah Dasar Pertumbuhan Penduduk di Negara Berkembang

Ada tiga permasalahan dasar/pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang. Tiga permasalahan dasar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah: 1. berkembangnya ketidakmerataan pendapatan; 2. kemiskinan; 3. gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Titik perhatian utama permasalahan dasar pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, menurut Irma Adelman Cynthia Taft Morris (1993) adalah sebagai berikut:

1. Menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi, dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar-daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal *(capital intensive)* sehingga persentase pendapatan dari modal lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat, seperti pertukangan, industri rumah tangga.

Negara sedang berkembang, distribusi pendapatannya kurang merata dibandingkan di negara-negara maju. Semakin maju suatu negara maka distribusi pendapatannya akan semakin merata. Salah satu ukuran dari distribusi pendapatan dapat dilihat dari kurva Lorenz. Di samping kurva Lorenz, koefisien Gini sering dipakai untuk mengukur merata tidaknya distribusi pendapatan di suatu daerah/negara.

Permasalahan dasar yang kedua adalah kemiskinan. Pada tahun 1990 yang lalu, perhatian masyarakat terhadap masalah kemiskinan kembali dibicarakan. Perhatian tersebut berawal dari pernyataan Bank Dunia (1990), di media massa yang memuji keberhasilan Indonesia dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Andre Bayo Ala, 1981, kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, keterampilan, dan aspek sekunder yang berupa miskin jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut, termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Kemiskinan dapat diamati sebagai kondisi anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai, sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Oleh karena itu, kemiskinan di samping merupakan masalah yang muncul dalam masyarakat bertalian dengan pemilikan faktor produksi, produktivitas dan tingkat perkembangan masyarakat sendiri, juga bertalian dengan kebijakan pembangunan nasional yang dilaksanakan. Dengan kata lain, kemiskinan ini dapat ditimbulkan oleh dua hal, yaitu:

1. Kemiskinan yang bersifat alamiah atau kultural, dan
2. Kemiskinan yang disebabkan oleh miskinnya strategi dan kebijakan pembangunan yang ada, yang biasa disebut dengan kemiskinan struktural.

Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat tersebut tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka (Selo Sumardjan, 1980). Sedangkan kemiskinan alamiah atau kultural merupakan kemiskinan yang

disebabkan karena suatu negara tersebut memang miskin. Jadi suatu negara itu secara alamiah memang sudah miskin. Penyebab kemiskinan yang bersifat alamiah ini biasanya disebut dengan lingkaran setan yang tidak berwujud pangkal atau lingkaran perangkap kemiskinan *(the vicious circles)*.

Yang dimaksud dengan lingkaran perangkap kemiskinan *(the vicious circles)* adalah suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa, sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Dalam mengemukakan teorinya tentang perangkap kemiskinan, pada hakikatnya Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu, yang dapat menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan hal tersebut, Nurkse mengatakan bahwa "suatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin *(A Country is poor because it is poor).* Menurut Nurkse, lingkaran perangkap kemiskinan merupakan penyebab timbulnya pembentukan modal yang tinggi. Di satu pihak pembentukan modal ditentukan oleh tingkat tabungan dan dilain pihak oleh perangsang untuk menanamkan modal. Untuk negara sedang berkembang, keadaan kedua faktor tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Menurut Nurkse, terdapat dua jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara-negara sedang berkembang untuk mencapai tingkat pembangunan yang pesat, yaitu

1. dari segi penawaran modal,
2. dari segi permintaan modal.

Dilihat dari segi penawaran modal, lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan sebagai berikut: Tingkat pendapatan yang rendah disebabkan oleh produktivitas yang rendah, produktivitas yang rendah menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan menabung yang rendah akan menyebabkan tingkat pembentukan modal rendah, sehingga akan menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan modal dan dengan demikian produktivitasnya akan rendah.

Sedangkan dilihat dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan mempunyai bentuk yang agak berbeda. Dari segi permintaan modal, lingkaran perangkap kemiskinan dinyatakan sebagai berikut: di negara miskin perangsang untuk melaksanakan penawaran modal adalah rendah, hal ini disebabkan karena luasnya pasar untuk berbagai jenis barang terbatas. Terbatasnya luas pasar disebabkan karena pendapatan masyarakat rendah. Pendapatan yang rendah disebabkan karena produktivitas rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan karena modal yang terbatas pada masa lalu, pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal.

Di bagian lain Nurkse mengatakan, bahwa peningkatan pembentukan modal bukan hanya ditentukan oleh lingkaran perangkap kemiskinan, tetapi juga disebabkan oleh *International Demonstration Effect.* I*nternational demonstration effect* merupakan kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang sudah maju. Negara maju adalah suatu negara dimana masyarakatnya biasa hidup di lingkungan industri, sehingga pola konsumsinya terdiri dari barang-barang industri. Dengan semakin berkembangnya teknologi dan komunikasi, memungkinkan penduduk negara sedang berkembang untuk mengimpor dan mengonsumsi barang-barang industri,yang mutu dan harganya jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara sedang berkembang. Dengan demikian, akan menyebabkan pengeluaran penduduk negara sedang berkembang meningkat. Bertambahnya pengeluaran konsumsi tersebut, akan mengurangi jumlah tabungan yang dikerahkan negara sedang berkembang untuk membiayai pembentukan modal yang akan mempertinggi kemampuan mereka menghasilkan produksi nasional. Apabila ini berlaku maka *international demonstration effect* akan memperburuk lagi keadaan lingkaran perangkap kemiskinan yang dihadapi oleh negara sedang berkembang.

Di samping kedua lingkaran perangkap kemiskinan di atas, Meier dan Baldwin, mengemukakan pula suatu perangkap kemiskinan yang lain. Perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan saling mempengaruhi di antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, dalam suatu masyarakat harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi. Di negara-negara sedang berkembang kekayaan

alam belumlah sepenuhnya dikembangkan dan diusahakan, hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat masih rendah, kurangnya tenaga-tenaga ahli yang diperlukan dan karena terbatasnya mobilitas dari sumber-sumber daya. Kenyataan ini di berbagai negara menunjukkan bahwa makin kurang berkembang keadaan sosial ekonomi suatu negara, makin lebih terbatas jumlah sumber-sumber daya, kekayaanalam yang dimiliki belum sepenuhnya dikembangkan, dan tingkat pembangunan masyarakat tersebut adalah rendah.

Apabila dirangkum, analisis mengenai penghambat pembangunan ekonomi yang diuraikan di atas, maka pada hakikatnya teori perangkap kemiskinan berpendapat bahwa keterlambatan pembangunan ekonomi disebabkan karena:

1. Ketidakmampuan untuk mengerahkan tabungan yang cukup.
2. Kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal.
3. Taraf pendidikan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat relatif rendah.

Permasalahan dasar yang ketiga adalah adanya jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang, di mana sering dikatakan bahwa negara kaya akan semakin kaya dan negara miskin akan semakin miskin karena semakin banyak jumlah anak-anak yang menjadi tanggungan. Bagi negara sedang berkembang, pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup agar dapat setara dengan tingkat hidup negara-negara maju. Sebab jika tidak melaksanakan pembangunan antara negara kaya dengan negara miskin semakin jauh. Oleh karena itu, tidak aneh kalau kemudian dikatakan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, karena di negara sedang berkembang angka beban tanggungannya semakin besar. Hal tersebut terjadi karena di negara sedang berkembang memiliki beberapa karakteristik yang kurang mendukung untuk maju, antara lain: pendapatan riil perkapita rendah, makan, pakaian, perumahan kurang memenuhi syarat kesehatan, struktur masyarakat yang statis, masih adanya sikap hidup yang primitif, penduduknya tidak kreatif, sektor pertanian kurang produktif, padahal sektor pertanian ini merupakan mata pencaharian terpenting bagi sebagian besar penduduk. Beberapa karakteristik inilah yang menyebabkan negara sedang berkembang tidak mudah melaksanakan pembangunan ekonomi. Sampai saat ini negara sedang berkembang tetap miskin, sehingga jurang antara negara sedang berkembang dengan negara maju semakin lebar.

Di samping beberapa karakteristik yang dimiliki negara sedang berkembang tersebut, ada beberapa faktor lain yang merupakan penghambat bagi pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang antara lain adalah:

1. Dualisme Ekonomi

Berlakunya dualisme ekonomi di negara sedang berkembang merupakan salah satu faktor terlambatnya pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang. Dualisme ekonomi merupakan dua sistem ekonomi yang berbeda yaitu satu sistem ekonomi yang sudah modem dan sistem ekonomi yang masih tradisional, yang hidup bersama berdampingan dalam satu wilayah atau negara tertentu. Hampir semua negara sedang berkembang menghadapi dualisme ekonomi, yaitu di daerah perkotaan perekonomiannya sudah maju, serba modem dan uang sebagai alat pertukarannya, sedangkan di sisi lain daerah pedesaan perekonomiannya masih tradisional (*subsistence*), dan biasanya pertukaran masih dilakukan dengan sistem barter. Masih adanya beberapa daerah terpencil yang hingga sekarang belum pernah mengadakan kontak dengan dunia luar, artinya belum mengadakan pertukaran dengan daerah luar. Sedangkan di daerah yang potensial tambang/perkebunan, terkadang sudah terdapat "daerah kantong bagi industri asing" *(foreign enclave industry)* yang menciptakan triplisme di daerah pedesaan, sebab perekonomian daerah kantong asing justru sudah pada tingkat ekonomi kapitalis tinggi. Aspek penting dalam dualisme ekonomi itu:

a. Perekonomian Pasar (The Market Economy)

Sistem perekonomian pasar pada umumnya berada di daerah perkotaan. Daerah perkotaan ini biasanya merupakan sentral pemerintahan, sehingga banyak gedung-gedung pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya. Sedangkan yang tinggal di kota-kota pun biasanya mereka yang tergolong pada *"White Collar Workers"* yaitu para pekerja kantor yang terdiri dari pegawai negeri, guru, dokter, selain itu juga para pedagang. Sehingga meskipun pekerjaan mereka masih sederhana, tetapi sudah cenderung melakukan spesialisasi kerja. Tingkat upah di daerah ini cenderung lebih tinggi daripada di daerah pedesaan, karena biasanya terdiri dari para pekerja yang sudah terdidik. Dalam sistem tersebut sudah menggunakan uang sebagai alat tukar menukar.

b. Perekonomian Subsisten

Aspek kedua dari dualisme adalah perekonomian *Subsistence*. Dalam sistem perekonomian ini masih ada beberapa daerah yang terpencil yang belum sempat berkomunikasi dengan pihak luar. Sistem tukar menukar/ transaksi dilakukan dengan sistem "barter" yaitu barang ditukar dengan barang. Dalam kondisi normal, perekonomian subsisten bertindak memenuhi kebutuhannya sendiri *(selfsufficient)*, dalam arti mereka melakukan kegiatan produksi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Untuk mengatasi masyarakat terasing dan statis ini, fasilitas perhubungan yang menuju ke arah tempat tersebut perlu ditingkatkan.

c. Daerah Kantong Asing (be Foreign Enclaves)

Aspek ketiga dari dualisme ekonomi adalah adanya daerah kantong asing, yaitu daerah-daerah yang masih terbelakang, tetapi sudah terdapat industri-industri dengan teknologi tinggi *capital intensive* yang tinggi. Misalnya di Venezuela, Libia dan Indonesia (Pekan Baru, Dumai) dan lain-lainnya. Sistem ekonomi di daerah kantong asing ini mirip dengan ekonomi kolonial, artinya apa yang mereka hasilkan cenderung untuk diekspor, sedangkan hubungan dengan dalam negeri hanya sebatas dalam bentuk membayar upah-upah buruh. Daerah kantong asing (*Foreign enclaves)* ini mempunyai pengaruh terhadap masyarakat yaitu dapat mendidik orang-orang setempat untuk lebih maju.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa negara-negara sedang berkembang banyak mempunyai ekonomi rangkap tiga atau *"Triple Economics"*, yaitu: perekonomian subsisten di pedesaan, perekonomian pasar di perkotaan dan daerah kantong asing di sekitar kota terpisah.

2. Iklim Tropis

Pada umumnya daerah-daerah terbelakang berada di daerah tropis, bahkan banyak teori mengatakan bahwa rendahnya produktivitas, karena adanya iklim tropis. Mengapa bisa demikian? Karena:

a. Kurangnya usaha manusia.

Kurangnya usaha manusia ini disebabkan karena dalam iklim tropis pada umumnya panas dan lembab, kondisi ini menyebabkan manusia cepat lelah.

Selain itu karena di daerah tropis berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik sekalipun pemeliharaannya kurang begitu baik. Bahkan dapat diibaratkan bagaikan "tongkat kayu dan batu jadi tanaman". Akibatnya manusia tidak pernah tertantang oleh keadaan maka menjadikan mereka cenderung pasif, bahkan lebih pasrah dan nerimo (dalam bahasa Jawa). Pada umumnya seseorang akan berusahakeras dan kreatif kalau sudah terjerumus pada berbagai kesulitan. Berbeda dengan orang-orang yang hidup di daerah yang beriklim dingin, mereka selalu kreatif, berusaha menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk persediaan nanti di musim sukar (dingin).

b. Banyak penyakit

Di daerah tropis berbagai tanaman bisa hidup dengan baik, namun berbagai jenis penyakit pun juga dapat hidup dan berkembang dengan baik pula.

c. Keadaan pertanian tidak menguntungkan

Di satu sisi iklim tropis menyuburkan tanah, tetapi di sisi lain hujan yang berlebihan dapat melarutkan unsur hara tanah, karena erosi, sehingga tanah menjadi miskin (tandus). Selain itu juga dapat menyebabkan gagalnya panen (untuk daerah tertentu), karena terlanda banjir sampai beberapa hari/minggu dan banyaknya jenis hama/penyakit tanaman, misalnya: hama wereng yang sangat menakutkan bagi para petani Indonesia.

3. Kebudayaan Tidak Ekonomis

Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalang-halangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikan tingkat hidupnya karena sering bertentangan dengan eksistensi kebudayaan/tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat, tradisi itu antara lain:

a. kesulitan-kesulitan filosofis dan agama, misalnya adanya takhayul, kepercayaan secara ekonomis cenderung boros. Karena setiap kegiatan diperlukan selamatan yang terkadang secara besar-besaran; seperti upacara tradisi, pesta perkawinan dan lain-lainnya;

b. status sosial penduduk, misalnya orang yang bertitel lebih terhormat dalam masyarakat daripada yang tidak bertitel, meski prestasinya rendah. Sebaliknya orang-orang yang berprestasi di kancah industri/perdagangan belum tentu

mendapat status yang terhormat maka ada semacam kecenderungan lebih baik menjadi "priyayi" saja, agar terhormat;

c. Tidak adanya mobilitas dalam kesempatan kerja. Hal ini karena adanya sistem kasta, agama, suku bangsa, jenis kelamin.
d. peranan keluarga. Bila seorang laki-laki telah berkeluarga, maka biasanya istri akan dibawa dan hidup bersama dengan orang tua suami. Akibatnya penghasilan suami akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan satu keluarga tersebut sehinggamereka tidak pernah mempunyai kesempatan untuk berkembang karena beban tanggungannya yang cukup banyak;
e. cengkeraman kebiasaan. Hampir semua kegiatan berdasarkan turun temurun, seolah-olah mereka terkungkung oleh tradisi yang sudah mengental dalam masyarakat dan sulit diadakan perubahan, karena dianggap sebagai penyebab malapetaka (misalnya bila ada wabah penyakit);
f. penggunaan uang *terbatas.* Dengan penggunaan uang yang terbatas ini menyebabkan orang tidak antusias untuk bekerja keras, karena jumlah dan macam konsumsi yang diperlukan terbatas. Berbeda dengan di negara-negara maju setup kegiatan bersifat profit *motive* atau *commercial oriented*. Karena dengan banyak uang mereka akan lebih terhormat dan akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan secara variatif.

4. Produktivitas Rendah

Pada umumnya produktivitas yang rendah disebabkan oleh kualitas manusia dan sumber alam negara yang bersangkutan, seperti kandungan mineral, air hujan, hutan dan sebagainya. Akan tetapi sebenarnya yang lebih urgen adalah kualitas tenaga kerjanya. Sebab kondisi alam yang kurang mendukung dapat diatasi dengan teknologi, jika kualitas angkatan kerjanya terdidik, kreatif, inovatif dan terampil, sehingga mampu membuat formulasi atau modifikasi teknik berproduksi, dari tanah kurang subur menjadi tanah yang cukup subur, dari kurang produktif menjadi lebih produktif.

5. Jumlah Kapital Sedikit

Di negara sedang berkembang kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerjanya rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah.

Rendahnya produktivitas disebabkan karena rendahnya dana kapital yang tersediadan belum diolahnya sumber-sumber alam serta keterbelakangan penduduknya. Ketiga hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat investasi baik dalam bidang *human investment* maupun *capital investment.* Kemudian rendahnya investasi disebabkan oleh lemahnya 2 kekuatan, yaitu rendahnya permintaan akan barang-barang maupun rendahnya tingkat tabungan. Sedangkan dua faktor yang terakhir ini lemah disebabkan karena rendahnya tingkat pendapatan dan rendahnya tingkat tabungan disebabkan oleh rendahnya produktivitas. Keadaan ini sering disebut dengan "lingkaran setan" *(vicious circle)*.

6.* Ketidaksempurnaan Pasar *(market imprefektion)

Ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyangkut immobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luwes, tidak memperhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah dan kurang adanya spesialisasi. Hal ini akan merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimal, sehingga banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik.

7. Tingginya Tingkat Pengangguran

Masalah pengangguran bukan hanya masalah negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Demikian pula masalah *underemployment dan disguised unemployment* kini tidak lagi monopoli di daerah pedesaan, melainkan sekarang sudah meluas ke perkotaan dalam bentuk *open employment* atau pengangguran terbuka. Adapun sebab-sebab pengangguran di kota antara lain: banyaknya tenaga kerja yang pindah dari desa ke kota dan kota tidak mampu menampung tenaga, karena kekurangan faktor produksi terutama kapital. Perpindahan tenaga kerja

tersebut berhubungan dengan *push factors dan full factors* (kekuatan yangmendorong dan menarik) perpindahan dari desa ke kota. *Push factors* itu meliputi:

a. terbatasnya kesempatan kerja di desa.

b. keinginan untuk pindah didukung sarana transportasi dan pendidikan yang lebih baik. Sedangkan *full factors* meliputi: perkembangan industri di kota-kota yang menawarkan upah jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan.

8. Tekanan Penduduk

Masalah kelebihan penduduk *(over population)* juga menjadi perintang perkembangan ekonomi, khususnya di negara-negara sedang berkembang, karena kecepatan produksi belum dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Padahal pertumbuhan penduduk yang cepat akan menuntut pertumbuhan produksi bahan makanan, sehingga usaha produksi lainnya tertunda. Karena memang ekonomi negara-negara sedang berkembang itu terdapat lingkaran setan *(vicious circle)*, yang bermula dari pertumbuhan penduduk yang cepat, maka produksi bahan makanan harus ditingkatkan dan ini akan menghisap kelebihan daya beli yang sebenarya untukmembeli barang-barang pabrik. Sehingga daya beli *output* pabrik menurun karena untuk membeli bahan makanan. Di sisi lain, kelebihan penduduk perlu ekspansi industri agar tercipta kesempatan kerja. Akibatnya akan menyedot dana tabungan yang semestinya bisa untuk investasi produksi di sektor lain, maka perkembangan ekonomi tertunda, oleh karena itu, *over* penduduk dapat diatasi dengan imigrasi, transmigrasi dan mengubah pola hidup serta dilaksanakannya program *family planning*.

9. Tanah dan Penggunaannya Kurang Efisien

Tanah yang cocok untuk pertanian merupakan faktor penting untuk perkembangan ekonomi bagi negara-negara terbelakang (berkembang). Sebagian besar (60-70%) penduduk negara sedang berkembang mata pencahariannya dari sektor pertanian,namun dilihat dari produktivitasnya masih rendah. Hal ini disebabkan oleh bermacam-macam faktor yang berkaitan dengan kondisi negara terbelakang,misalnya terbatasnya kapital, alat-alat masih sederhana, teknik produksi yang tidak efisien, permilikan tanah yang sempit. Oleh karena keadaan tersebut, maka para tuan

tanah akan mempunyai basil lebih rendah dibandingkan di negara-negara maju meskipun kondisi alamnya kurang menguntungkan. Hal ini disebabkan di negara maju faktor produksi yang dimiliki sudah maju, maka hasilnya lebih tinggi di negara-negara maju. Selain faktor tersebut di atas, rendahnya produktivitas di negara sedang berkembang juga disebabkan karena sistem "sewa tanah secara tradisional" yaitu penyewa tanah tidak punya dorongan untuk menjaga kesuburan tanah, meskipun mereka tahu, karena hanya akan menguntungkan tuan tanah. Demikian juga sistem *"Shifting Cultivation"* (perladangan berpindah-pindah) yang banyak mengakibatkan erosi tanah. Demikian juga karena satu orang memiliki tanah yang terlalu luas menyebabkan ketidakefisienan. Oleh karena itu, perlu kiranya *"land reform"* benar-benar dilaksanakan sampai ke bawah.

10. Rendahnya Tingkat Tabungan

Terbatasnya tabungan dalam negeri merupakan perintang utama bagi perkembangan perekonomian dengan cepat. Perbaikan taraf hidup secara terus-menerus dalam jangka panjang hanya dapat dijamin dengan ekspansi kapasitas produksi yang sebagian besar tergantung pada luasnya pembentukan modal ditopang bantuan luar negeri.

Namun demikian betapa pentingnya bantuan luar negeri, perkembanganekonomi yang sehat dan stabil tidak dapat didasarkan semata-mata pada kapital dari luarnegeri. Pendek kata pembangunan ekonomi sebaiknya didasarkan pada sumber-sumber ekonomi yang terdapat dalam perekonomian sendiri, sedangkan modal asing hendaknya hanya sebagai suplemen saja.

Untuk itu tabungan di negara sedang berkembang sebaiknya ditingkatkan. Usaha yang pokok yang bisa dilakukan ialah mengembangkan tabungan dalam negeri baik tabungan swasta maupun tabungan pemerintah. Pendapatan dari pajak untuk investasi sebagai tabungan paksaan, dapat pula digunakan atau penghasilan pajak dapat dipinjamkan pada sektor swasta untuk investasi.

Pada umumnya tabungan di negara sedang berkembang relatif rendah, karena rendahnya tingkat pendapatan den ini karena rendahnya produktivitas penduduk. Selain itu secara psikologis penduduk tidak mau menabung karena sering terjadi inflasi den

devaluasi serta kekurangan lembaga-lembaga yang dapat menampung simpanan/tabungan.

Menurut Lewis, tabungan sukarela akan tumbuh, apabila ketidakmerataan pembagian pendapatan disebabkan terutama oleh tingkat keuntungan wiraswasta yang tinggi. Sebaliknya, disebabkan oleh adanya pendapatan tuan tanah yang tinggi maka tabungan tak akan terdorong, karena biasanya tuan tanah tidak kreatif seperti wiraswasta dalam hal investasi.

Oleh karena itu, berhubung tabungan dalam negeri kurang, maka negara sedang berkembang harus dapat memberi daya tarik bagi investasi asing agar mau menginvestasikan modalnya di dalam negeri untuk perkembangan perekonomian. Kemudian untuk penyalurannya ke investasi produktif dapat melalui perbankan, yang kemudian pihak bank menyalurkannya kepada para petani den pedagang kecil, tetapi tetap harus diawasi agar ekspansi kredit inflator *(inflationary credit expantion)* tidak terjadi. Untuk itu sistem perbankan harus diperbaiki.

Selain itu, kapital dapat dibentuk melalui pajak, karena dengan menaikkan tarif pajak akan dapat menarik dana dari konsumsi dipindahkan ke sektor investasi yang produktif. Inflasi juga merupakan cara yang baik sebagai alat pembelanjaan pembangunan, yaitu dengan cara mengurangi konsumsi dengan menaikkan harga-harga. Dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan inflasi dengan menambah jumlah uang yang beredar. Cara ini cukup baik pada tahap awal karena akan mendorong pengusaha bekerja lebih giat menaikkan pendapatannya. Akan tetapi jika jangka panjang akan membawa penderitaan terutama bagi yang pendapatannya tetap. Lebih-lebih jika sampai terjadi *hyperinflation.* Oleh karena itu, bagaimanapun pembentukan kapital melaluiinflasi tetap merupakan pembentukan kapital *yang* salah arah *(misdirectionof capital formation).*

5.3 Konsekuensi dari Tingginya Tingkat Fertilitas

Menurut Todaro (2003), pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Pertumbuhan Penduduk dan Angkatan Kerja

   Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabenya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

2. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

5.4 Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Fertilitas

Pemerintah Indonesia telah berhasil melaksanakan program keluarga berencana sejak tahun 1971, yang ditandai dengan penurunan tingkat fertilitas dari 5,6 anak pada tahun-tahun 1970-an menjadi 2,4 anak per wanita menjelang tahun 2000. Sementara itu program kesehatan juga telah mampu meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia yang ditandai dengan penurunan tingkat kematian bayi dan peningkatan harapan hidup penduduk Indonesia. Kejadian ini menyebabkan terjadinya transisi demografi dalam jangka waktu lama yang berdampak pada perubahan struktur umur penduduk dan berkurangnya proporsi anak-anak dibawah usia 15 tahun.

Sebelum program KB dilaksanakan, angka ketergantungan penduduk Indonesia adalah 86 anak per 100 penduduk usia kerja. Artinya, pada tahun 1970-an setiap 100 pekerja mempunyai 86 anak yang menjadi tanggungannya. Pada tahun 2000 angka ketergantungan menurun menjadi 55 per 100 penduduk usia kerja. Jadi program KB selama ini telah mampu mengurangi beban penduduk usia kerja untuk menanggung anak-anak.

Jumlah Kelahiran Setiap Tahun Masih Besar, Meskipun tingkat fertilitas sudah menurun, kalau jumlah ibunya besar, sebagai akibat tingkat kelahiran yang tinggi dimasa lalu serta perbaikan kesehatan, maka jumlah bayi yang lahir setelah tahun 2000 masih tetap banyak jumlahnya. Tiap tiap tahun jumlah kelahiran bayi di Indonesia mencapai sekitar 4,5 juta bayi. Di kabupaten atau kota yang masih mempunyai tingkat fertilitas tinggi atau yang KB-nya kurang berhasil, jumlah bayi yang lahir tiap tahunnya akan lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang program KB-nya berhasil menurunkan tingkat fertilitas. Kabupaten atau kota yang masih mempunyai jumlah kelahiran yang besar akan menghadapi konsekuensi pemenuhan kebutuhan

pelayanan dasar atas kelahiran bayi-bayi ini, saat ini dan seterusnya sampai bayi-bayi ini mendapatkan perkejaan dan menjadi Ibu yang melahirkan generasi penerus.

Pengetahuan tentang fertilitas atau kelahiran dan KB serta indikator-indikatornya sangat berguna bagi para penentu kebijakan dan perencana program untuk merencanakan pembangunan sosial terutama kesejahteraan Ibu dan anak.

Ada beragam faktor yang mempengaruhi dan menentukan fertilitas baik yang berupa faktor demografi maupun faktor non-demografi. Yang berupa faktor demografi diantaranya adalah struktur umur, umur perkawinan, lama perkawinan, paritas, distrupsi perkawinan dan proporsi yang kawin sedangkan faktor non-demografi dapat berupa faktor sosial, ekonomi maupun psikologi.

1. Teori Sosiologi tentang Fertilitas (Davis dan Blake: Variabel Antara)

   Kajian tentang fertilitas pada dasarnya bermula dari disiplin sosiologi. Sebelum disiplin lain membahas secara sistematis tentang fertilitas, kajian sosiologis tentang fertilitas sudah lebih dahulu dimulai. Sudah amat lama kependudukan menjadisalah satu sub-bidang sosiologi. Sebagian besar analisa kependudukan (selain demografi formal) sesungguhnya merupakan analisis sosiologis. Davis and Blake (1956), Freedman (1962), Hawthorne (1970) telah mengembangkan berbagai kerangka teoritis tentang perilaku fertilitas yang pada hakekatnya bersifat sosiologis.

   Dalam tulisannya yang berjudul “The Social structure and fertility: an analytic framework (1956)”2 Kingsley Davis dan Judith Blake melakukan analisissosiologis tentang fertilitas. Davis and Blake mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas melalui apa yang disebut sebagai “variabel antara” (intermediate variables).

   Menurut Davis dan Blake faktor-faktor sosial, ekonomi dan budaya yang mempengaruhi fertilitas akan melalui “variabel antara”. Ada 11 variabel antara yang mempengaruhi fertilitas, yang masing-masing dikelompokkan dalam tiga tahap proses reproduksi sebagai berikut:

   Intermediate variables of fertility

   a. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan kelamin (intercouse variables):
      - Faktor-faktor yang mengatur tidak terjadinya hubungan kelamin:

1. Umur mulai hubungan kelamin
2. Selibat permanen: proporsi wanita yang tidak pernah mengadakan hubungan kelamin
3. Lamanya masa reproduksi sesudah atau diantara masa hubangan kelamin:
   i. Bila kehidupan suami istri cerai atau pisah
   ii. Bila kehidupan suami istri nerakhir karena suami meninggal dunia

- Faktor-faktor yang mengatur terjadinya hubungan kelamin
  1. Abstinensi sukarela
  2. Berpantang karena terpaksa (oleh impotensi, sakit, pisah sementara)
  3. Frekuensi hubungan seksual

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsepsi (conception variables):
   1. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak disengaja
   2. Menggunakan atau tidak menggunakan metode kontrasepsi:
      i. Menggunakan cara-cara mekanik dan bahan-bahan kimia
      ii. Menggunakan cara-cara lain
   3. Kesuburan atau kemandulan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang disengaja (sterilisasi, subinsisi, obat-obatan dan sebagainya)

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan dan kelahiran (gestation variables)
   1. Mortalitas janin yang disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengaja
   2. Mortalitas janin oleh faktor-faktor yang disengaja

Menurut Davis dan Blake, setiap variabel diatas terdapat pada semua masyarakat.Sebab masing-masing variabel memiliki pengaruh (nilai) positif dan negatifnya sendiri-sendiri terhadap fertilitas. Misalnya, jika pengguguran tidak dipraktekan maka variabel nomor 11 tersebut bernilai positif terhadap fertilitas. Artinya, fertilitas dapat meningkat karena tidak ada pengguguran. Dengan demikian ketidak-adaan variabel tersebut juga suatu masyarakat masing-masing variabel bernilai negatif atau positif maka angka kelahiran yang sebenarnya tergantung kepada neraca netto dari nilai semua variabel.

2. Ronald Freedman: Variabel Antara dan Norma Sosial

Menurut Freedman variabel antara yang mempengaruhi langsung terhadap fertilitas pada dasarnya juga dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku di suatu masyarakat. Pada akhirnya perilaku fertilitas seseorang dipengaruhi norma-norma yang ada yaitu norma tentang besarnya keluarga dan norma tentang variabel antara itu sendiri. Selanjutnya norma-norma tentang besarnya keluarga dan variabel antara di pengaruhi oleh tingkat mortalitas dan struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat.

Menurut Freedman intermediate variables yang dikemukakan Davis-Blake menjadi variabel antara yang menghubungkan antara "norma-norma fertilitas" yang sudah mapan diterima masyarakat dengan jumlah anak yang dimiliki (outcome). Ia mengemukakan bahwa "norma fertilitas" yang sudah mapan diterima oleh masyarakat dapat sesuai dengan fertilitas yang dinginkan seseorang. Selain itu, norma sosial dianggap sebagai faktor yang dominan. Secara umum Freedman mengatakan bahwa:

"Salah satu prinsip dasar sosiologi adalah bahwa bila para anggota suatu masyarakat menghadapi suatu masalah umum yang timbul berkali-kali dan membawa konsekuensi sosial yang penting, mereka cenderung menciptakansuatu cara penyelesaian normatif terhadap masalah tersebut. Cara penyelesaian ini merupakan serangkaian aturan tentang bertingkah laku dalam suatu situasi tertentu, menjadi sebagian dari kebudayaannya dan masyarakat mengindoktrinasikan kepada para anggotanya untuk menyesuaikan diri dengan norma tersebut baik melalui ganjaran (rewards) maupun hukuman (penalty)yang implisit dan eksplisit. ... Karena jumlah anak yang akan dimiliki oleh sepasang suami isteri itu merupakan masalah yang sangat universal dan penting bagi setiap masyarakat, maka akan terdapat suatu penyimpangan sosiologis apabila tidak diciptakan budaya penyelesaian yang normatif untuk mengatasi masalah ini"

Jadi norma merupakan "resep" untuk membimbing serangkaian tingkah laku tertentu pada berbagai situasi yang sama. Norma merupakan unsur kunci

dalam teori sosiologi tentang fertilitas. Dalam artikelnya yang berjudul "Theories of fertility decline: a reappraisal" (1979).

Freedman juga mengemukakan bahwa tingkat fertilitas yang cenderung terus menurun di beberapa negara pada dasarnya bukan semata-mata akibat variabel-variabel pembangunan makro seperti urbanisasi dan industrialisasi sebagaimana dikemukakan oleh model transisi demografi klasik tetapi berubahnya motivasi fertilitas akibat bertambahnya penduduk yang melek huruf serta berkembangnya jaringan-jaringan komunikasi dan transportasi.

Menurut Freedman, tingginya tingkat modernisasi tipe Barat bukan merupakan syarat yang penting terjadinya penurunan fertilitas. Pernyataan yang paling ekstrim dari suatu teori sosiologi tentang fertilitas sudah dikemukakan oleh Judith Blake. Ia berpendapat bahwa "masalah ekonomi adalah masalah sekunder bukan masalah normatif"; jika kaum miskin mempunyai anak lebih banyak daripada kaum kaya, hal ini disebabkan karena kaum miskin lebih kuat dipengaruhi oleh norma-norma pro-natalis daripada kaum kaya.

3. Teori Ekonomi tentang Fertilitas

Pandangan bahwa faktor-faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap fertilitas bukanlah suatu hal yang baru. Dasar pemikiran utama dari teori 'transisi demografis' yang sudah terkenal luas adalah bahwa sejalan dengan diadakannya pembangunan sosial-ekonomi, maka fertilitas lebih merupakan suatu proses ekonomis dari pada proses biologis.

Berbagai metode pengendalian fertilitas seperti penundaan perkawinan, senggama terputus dan kontrasepsi dapat digunakan oleh pasangan suami istri yang tidak menginginkan mempunyai keluarga besar, dengan anggapan bahwa mempunyai banyak anak berarti memikul beban ekonomis dan menghambat peningkatan kesejahteraan sosial dan material. Bahkan sejak awal pertengahan abad ini, sudah diterima secara umum bahwa hal inilah yang menyebabkan penurunan fertilitas di Eropa Barat dan Utara dalam abad 19. Leibenstein dapat dikatakan sebagai peletak dasar dari apa yang dikenal dengan "teori ekonomi tentang fertilitas". Menurut Leibenstein tujuan teori ekonomi fertilitas adalah:

“untuk merumuskan suatu teori yang menjelaskan faktor-faktor yang menentukan jumlah kelahiran anak yang dinginkan per keluarga. Tentunya, besarnya juga tergantung pada berapa banyak kelahiran yang dapat bertahan hidup (survive). Tekanan yang utama adalah bahwa cara bertingkah laku itu sesuai dengan yang dikehendaki apabila orang melaksanakan perhitungan- perhitungan kasar mengenai jumlah kelahiran anak yang dinginkannya. Dan perhitungan perhitungan yang demikian ini tergantung pada keseimbangan antara kepuasan atau kegunaan (utility) yang diperoleh dari biaya tambahan kelahiran anak, baik berupa uang maupun psikis. Ada tiga macam tipe kegunaan yaitu (a) kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai suatu ‘barang konsumsi’ misalnya sebagai sumber hiburan bagi orang tua; (b) kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai suatu sarana produksi, yakni, dalam beberapa hal tertentu anakdiharapkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dan menambah pendapatan keluarga; dan (c) kegunaan yang diperoleh dari anak sebagai sumberketentraman, baik pada hari tua maupun sebaliknya”.

Menurut Leibenstein anak dilihat dari dua aspek yaitu aspek kegunaannya (utility) dan aspek biaya (cost). Kegunaannya adalah memberikan kepuasaan, dapat memberikan balas jasa ekonomi atau membantu dalam kegiatan berproduksi serta merupakan sumber yang dapat menghidupi orang tua di masa depan. Sedangkan pengeluaran untuk membesarkan anak adalah biaya dari mempunyai anak tersebut. Biaya memiliki tambahan seoarang anak dapat dibedakan atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Yang dimaksud biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan dalam memelihara anak seperti memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak sampai ia dapat berdiri sendiri. Yang dimaksud biaya tidak langsung adalah kesempatan yang hilang karena adanya tambahan seoarang anak. Misalnya, seoarang ibu tidak dapat bekerja lagi karena harus merawat anak, kehilangan penghasilan selama masa hamil, atau berkurangnya mobilitas orang tua yang mempunyai tanggungan keluarga besar (Leibenstein, 1958).

Menurut Leibenstein, apabila ada kenaikan pendapatan maka aspirasi orang tua akan berubah. Orang tua menginginkan anak dengan kualitas yang baik. Ini berarti biayanya naik. Pengembangan lebih lanjut tentang ekonomi

fertiitas dilakukan oleh Gary S. Becker dengan artikelnya yang cukup terkenal yaitu “An Economic Analysis of Fertility”.

Menurut Becker anak dari sisi ekonomi pada dasarnya dapat dianggap sebagai barang konsumsi (a consumption good, consumer’s durable) yang memberikan suatu kepuasan (utility) tertentu bagi orang tua. Bagi banyak orang tua, anak merupakan sumber pendapatan dan kepuasan (satisfaction). Secara ekonomi fertilitas dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, biaya memiliki anak dan selera. Meningkatnya pendapatan (income) dapat meningkatkan permintaan terhadap anak.

Karya Becker kemudian berkembang terus antara lain dengan terbitanya buku A Treatise on the Family. Perkembangan selanjutnya analisis ekonomi fertilitas tersebut kemudian membentuk teori baru yang disebut sebagai ekonomi rumah tangga (household economics). Analisis ekonomi fertilitas yang dilakukan oleh Becker kemudian diikuti pula oleh beberapa ahli lain seperti Paul
T. Schultz, Mark Nerlove, Robert J. Willis dan sebagainya. Dalam tulisannya yang berjudul Economic growth and population: Perspective of the new home economics6 Nerlove mengemukakan:

“Ekonomi rumah tangga terdiri dari empat unsur utama, yaitu (a) suatu fungsi kegunaan. Yang dimaksud kegunaan disini bukanlah dalam arti komoditi fisik melainkan berbagai kepuasan yang dihasilkan rumah tangga; (b) suatu teknologi produksi rumah tangga; (c) suatu lingkungan pasar tenaga kerja yang menyediakan sarana untuk merubah sumber-sumber daya rumah tangga menjadi komoditi pasar; dan (d) sejumlah keterbatasan sumber-sumber daya rumah tangga yang terdiri dari harta warisan dan waktu yang tersedia bagi setiap anggota rumah tangga untuk melakukan produksi rumah tangga dan kegiatankegiatan pasar. Waktu yang tersedia dapat berbeda-beda kualitasnya, dan dalam hal ini tentunya termasuk juga sumberdaya manusia (human capital) yang diwariskan dan investasi sumberdaya manusia dilakukan oleh suatu generasi baik untuk kepentingan tingkah laku generasi-generasi yang akan datang maupun untuk kepentingan tingkah laku sendiri”

Dalam analisis ekonomi fertilitas dibahas mengapa permintaan akan anak berkurang bila pendapatan meningkat; yakni apa yang menyebabkan harga

pelayanan anak berkaitan dengan pelayanan komoditi lainnya meningkat jika pendapatan meningkat?

New household economics berpendapat bahwa (a) orang tua mulai lebih menyukai anak-anak yang berkualitas lebih tinggi dalam jumlah yang hanya sedikit sehingga "harga beli" meningkat; (b) bila pendapatan dan pendidikan meningkat maka semakin banyak waktu (khususnya waktu ibu) yang digunakan untuk merawat anak. Jadi anak menjadi lebih mahal.

Di dalam setiap kasus, semua pendekatan ekonomi melihat fertilitas sebagai hasil dari suatu keputusan rasional yang didasarkan atas usaha untuk memaksimalkan fungsi utility ekonomis yang cukup rumit yang tergantung pada biaya langsung dan tidak langsung, keterbatasan sumberdaya, selera. Topik- topik yang dibahas dalam ekonomi fertilitas antara berkaitan dengan pilihan- pilihan ekonomi seseorang dalam menentukan fertilitas (jumlah dan kualitas anak). Pertimbangan ekonomi dalam menentukan fertilitas terkait dengan income, biaya (langsung maupun tidak langsung), selera, modernisasi dan sebagainya.

Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan Becker, Bulato menulis tentang konsep demand for children and supply of children. Konsep demand for children dan supply of children dikemukakan dalam kaitan menganalisis economic determinan factors dari fertilitas. Bulatao mengartikan konsep demand for children sebagai jumlah anak yang dinginkan. Termasuk dalam pengertian jumlah adalah jenis kelamin anak, kualitas, waktu memliki anak dan sebagainya.

Konsep demand for children diukur melalui pertanyaan survey tentang "jumlah keluarga yang ideal atau diharapkan atau diinginkan". Pertanyaannya, apakah konsep demand for children berlaku di negara berkembang. Apakah pasangan di negara berkembang dapat memformulasikan jumlah anak yang dinginkan? Menurut Bulato, jika pasangan tidak dapat memformulasikan jumlah anak yang dinginkan secara tegas maka digunakan konsep latent demand dimana jumlah anak yang dinginkan akan disebut oleh pasangan ketika mereka ditanya.

Menurut Bulatao, modernisasi berpengaruh terhadap demand for children dalam kaitan membuat latent demand menjadi efektif. Menurut Bulatao, demand for children dipengaruhi (determined) oleh berbagai faktor seperti biaya anak,

pendapatan keluarga dan selera. Dalam artikel tersebut Bulato membahas masing-masing faktor tersebut (biaya anak, pendapatan, selera) secara lebih detail. Termasuk didalamnya dibahas apakah anak bagi keluarga di negara berkembang merupakan "net supplier " atau tidak. Sedang supply of children diartikan sebagai banyaknya anak yang bertahan hidup dari suatu pasangan jika mereka tidak berpisah/cerai pada suatu batas tertentu. Supply tergantung pada banyaknya kelahiran dan kesempatan untuk bertahan hidup. Supply of children berkaitan dengan konsep kelahiran alami (natural fertility).

Menurut Bongart dan Menken fertilitas alami dapat diidentifikasi melalui lima hal utama, yaitu:

a. Ketidak-suburan setelah melahirkan (postpartum infecundibality)
b. Waktu menunggu untuk konsepsi (waiting time to conception)
c. Kematian dalam kandungan (intraurine mortality)
d. Sterilisasi permanen (permanent sterility)
e. Memasuki masa reproduksi (entry into reproductive span)

Analisis ekonomi tentang fertilitas juga dikemukakan oleh Richard A. Easterlin. Menurut Easterlin permintaan akan anak sebagian ditentukan oleh karakteristik latar belakang individu seperti agama, pendidikan, tempat tinggal, jenis/tipe keluarga dan sebagainya. Setiap keluarga mempunyai norma-norma dan sikap fertilitas yang dilatarbelakangi oleh karakteristik diatas. Easterlin juga mengemukakan perlunya menambah seperangkat determinan ketiga (disamping dua determinan lainnya: permintaan anak dan biaya regulasi fertilitas) yaitu mengenai pembentukan kemampuan potensial dari anak. Hal ini pada gilirannya tergantung pada fertilitas alami (natural fertility) dan kemungkinan seorang bayi dapat tetap hidup hingga dewasa.

Fertilitas alami sebagian tergantung pada faktor-faktor fisiologis atau biologis, dan sebagian lainnya tergantung pada praktek-praktek budaya. Apabila pendapatan meningkat maka terjadilah perubahan "suplai" anak karena perbaikan gizi, kesehatan dan faktor-faktor biologis lainnya. Demikian pula perubahan permintaan disebabkan oleh perubahan pendapatan, harga dan

“selera”. Pada suatu saat tertentu, kemampuan suplai dalam suatu masyarakat bisa melebihi permintaan atau sebaliknya.

Easterlin berpendapat bahwa bagi negara-negara berpendapatan rendah permintaan mungkin bisa sangat tinggi tetapi suplainya rendah, karena terdapat pengekangan biologis terhadap kesuburan. Hal ini menimbulkan suatu permintaan “berlebihan” (excess demand) dan juga menimbulkan sejumlah besarorang yang benar-benar tidak menjalankan praktek-praktek pembatasan keluarga. Di pihak lain, pada tingkat pendapatan yang tinggi, permintaan adalah rendah sedangkan kemampuan suplainya tinggi, maka akan menimbulkan suplai “berlebihan” (over supply) dan meluasnya praktek keluarga berencana. John C. Caldwell juga melakukan analisis fertilitas dengan pendekatan ekonomisosiologis.

Tesis fundamentalnya adalah bahwa tingkah laku fertilitas dalam masyarakat pra-tradisional dan pasca-transisional itu dilihat dari segi ekonomi bersifat rasional dalam kaitannya dengan tujuan ekonomi yang telah ditetapkan dalam masyarakat, dan dalam arti luas dipengaruhi juga oleh faktor-faktor biologis dan psikologis.

Teori Caldwell menekankan pada pentingnya peranan keluarga dalam arus kekayaan netto (net wealth flows) antar generasi dan juga perbedaan yang tajam pada regim demografis pra-transisi dan pasca-transisi. Caldwell mengatakan bahwa “sifat hubungan ekonomi dalam keluarga” menentukan kestabilan atau ketidak-stabilan penduduk. Jadi pendekatannya lebih menekankan pada dikenakannya tingkah laku fertilitas terhadap individu (atau keluarga inti) oleh suatu kelompok keluarga yang lebih besar (bahkan yang tidaksedaerah) dari pada oleh “norma-norma” yang sudah diterima masyarakat. Seperti diamati oleh Caldwell, didalam keluarga selalu terdapat tingkat eksploitasi yang besar oleh suatu kelompok (atau generasi) terhadap kelompok atau generasi lainnya, sehingga jarang dilakukan usaha pemaksimalan manfaat individu. Selain teori yang disajikan dalam tulisan ini masih banyak teori lain yang membahas fertilitas. Namun karena keterbatasan tempat tidak semua teori fertilitas dapat disajikan dalam tulisan ini.

Faktor lainnya yang mempengaruhi tinggi rendahnya fertilitas penduduk menurut faktor demografi dan non demografi:

a. Faktor Demografi, antara lain :
   - Struktur umur
   - Struktur perkawinan
   - Umur kawin pertama
   - Paritas
   - Disrupsi perkawinan
   - Proporsi yang kawin

b. Faktor Non Demografi, antara lain :
   - Keadaan ekonomi penduduk
   - Tingkat pendidikan
   - Perbaikan status perempuan
   - Urbanisasi dan industrialisasi

➢ Faktor penunjang kelahiran (pro natalitas) antara lain:
   - Kawin pada usia muda, karena ada anggapan bila terlambat kawin keluarga akan malu.
   - Anak dianggap sebagai sumber tenaga keluarga untuk membantu orang tua.
   - Anggapan bahwa banyak anak banyak rejeki.
   - Anak menjadi kebanggaan bagi orang tua.
   - Anggapan bahwa penerus keturunan adalah anak laki-laki, sehingga bila belum ada anak laki-laki, orang akan ingin mempunyai anak lagi.

➢ Faktor pro natalitas mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk menjadi besar.

Faktor-faktor penghambat kelahiran (anti natalitas), antara lain:
   - Adanya program keluarga berencana yang mengupayakan pembatasan jumlah anak.
   - Adanya ketentuan batas usia menikah, untuk wanita minimal berusia 16 tahun dan bagi laki-laki minimal berusia 19 tahun.

- Anggapan anak menjadi beban keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- Adanya pembatasan tunjangan anak untuk pegawai negeri yaitu tunjangan anak diberikan hanya sampai anak ke – 2.
- Penundaaan kawin sampai selesai pendidikan akan memperoleh pekerjaan.

➢ Faktor – faktor penunjang tingginya angka natalitas dalam suatu negara antara lain :

- Kepercayaan dan agama

  Faktor kepercayaan mempengaruhi orang dalam penerimaan KB. Ada agama atau kepercayaan tertentu yang tidak membolehkan penganutnya mengikuti KB. Dengan sedikitnya peserta KB berarti kelahiran lebih banyak dibanding bila pesertaKB banyak
- Tingkat pendidikan

  Semakin tinggi orang sekolah berarti terjadi penundaan pernikahan yang berarti pula penundaan kelahiran. Selain itu pendidikan mengakibatkan orang merencanakan jumlah anak secara rasional.
- Kondisi perekonomian

  Penduduk yang perekonomiannya baik tidak memikirkan perencanaan jumlah anak karena merasa mampu mencukupi kebutuhannya. Jika suatu negara berlaku seperti itu maka penduduknya menjadi banyak.
- Kebijakan pemerintah

  Kebijakan pemerintah mempengaruhi apakah ada pembatasan kelahiran atau penambahan jumlah kelahiran. Selain itu kondisi pemerintah yang tidak stabil misalnya kondisi perang akan mengurangi angka kelahiran
- Adat istiadat di masyarakat

  Kebiasaan dan cara pandang masyarakat mempengaruhi jumlah penduduk. Misalnya nilai anak, ada yang menginginkan anak

sebanyak-banyaknya, ada yang menilai anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan atau sebaliknya, sehingga mengejar untuk mendapatkan anak laki-laki atau sebaliknya.

- Kematian dan kesehatan

  Kematian dan kesehatan berkaitan dengan jumlah kelahiran bayi. Kesehatan yang baik memungkinkan bayi lebih banyak yang hidup dan kematian bayi yang rendah akan menambah pula jumlah kelahiran.

- Struktur Penduduk

  Penduduk yang sebagian besar terdiri dari usia subur, jumlah kelahiran lebih tinggi dibandingkan yang mayoritas usia non produktif (misalnya lebih banyak anak-anak dan orang-orang tua usia).

Untuk menentukan jumlah kelahiran dalam satu wilayah digunakan angka kelahiran (Fertilitas). Angka kelahiran yaitu angka yang menunjukkan rata-rata jumlah bayi yang lahir setiap 1000 penduduk dalam waktu satu tahun.

Pengukuran Fertilitas tidak sesederhana dalam pengukuran mortalitas, hal ini disebabkan adanya alasan sebagai berikut :

- Sulit memperoleh angka statistik lahir hidup karena banyak bayi – bayi yang meninggal beberapa saat setelah kelahiran, tidak dicatatkan dalam peristiwa kelahiran atau kematian dan sering dicatatkan sebagai lahir mati.
- Wanita mempunyai kemungkinan melahiran dari seorang anak (tetapi meninggal hanya sekali)
- Makin tua umur wanita tidaklah berarti, bahwa kemungkinan mempunyai anak makin menurun.
- Di dalam pengukuran fertilitas akan melibatkan satu orang saja. Tidak semua wanita mempunyai kemungkinan untuk melakukan.

Ada dua istilah asing yang kedua – duanya diterjemahkan sebagai kesuburan, yaitu :

- Facundity (kesuburan)

Facudity adalah lebih diartikan sebagai kemampuan biologis wanita untuk mempunyai anak.

- Fertility (fertilitas)

  Fertility adalah jumlah kelahiran hidup dari seorang wanita atau sekelompok wanita.

5.5 Latihan Soal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kependudukan di suatu Negara!

   Jawab:

   .....

   .....

2. Jelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang!

   Jawab:

   .....

   .....

3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi!

   Jawab:

   .....

   .....

4. Jelaskan faktor penyebab tingginya tingkat fertilitas!

   Jawab:

   .....

   .....

5. Jelaskan faktor – faktor penunjang tingginya angka natalitas dalam suatu negara!

   Jawab:

   .....

   .....

BAB 6

Peranan Perdagangan dalam Pembangunan

Lingkup pembahasan dalam bab 6 ini secara menyeluruh di antaranya membahas tentang:

1. **Pendahuluan**
2. **Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi**
3. **Perdagangan Internasional**
4. **Peranan Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang**
5. **Latihan Soal**

KAD 9 : mahasiswa dapat menganalisis tentang perdagangan dan pembangunan ekonomi serta tentang perdagangan internasional

KAD 10 : mahasiswa dapat menganalisis tentang peranan perdagangan dalam pembangunan ekonomi negara berkembang

---

6.1 Pendahuluan

Sebelum digulirkannya era globalisasi sistem perdagangan yang melalui batas wilayah suatu negara sudah sering dilakukan oleh bangsa kita. Ini selain mencerminkan bahwa kita sebenarnya adalah negara maritim, maka bila suatu negara ingin maju dalam urusan ekonominya maka harus mengadakan transaksi dengan negara lain. Selain karena kita tidak bisa memenuhi sendiri barang-barang kebutuhan kita, juga dengan perdagangan dengan luar negeri akan mendatangkan devisa.

Disisi yang lain bahwa karena kita memang negara yang kaya akan sumber daya alam terutama sumber kekeyaan laut, maka kalau tidak dipasarkan keluar negara maka

akan terjadi penumpukan stok dalam negeri. Sehingga kegiatan eksport sumber daya alam selain memang dibutuhkan bagi negara lain yang tidak mempunyai barang yang sama, juga kita akan lebih untung dengan adanya kurs dolar yang lebih besar dari nilai rupiah. Sementara itu bila kita kaji secara lebih mendalam dengan perbedaan yang ada terutama mengenai ketersediaan sumber daya alam, yang meliputi ikilim, cuaca, kondisi alam, kesuburan tanah, letak geografis, budaya, politik dan sebagainya, maka kondisiini akan menjadi pendorong yang amat kuat untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Berdasarkan data yang ada banyak negara-negara Eropa dan Amerika amat menyukai rempah-rempah dan hasil bumi yang lain yang berasal dari negara Indonesia.

Dan ini merupakan salah satu sebab mengapa Belanda dan Jepang menjajah Indonesia. Tidak hanya itu lewat perdagangan dengan luar negeri bangsa kita menjadi menjadi terkenal di manca negara. Selanjuntnya peran perdagangan internasional sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu bagnsa. Dengan perdagangan internasional dan masalah-masalah pembayaran didalamnya akan dapat mempengaruhi proses pembangunan dalam dua jalur yang berlawanan secara diametral. Dengan kemungkinan adanya spesialisasi dan pemasukan teknik-teknik khusus yang lebih produktif, maka hal ini akan memicu terjadinya perukaran dengan luar negeri. Dengan kelebihan nilai sumber daya alam yang tinggi maka lewat proses perdagangan akan mempercepat proses pembangunan bangsa.

Pada berbagai kasus yang banyak dialami dalam sebuah perekonomian suatu bangsa, dimana sesuai dengan laju pertumbuhaanya, keinginan akan barang import cenderung meningkat diatas kemampuan eksportnya. Dan selalu akan memungkinkan terjadinya krisis pada neraca pembayarannya, sehingga akan dipaksa mengikuti pola- pola pembangunan yang cenderung lebih mengurangi ketimbang menambah produktivitas. Diera modern dan era globalisasi ini sudah tidak ada negara yang mampu menghasilkan sendiri segala apa yang dibutuhkan. Tidak setiap negara memiliki kesamaan dalam sumber alam yang diperlukan untuk industrinya. Hasil bumi yang dihasilkan juga beragam dari masing-masing negara sehingga harus berhubungan dengan luar negeri dalam memenuhi kebutuhan yang makin
banyak. Berbagai situasi dan keadaan diatas, maka tampaknya perlu dibahas secara lebih mendalam mengenai peran perdagangan internasional bagi pembangunan bangsa.

6.2 Perdagangan dan Pembangunan Ekonomi

Hubungan ekonomi dengan luar negeri adalah bagian dari hubungan internasional yang lebih luas, yang juga mencakup hubungan politik, militer, kebudayaan dan sebagainya. Hubungan ekonomi dengan luar negeri di antaranya yaitu dalam bentuk:

1. Perdagangan internasional. Adapun kegiatan ini mencakup arah jumlah dan perkembangan perdagangan serta pengaruhnya terhadap struktur ekonomi nasional juga menyangkut keuntungan / kerugian, spesialisasi dan perdagangan internasional.
2. Pembayaran internasional : eksport barang dan jasa yang menimbulkan tagihan terhadap luar negeri, sedang imoprt menimbulkan hutang. Hutang-hutang ini harus diselesaikan dengan pembayaran antar negara, selain itu juga ada saling memberi kredit, bantuan internasional (IMF, Bank Dunia), dan lalulintas pembayaran internsional dicatat pada neraca pembayaran internasional.
3. Kebijakan perdagangan internasional : usaha-usaha untuk memajukan perdagangan antar negara, serta rintangan-rintangan yang timbul, alasan-alasan dan akibatnya.
4. Kerjasama internasional serta lembaga-lembaga yang didirikan untukmemajukan kerjasama dan saling membantu antar negara (Gilarso,1993).

Pada kenyataanya dalam perdagangan dengan luar negeri tidak hanya mencakup eksport dan import barang tetapi juga penyelenggaraan jasa-jasa seperti penganggkutan, perkapalan, perjalanan, asuransi, pariwisata, perbankan, pos dan komunikasi. Selain itu juga hasil-hasil modal seperti pembayaran deviden, laba perusahaan asing dan bantuan antar negara. Hubungan internasional antar negara-negara disunia muncul darikenyataan bawha beberapa hasil produksi suatu negara harus di eksport kenegara lain, dan sebaliknya beberapa barang yang dikosumsi atau dinvestasikan dalam negeri diproduksi diluar negeri dan harus diimport. Harga-harga diluar negeri dapat mempengaruhi harga-harga didalam negeri melalui dua cara. Pertama, harga-harga komoditi atau bahan mentah (misal :minyak, timah, tembaga dan lain-lain) yang merupakan masukan proses produksi dan unsur biaya bagi produsen, sangat dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran dunia. Perubahan harga-harga ini akan mempengaruhi harga-harga didalam negeri. Cara kedua, harga-harga barang manufaktur

imoprt seperti mobil, alat-alat mesin dan sebagainya mempengaruhi permintaan atas permintaan barang-barang yang diproduksi dalam negeri. Turunnya harga-harga barang produksi luar negeri relatif terhadap barang-barang yang diproduksi dalam negeri, akan menggeser permintaan barang-barang yang diproduksi secara domistik ke arah barang-barang buatan luar negeri.

Hubungan internasional yang sangat erat juga terjadi dibidang keuangan. Para investor tingkat dunia menjalin suatu hubungan antara pasar modal / pasar saham di dalam negeri dengan luar negeri dan tindakan mereka ini mempunyai efek yang sangat mendasar terhadap proses penentuan pendapatan, nilai tukar dan kemampuan kebijakan moneter untuk mempengaruhi suku bunga (Dornbusch & Fischer, 2001).

Perdagangan internasional memiliki konstribusi yang cukup tinggi terhadap upaya pembangunan ekonomi yaitu dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dampak positif perdagangan internasional terhadap pertumbuhan perkonomian, di antaranya:

1. Terpenuhinya kebutuahanakan berbagai macam kebutuhan barang danjasa dalam negeri
2. Penduduk di Negara yang bersangkutan dapat memperoleh barang dan jasa dengan mudah danmurah sebagai akibat dari efisiensi dan spesialiasai
3. Adanya peningkatan devisa Negara
4. Peluang kerja lebih besar
5. Terciptanya persahabatan dan kerja samaantar Negara
6. Terdorongnyakegiatanekonoi dalam negeri.

6.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang di lakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdaganan internasional adalahperdagangan yang dilakukan olehpenduduk suatunegaradengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negaradengan pemerintah negara lain (Setiawan dan Lestari, 2011).

Sedangkan Menurut Sukirno (2004) Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk antar satu negara dengan negara lain yang berlandaskan

kepada kesepakatan. Perdagangan internasional ini dapat dilakukan antara individu dengan pemerintah Negara yang satu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri yang berdasarkan atas kesepakatan diantara keduanya. Yang dimaksud dengan penduduk dalam konteks ini dapat berupa transaksi antar perorangan yaitu individu dengan individu, dan antara perintah dari suatu Negara. Dalam pengertian lainnya Sutedi (2014:3) menjelaskan bahwa perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli yang dilakuan lintas negara, yang melibatkan dua pihak serta melintasi batas kenegaraan.

Jika diperbandingkan dengan pelaksanaan perdagangan yang ada di dalam negeri, perdagangan internasional lebih rumit dan kompleks. Kerumitan tersebut disebabkan karena adanya batas-batas politik serta kenegaraan yang menghambat perdagangan, misalnya dengan adanya, tarif, quota barang impor dan bea (Amir, 2003).

Setiap negara yang melakukan perdaganan dengan negara lain tentu akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut antara lain: (Setiawan dan Lestari, 2011)

1. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara

   Perdagangan antar negara dapat mewujudkan hubungan persahabatan. Jika hubungan ini terjalin dengan baik, ia dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara-negara tersebut. Mereka dapat semakin akrab dan saling membantu bulamana mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan.

2. Kebutuhan setiap negara dapat tercukupi

   Dengan perdagangan internasional, suatu negara yang masuk kekurangan dalam memproduksi suatu barang dapat dipenuhi dengan mengimpor barang dari negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi. Sebaliknya negara yang mempunyai kelebihan hasil produksi barang dapat mengekspor barang tersebut ke negara yang kekurangan. Dengan demikain kebutuhan setiap negara dapat tercukupi.

3. Mendororng kegiatan produksi barang secara meaksimal

   Salah satu tujuan suatu negara perdaganan internasional adalah memprluas pasar di luar negeri. Jika pasar luar negeri semakin luas, maka produksi dalam negara terdorong semakin meningkat. Dengan demikian, para pengusaha terdorong semakin menghasilkan barang produksi secara besar-besaran.

4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perdagangan antar negara memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien. Perdaganan luar negeri memunkinkan negara terseut mengimpor mesin-mesin atau alat-alat modern untuk melaksanakan teknik produksi dan cara produksi yang lebih baik. Dengan demikian, teknologi yang lebih modern dapat meningkatkan produktivitas dan dapat mengadakan spesialisasi produksi.

5. Setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi

Perdagangan internasional dapat mendorong setiap negara sumber daya alam, tenaga kerja modal dan keahlian secara maksimal. Suatu negara yang memiliki produk unggulan, dapat bersaing dengan produk dari luar negeri.

6. Memperluas lapangan kerja

Jika pasar luar negeri semakin meluas, maka barang atau jasa yang dihasilkan juga semakin bertambah. Perningkatan hasil produksi meningkatkan kebutuhan tenaga kerja bagi perushaan sehingga membukan kesempatan kerja baru dan mengurangi pengangguran.

Sejalan dengan yang dikemukakan di atas, dapat kita ketahui bahwa ada beberapa manfaat perdagangan internasional di antaranya:

1. Mendatangkan devisa yang besar terutama bagi eksportir dan produsen.
2. Kenakian sisi ekspor akan menambah produksi /volume produksi yang berakibat pada tersedianya kesempatan kerja baru.
3. Terjadinya transfer barang yang akan diikuti dengan masuknya modal ke dalam negeri
3. Terjadinya transfer teknologi dari luar ke dalam negeri

Sedangkan faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional menurut Setiawan dan Lestari (2011:11), faktor penyebab perdagangan internasional antara lain sebagai berikut:

1. Revolusi informasi dan transportasi

Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sisitem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta

digitalisasi pemrosesan data berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi.

2. Interpendensi kebutuhan

Masing-masing negaa memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa ditinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Semuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antar negara yang satu dengan yang lainnya.

3. Liberalisasi ekonomi

Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerja sama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan anata negara.

4. Asas keunggulan komparatif

Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki kenunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut.

5. Kebutuhan devisa

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.

Faktor Pendorong Perdagangan Internasional masih menurut Setiawan dan Lestari (2011:12), adapun beberapa faktor pendorong perdagangan internasional antara lain:

1. Perbedaan Sumber Daya Alam
2. Teknologi
3. Perbedaan Kapasitas Produksi
4. Efisiensi Biaya
5. Perbedaan Selera.

Sukirno (2014) menjelaskan ada delapan faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
2. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara

3. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi
4. Adanya kelebihan produk dalam negeri shingga perlu pasar baru
5. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
6. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang
7. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain
8. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

6.3.1 Kegiatan Eksport dan Import

Dalam perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dengan kegiatan ekspor dan impor, karena kedua hal ini merupakan nadi dalam perdaganganinternasional. Keterbukaan perdagangan yang dilihat dari proporsi nilai total ekspor dan impor terhadap PDB memiliki pengaruh terhadap arus investasi asing pada suatu negara. Dalam jangka panjang dampak keterbukaan perdagangan pada tingkat investasi swasta dalam perekonomian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung. Jika dibutuhkan waktu untuk melihat dampak liberalisasi perdagangan dalam mempengaruhi perilaku investasi di pasar, maka ada alasan untuk percaya bahwa adalag antara liberalisasi perdagangan dan tingkat investasi swasta dalam perekonomian.

Adapun pengertian Ekspor yang dikemukan oleh Mankiw (2012) adalah suatu barang dan atau jasa yang diproduksi didalam negara dan dijual diluar negeri. Ekspor merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan cara mengirim barang keluar negeri dari dalam negeri dan telah melintasi wilayah pabean. Ekspor impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari sekadar membeli serta menjual barang antar pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara yang berbeda. Namun dalam konteks pertukaran barang serta jasa yang menyeberangi laut dan darat tidak jarang timbul berbagai masalah yang cukup kompleks antar pengusaha yang mempunyai kebudayaan, adat istiadat, bahasa, dan cara yang berbeda-beda.

Sedangkan pengertian impor dikemukan oleh Sutedi (2014) ialah memasukkan barang dari luar negeri kedalam Indonesia. Pada hakekatnya ekspor dan impor adalah

suatu transaksi sederhana yang tidak lebih dari sekadar membeli serta menjual barang antar pengusaha- yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang berbeda.

Kegiatan ekspor dan impor merupakan salah satu sumber devisa yang mampu memberikan dana besar. Sebelum melakuan kegiatan ekspor maka perusahaan harus memerhatikan kualitas dan standar pergudangan dan pengepakan barang, agar sesuai dengan standar mutu barang yang akan di ekspor. Menurut Amir, (2003) ekspor merupakan pengiriman barang keluar daerah pabean Indonesia. Kegiatan ekspor dimulai dari adanya pelakupelaku yang terlibat yaitu ekportir dan importir atas barang atau jasa dimana keduanya berbeda dinegara yang berbeda dan membuat kesepakatan tertulis dalam suatu kontrak jual beli didalamnya ditetapkan secara jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya salah penafsiarn". Kegiatan ekspor merupaka perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam negeri keluar wilayah pabean indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sedangkan kegiatan impor ialah perdagangan dengan cara memasukkan barang ke dalam wilayah pabean indonesia dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut dengan eksportir dan orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Kegiatan ekspor-impor ini pada umumnya dapat terjadi apabila terjadi transaksi antara penjual dan pembeli atau ekportir dan importir. Yang memberikan keuntungan bagi masing- masing pihak. Eksportir dapat menjual barang dengan harga yang lebih dari harga jual sebenarnya. Sedangkan Importir dapata membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Maksudnya kegiatan ekpor-impor ini dapat memberikan keuntungan baginegara-negara yang melakukan kegiatan ini baik yang mengekspor maupun yang mengimpor.

6.3.2 Ketentuan Eksport dan Import

Persyaratan ekspor berdasarkan keputusan Menteri dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan-peraturan menteri perdagangan Nomor 01/M DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007, ekspor

dapat dilakukna oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/ Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

2 Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lambang Pemerintah

Nondepartemen terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3 Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Adapun barang-barang yang bisa di ekspor atau tidak adalah sebagai berikut:

1) Barang yang dilarang

Adalah barang-barang yang tidak boleh diekspor, hal ini bertujuan agar komoditas tersebut dapat diproses menjadi barang setengah jadi atau barang jadi sehingga meningkatkan nilai tambah, menjaga pengadaan bahan baku, melindungi kelestarian alam, jenis tanaman dan binatang langka.

Contoh: Rotan mentah, satwa langka, kayu gelondongan, nener (ikan kecil).

2) Barang yang diatur

Adalah barang-barang yang dibatasi masuk ke negara importir.

Contoh: tekstil dan produk tekstil, kayu dan produk kayu, kopi, maniok, dan lain lain.

3) Barang yang diawasi

Adalah barang-barang yang dalam ekspornya dalam pengawasan pemerintah atau ekspor produk tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menperindag dan instansi teknis lainnya.

Contoh: kacang kedelai, padi dan beras, ternak hidup, tepung beras dan gandum.

4) Barang bebas

Adalah barang-barang yang tidak tercakup dalam daftar barang-barang diatas atau barang yang diperbolehkan diekspor oleh semua eksportir.

6.3.3 Para Pelaku Kegiatan Ekspor

Dalam kegiatan ekspor impor ada beberapa pelaku terjadinya kegiatan tersebut.

Adapun para pelaku kegiatan ekspor adalah:

1) Eksportir

Eksportir adalah orang atau perusahaan yang berperan sebagai produsen yang memproduksi barang untuk dijual ke luar negeri.

2) Importir

Orang atau perusahaan yang berperan sebagai pembeli di luar negeri.

3) Bank

Merupakan lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa perkreditan atau meminjamkan dana kepada eksportir maupun importir.

4) Depperindag

Adalah lembaga pemerintahan yang mengatur dan menerbitkan surat surat yang merupakan syarat kegiatan ekspor, seperti PEB dan SKA (Surat keterangan asal) atau certificate of origin (COO).

5) Freight Forwarder

Adalah badan usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan atau pengurusan atas seluruh kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman.

6) Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)

EMKL adalah usaha pengurusan dokumen dan muatan yang akan diangkut melalui kapal atau pengurusan dokumen dan muatan yang berasal dari kapal.

7) Perusahaan asuransi

Adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertanggungan. Dalam kegiatan ekspor ini, perusahaan ini menanggung resiko keselamatan barang dari eksportir sampai dikirim kepada pihak importir.

8) Bea Cukai

Adalah lembaga pemerintahan yang bertugas untuk memeriksa barang-barang yang melewati daerah pabean dan memungut biaya atas barang-barang yang akan diekspor.

6.3.4 Prosedur Ekspor

Pada saat melakukan kegiatan transaksi perdagangan internasional atau ekspor-impor ada beberapa tahap dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, yang disebut dengan prosedur. Sehingga, prosedur merupakan suatu urutan yang telah tersusun dengan melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih. Prosedur disusun untuk

menjamin penanganan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang agar tetap teratur.

Berikut ini prosedur ekspor yang harus dilakukan dalam rangka kegiatan ekspor baik oleh pihak eksportir maupun pihak bank.

a. Eksportir dan Importir menutup kontrak penjualan yang disepakati bahwa pembayaran dilakukan dengan pembukuan Letter of Credit (LC).
b. Importer mengajukan permohonan (aplikasi) kepada banknya (opening/issuing bank) agar membuka suatu L/C untuk keuntungan eksportir. Dalam aplikasinya itu, importir menetapkan kondisi dan syarat L/C.
c. Atas permintaan dan perintah pihak importir nasabahnya, opening/issuing bank membuka/menerbitkan L/C dengan kondisi dan syarat seperti yang diminta oleh applicant/accountee. L/C diteruskan kepada eksportir melalui banknya eksportir (advising bank).
d. Apabila diinginkan bahwa reimbursement harus diajukan kepada bank lain (bukan opening bank itu sendiri), maka opening bank harus member otorisasi kepada bank lain tersebut (reimbursing bank).
e. Adakalanya penyampaian L/C dilakukan banknya eksportir termaksud butir (c) dilakukan melalui bank lain diluar neeri untuk mendapatkan konfirmasi atas L/C tersebut. Hal ini biasanya terjadi atas bonafiditas opening bank, sehingga perlu konfimasi dari bank lain.
f. Advising bank selanjutnya meneruskan L/C yang diterimananya kepada beneficiar (eksportir nasabahnya) setelah mengecek keaslian L/C yang bersangkutan dan tidak ada persyaratan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
g. Untukk dapat melaksanakan ekspor, eksportir Indonesia harus memiliki Angka Pengenal Ekspor (APE) atu Angka Pengenal Eksportir Sementara (APES) yang dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah perdagangan ditempat domisili eksportir yang bersangkutan.
h. Barang dimuat di atas kapal untuk selanjutnya dikirim kepada pembeli diluar negeri.
i. Atas pengangkutan/pengiriman barang tersebut, eksportir menerima dokumen pengangkutan berupa Bill of Lading (B/L) ataupun Air Waybill. tergantung pada jalur yang digunakan, apakah jalur laut atau udara, dan maskapai perkapalan yang bersangkutan.

j. Eksportir mempersiapkan semua dokumen yang diminta/di syaratkandalam L/C seperti wesel, faktur, B/L atau Air Waybill dan lain-lain, untuk selanjutnya bersama-sama dengan PEB yang telah difiat oleh Bea dan Cukai diajukan kepada bank devisa untuk alih atau dinegosiasi.

k. Setelah diperiksa dan ternyata telah sesui dengan persyaratan dalam L/C serta sesuai pula (tidak melanggar ketentuan yang berlaku), maka dokumen ekspor diambil alih/dinegosiasikan oleh bank devisa. Hal dalam rupiah atau dalam valuta asal, setelah dipotong dengan ongkosongkos dan pungutan lain, dibayarkan kepada eksportir.

l. Bank devisa mengirim dokumen ekspor kepada opening bank dengan schedule of remittance (SR) untuk minta reimburse atau penggantian atas dana yang telah dibayarkan kepada eksportir atau dalam hal Usance L/C minta akseptasi wesel.

m. Dalam hal opening bak menunjuk bank lain sebagai rembursing bank tersebut.

n. Apabila menurut penilainnya semua dokumen telah sesuai dengan persyaratan dalam L/C, maka opening bank memberikan reimburse/penggantian pembayaran kepada negotiating bank.

o. Reimbursing bank atas otorisasi yang diberikan oleh opening bank, memberikan remburs membayar kepada negotiating bank dan pada waktu yang bersamaan membebani rekening opening bank.

p. Opening bank menyerahkan dokumen pengapalan dan dokumen lainnya kepada importir. Importir (accountee) melakukan perhitungan pembayaran opening L/C

.

Dapat disimpulkan bahwa dari keterangan-keterangan yang telah dijelaskan di atas bahwa prosedur ekspor mencakup dokumen-dokumen yang menjadi syarat pelaksanaan ekspor dan melibatkan beberapa pihakseperti beberapa pihak bank dengan tugas yang berbeda-beda. Prosedur ekspor di setiap perusahaan pada dasarnya adalah sama, namun semua tergantung pada prosedur yang dijalani oleh perusahaan yang bersangkutan.

6.4 Peranan Perdagangan dalam Pembangunan Ekonomi Negara Berkembang

Pembangunan perdagangan merupakan salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang

berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran.

Dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Garis garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa jasa, termasuk pelayanan infrastruktur dan jasa keuangan, terus dikembangkan menuju terciptanya jaringan informasi, perhubungan, perdagangan, dan pelayanan keuangan yang andal, efisien, mampu mendukung industrialisasi, dan upaya pemerataan. Di samping itu, GBHN 1993 juga menggariskan bahwa dalam PJP perdagangan harus mampu menunjang peningkatan produksi dan memperlancar distribusi sehingga mampu mendukung upaya pemerataan, serta memperkuat daya saing melalui pengembangan kemampuan untuk memperkirakan dan memanfaatkan pengaruh perkembangan ekonomi dunia.

GBHN 1993 memberikan petunjuk bahwa perdagangan dalam negeri dan distribusi dalam Rencana Pembangunan diarahkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta melindungi kepentingan produsen dan konsumen dalam rangka memantapkan stabilitas ekonomi, mempercepat pembangunan, menyebarkan dan memeratakan hasil pembangunan ke seluruh wilayah tanah air sehingga kesempatan usaha dan lapangan kerja terbuka lebih luas serta lebih mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Peningkatan ekspor barang dan jasa termasuk jasa konstruksi diarahkan pada penganekaragaman jenis komoditas ekspor, peningkatan jumlah serta mutu barang dan jasa ekspor serta meningkatkan daya saing melalui upaya

perluasan pasar, penyebaran informasi dan peningkatan promosi, didukung oleh sarana dan prasarana telekomunikasi, komunikasi, dan transportasi serta lembaga keuangan yang andal. Impor barang dan jasa diarahkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor, penghematan devisa, dan pola hidup sederhana.

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan juga harus selalu mengarah pada terwujudnya Demokrasi Ekonomi. Oleh karena itu harus dihindari sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia; sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara; serta persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakatdan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

6.5 Latihan Soal

Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas!

1. Jelaskan faktor penyebab perdagangan internasional !

   Jawab:

   .....

   .....

2. Jelaskan peranan perdagangan dalam pembangunan ekonomi Negara Berkembang!

   Jawab:

   .....

   .....

3. Jelaskan pelaku kegiatan ekspor!

   Jawab:

   .....

   .....

4. Jelaskan ketentuan eksport dan import!

   Jawab:

   .....

   .....

5. Jelaskan tentang prosedur eksport!

   Jawab:

   .....

   .....

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R.. 2005. *Pembangunan Ekonomi Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amir M.S. 2003. *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya. Cetakan Kedelapan*. Jakarta Pusat: Penerbit Lembaga Manajemen PPM.

Arsyad, Lincolin. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. STIE YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2004. *Rata-Rata Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan Per Kapita pada Kelompok* Referensi [www.go.id]

Bannock, Graham, R.E. Baxter dan Evan Davis. 2004. *A Dictionary of Economics*. Inggris : Penguin Book LTD.

Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Boediono. 2008. *Ekonomi Moneter Edisi 3*. Yogyakarta: BPFE.

Case, Karl E., Ray C. Fair., and Sharon M. Oster. 2012. *The Principles of Macroeconomics 10th Edition*. New York: Prentice-Hall, Inc.

Dornbusch, R., Fischer, S., Startz, R.. 2001. *Makroekonomi*. Jakarta : Media Global Edukasi.

Gilarso, T. 2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Edisi Pertama. IKAPI. Yogyakarta.

Jarnasy, Owin. 2004. *Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*. Belantika: Jakarta.

Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*. Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada.

Keputusan Menteri dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor

Lessman, Christian. 2006. *Fiscal Decentralization and Regional Disparity: A panel data approach for OECD countries*. Ifo Working Papers.

Sajogyo dan Pudjiwati. 2002. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Saleh, Samsubar. 2002. Faktor - Faktor PenentuTingkat Kemiskinan Regional di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 7, No. 2, h. 87 - 102*.

Setiawan, Heri dan Lestari, Sari. 2011. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

Siahaan, Bertha P. 2010. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah (Periode 2004-2008)*. Undip Semarang: Fakultas Ekonomi.

Sukirno, Sadono. 2014. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Kencana.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan.* Jakarta: Salemba Empat.

Suryawati. 2004. *Teori Ekonomi Mikro*. UPP. AMP YKPN. Yogyakarta: Jarnasy

Sutedi, Adrian. 2014. Hukum Ekspor Impor. Raih Asa Sukses. Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

Tikson, T. Deddy. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Makassar : Gemilang Persada.

Todaro, Michael P. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke Sembilan, Jilid I, II. Bumi Aksara Jakarta.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga.

Mankiw N,Gregory, dkk. 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat.

Meier, G. M. dan J. E. Rauch. 2000. *Leading Issues in Economics Development (Seventh Edition)*. New York – Oxford. Oxford University Press.

Nugroho, I. dan Rochimin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES